



T 11375



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**BENTUK PENERAPAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN  
DUNIA USAHA**

**(Studi Kasus pada Sebuah Industri Perbekalan Kesehatan  
Rumah Tangga di Kawasan Industri Jababeka - Cikarang)**

With a Summary in English

**IMPLEMENTATION OF  
CORPORATE ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY  
(Case Study on A Household Cleaning and Health Product  
Manufacturer in Jababeka Industrial Estate – Cikarang)**

Shanty Novriaty  
7100040239

T  
11375

PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA, 2004

**PERPUSTAKAAN PUSAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**BENTUK PENERAPAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN  
DUNIA USAHA**

**(Studi Kasus pada Sebuah Industri Perbekalan Kesehatan  
Rumah Tangga di Kawasan Industri Jababeka - Cikarang)**

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

**MAGISTER SAINS  
ILMU LINGKUNGAN**

**Shanty Novriaty  
7100040239**

**PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA, 2004**

Judul Tesis : **BENTUK PENERAPAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN  
DUNIA USAHA**  
(Studi Kasus pada Sebuah Industri Perbekalan Kesehatan  
Rumah Tangga di Kawasan Industri Jababeka - Cikarang)

Tesis ini telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Penguji Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia pada tanggal 16 Januari 2004 dan telah dinyatakan LULUS ujian komprehensif dengan Yudisium Sangat Memuaskan.

Jakarta, Januari 2004

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ilmu Lingkungan

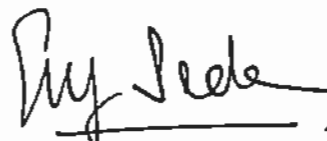
Tim Pembimbing



Prof. Retno Soetaryono, SH, MSi



Prof. Retno Soetaryono, SH, MSi



Francisia SSE Seda, Ph.D.

Nama : SHANTY NOVRIATY  
 NPM/Angkatan : 7100040239/XIX  
 Kekhususan : Perencanaan Lingkungan  
 Judul Tesis : BENTUK PENERAPAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN  
 DUNIA USAHA  
 (Studi Kasus pada Sebuah Industri Perbekalan Kesehatan  
 Rumah Tangga di Kawasan Industri Jababeka-Cikarang)

### Komisi Penguji Tesis

No.	Nama Lengkap	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Prof. Retno Soetaryono, SH, MSI	Ketua Sidang (Pembimbing)	
2.	Dr. Ir. Setyo S. Moersidik, DEA	Sekretaris Sidang	
3.	Francisia SSE Seda, PhD.	Pembimbing	
4.	Prof. Dr. Emil Salim	Penguji Ahli	
5.	Prof. Dr. JB Sumarlin	Penguji Ahli	
6.	Dr. Gumilar R. Somantri	Penguji Ahli	

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Shanty Novriaty  
Tempat Tgl. Lahir : Jakarta, 21 November 1964  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat rumah : Taman Depok Permai, Blok A4/10  
Depok, 16415  
Telp. (021) 7708446  
Alamat e-mail : [awang@cbn.net.id](mailto:awang@cbn.net.id)  
[shantynovriaty@yahoo.com](mailto:shantynovriaty@yahoo.com)

### Pekerjaan:

Staf Pengajar pada Program Sarjana Sosiologi FISIP UI.

### Riwayat Pendidikan:

- Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Program Studi Kajian Ilmu Lingkungan.
- S1 (Sarjana strata satu) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- SMA Negeri 4 Jalan Batu 3 Jakarta.

### Kursus dan Pelatihan:

*Professional Training Programme for Management*, kursus singkat yang diselenggarakan oleh *International Training Centre for Women*, Amsterdam, The Netherlands. 1998

**Penelitian (Antara lain):**

Januari – Oktober 1999

Tim Peneliti dalam penelitian "***Institutional Readiness Assessment on Gender Responsif Policy Planning and Monitoring***". Penelitian ini dilaksanakan oleh Laboratorium Sosiologi, bekerjasama dengan Bappenas, dan didukung oleh *Women Study Project II – CIDA*

Mei 1995 – Juli 1997

Tim Peneliti dalam "***Pilot Project Komunitas Masyarakat yang Partisipatif***" kerjasama antara Laboratorium Sosiologi dengan Pemda DKI

January 1996-November 1997

Tim Peneliti dalam penelitian "***Family Planning and Women's Empowerment Challenges for the Indonesian Family***". Penelitian ini dilaksanakan oleh Kelompok Studi Wanita, bekerjasama dengan FAMILY HEALTH INTERNATIONAL.

May 1995

Tim Peneliti dalam penelitian "***Graduate skills and the Workplace : a Gender Analysis***". Penelitian ini dilaksanakan oleh Kelompok Studi Wanita, bekerjasama dengan Politeknik, Universitas Indonesia.

**Lain-lain:**

Juli – Oktober 1999

Anggota Komite Seleksi dalam ***Community Based Development Activities Dealing with Economic Crisis.***

## KATA PENGANTAR

Dunia Industri seringkali dituding sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan yang terjadi dimuka bumi ini. Tidak ada yang salah, karena pada kenyataannya memang banyak limbah serta hasil produksi yang memberikan efek negatif pada lingkungan. Namun saat ini telah cukup banyak industri yang berupaya mengurangi efek negatif tersebut. Semua ini adalah merupakan bentuk tanggung jawab industri terhadap lingkungan maupun masyarakat. Tesis ini berusaha untuk melihat bagaimana industri melakukan upaya-upaya penerapan tanggung jawab lingkungan tersebut, khususnya pada perusahaan trans nasional.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang atas Berkah dan Rahmat Nya lah tesis ini dapat terselesaikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang begitu besar bantuan dan dukungannya dalam penyelesaian tesis ini. Rasa terima kasih yang mendalam tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Retno Soetaryono SH, MSi. selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, masukan serta kemudahan dan juga kebaikan hati seorang ibu sehingga tesis ini dapat selesai pada waktunya.
2. Francisia SSE Seda, Ph.D. selaku Pembimbing II, yang telah begitu banyak memberikan bantuan, dukungan moril dan semangat bagi penulis serta masukan yang sangat berarti, dan kesabarannya yang luar biasa.
3. Bapak dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, MSi, atas semua perhatian dan jalan keluar yang diberikan pada saat penulis mengalami kesulitan.
4. Ibu Emi Abdullah, S.Pd, MSi dan Pak Udin yang telah sangat membantu sepanjang masa perkuliahan dan terutama di saat-saat terakhir yang sangat berarti bagi penulis.
5. Ibu Lusi Armyana, Bpk. Safei Jamhari dan Bapak Suilam, dari PT. RBI yang telah sangat membantu penulis dalam pengumpulan data yang dibutuhkan serta kesediaannya untuk diganggu manakala penulis membutuhkan.

6. Staf KLH yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan.
7. Rekan Eila Zakarya, yang telah memberikan jalan keluar bagi penulis. Bantuan yang sangat berarti tersebut lah yang memungkinkan tesis ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh rekan angkatan XIX lainnya, yang telah memberikan begitu banyak perhatian, bantuan apa saja dan kapan saja. Dukungan moril dan semangat yang tiada henti. Terima kasih untuk semuanya.
9. Semua rekan pengajar Program Sarjana Sosiologi yang memberikan banyak perhatian bagi selesainya studi penulis, serta permohonan maaf atas "terbengkalainya" beberapa pekerjaan di saat kritis penulis. Terima kasih khusus untuk Ibu Noeke Ratna Padmiandari, kehadirannya memberikan sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan penulis.
10. Suami dan keluarga yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan yang tiada terhingga, yang dengan ikhlas bersedia dikesampingkan untuk sementara.

Terakhir, penulis berharap hasil penelitian ini meskipun mungkin hanya sedikit, namun kiranya dapat memberikan sumbangan bagi khasanah pengetahuan di bidang Ilmu Lingkungan.

Jakarta, Januari 2004

**Penulis**





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>RINGKASAN</b> .....	xiv
<b>SUMMARY</b> .....	xviii
<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Hipotesis Kerja.....	15
1.5. Lingkup Penelitian.....	15
1.6. Manfaat Penelitian.....	16
1.7. Kerangka Berpikir.....	16
<b>2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b> .....	19
2.1. Peran dan Tanggungjawab Manusia di dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	19
2.2. Tanggung Jawab Lingkungan di dalam Undang-Undang.....	22
2.3. Program PROPER.....	26
2.4. Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Produksi Bersih.....	29
2.5. Teori <i>Ecological Modernization</i> dan Tanggung Jawab Lingkungan Dunia Usaha.....	35
2.5.1. Asumsi Dasar Teori <i>Ecological Modernization</i> .....	35
2.5.2. Teori <i>Ecological Modernization</i> .....	41
<b>3. METODE PENELITIAN</b> .....	51
3.1. Pendekatan Penelitian.....	51
3.2. Tipe Penelitian.....	52
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	52

3.4. Prosedur Pengumpulan Data.....	53
3.5. Analisis Data.....	55
3.6. Keterbatasan Penelitian.....	56
<b>4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
4.1. Gambaran Umum .....	59
4.2. PT Jababeka: Lokasi Pabrik Reckitt Benckiser Indonesia.....	63
4.3. Gambaran mengenai Bentuk Tanggung Jawab Lingkungan PT RBI.....	67
4.3.1. Manajemen Lingkungan.....	67
4.3.1.1. Kebijakan Lingkungan dan Sasaran.....	67
4.3.1.2. Penanggungjawab Lingkungan PT RBI.....	69
4.3.1.2.1. Kebijakan Penanggungjawab Lingkungan PT RBI.....	69
4.3.1.2.2. Organisasi Penanggungjawab Lingkungan PT RBI.....	73
4.3.1.3. Sosialisasi.....	76
4.3.1.4. Audit yang Dilakukan.....	78
4.3.1.5. Sertifikasi SML.....	81
4.3.2. Proses Produksi.....	82
4.3.2.1. Teknologi.....	82
4.3.2.2. Bahan Baku.....	83
4.3.2.3. Operasi Produksi.....	84
4.3.2.4. Penghematan Energi Listrik dan Air.....	85
4.3.2.5. Pengolahan Limbah.....	85
4.3.2.6. Daur Ulang ( <i>Recycling</i> ).....	86
4.4. Upaya-upaya Perusahaan Induk dalam Kepedulian terhadap Lingkungan.....	86
4.5. Pembahasan Hasil temuan.....	91
4.5.1. Tanggungjawab Lingkungan PT RBI dari Segi Kepatuhan Lingkungan.....	91
4.5.2. Tanggungjawab Lingkungan PT RBI dari Segi Peroses Produksi.....	94
4.5.3. Tanggungjawab Lingkungan PT RBI dari Segi Manajemen Lingkungan.....	98
4.6. Analisis Tanggung Jawab Lingkungan PT. RBI .....	101
4.7. Implikasi Teoritis <i>Ecological Modernization</i> dan Kebijakan.....	107
<b>5. KESIMPULAN.....</b>	<b>113</b>
5.1 Kesimpulan.....	113
5.2 Saran.....	116
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>	
Tabel	1	Persentase Sumbangan Sektor terhadap Produk Domestik Bruto Tahun 2000 .....	2
	2	Produksi Semen dan Emisi CO <sub>2</sub> (ton) .....	4
	3	Perhatian pada Lingkungan Reckitt Benckiser plc.....	61
	4	Bentuk-bentuk Sosialisasi bagi Karyawan PT RBI .....	77
	5	Jenis Audit yang Dilaksanakan PT RBI .....	81
	6	Hal-hal yang Dilakukan di dalam Operasi Produksi .....	85
	7	Tanggung Jawab Lingkungan PT RBI dalam Proses Produksi..	98
	8	Tanggung Jawab Lingkungan PT RBI dalam Manajemen Lingkungan .....	100

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Kerangka Berpikir .....	18
2 Lingkungan Hidup Manusia yang Terdiri dari Ekosistem, Lingkungan Hidup Buatan dan Lingkungan Hidup Sosial .....	21
3 PROPER dan Instrumen Penataan lainnya.....	27
4 <i>Water Treatment</i> PT Jababeka .....	64
5 <i>Waste Water Treatment</i> PT. Jababeka .....	65
6 Struktur Organisasi HSE Division .....	74
7 Struktur Manajemen Lingkungan Group .....	88

## DAFTAR SINGKATAN



<b>CPKB</b>	: Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik
<b>GDP</b>	: Gross Domestic Product
<b>GMP</b>	: Good Manufacturing Practice
<b>GNP</b>	: Gross National Product
<b>GRK</b>	: Gas Rumah Kaca
<b>HSE</b>	: Health, Safety and Environment
<b>IPAL</b>	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
<b>NSB</b>	: Negara Sedang Berkembang
<b>P2K3</b>	: Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
<b>PT. RBI</b>	: Perusahaan Terbatas Reckitt Benckiser Indonesia
<b>QA</b>	: Quality Assurance
<b>R &amp; D</b>	: Reasearch and Development
<b>UNEP</b>	: United Nation Environment Programme
<b>WCED</b>	: The World Commission on Environment and Development

## RINGKASAN

Program Studi Ilmu Lingkungan  
Program Pascasarjana Universitas Indonesia  
Tesis, Januari 2004

- A. Nama : Shanty Novriaty
- B. Judul Tesis : BENTUK PENERAPAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN DUNIA USAHA  
(Studi Kasus pada Sebuah Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Kawasan Industri Jababeka - Cikarang)
- C. Jumlah Halaman : xx + 120; Ilustrasi: 8 Tabel, 7 Gambar, 5 Lampiran
- D. Isi Ringkasasan :

Sejalan dengan berkembangnya sektor industri di banyak negara sedang berkembang pada dekade 30 tahun terakhir, perkembangan industri di Indonesia pada kurun waktu tersebut pun mengalami peningkatan yang mengesankan. Kontribusi industri terutama industri manufaktur dalam kenaikan GDP dan GNP Indonesia juga meningkat dengan pesatnya. Akan tetapi peningkatan GDP dan GNP tersebut sebenarnya tidaklah akurat untuk mengukur pembangunan Indonesia. Hal ini disebabkan GDP dan GNP mengesampingkan biaya-biaya eksternal yang harus ditanggung oleh masyarakat, serta kerusakan lingkungan, deplesi sumberdaya alam dan kualitas kesehatan masyarakat.

Kondisi ini tentu saja menimbulkan masalah, karena kerusakan yang terjadi telah menempatkan lingkungan dalam kondisi yang sangat kritis. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Meadow dan kawan-kawan, kondisi bumi akan hancur sebelum tahun 2100 karena kerusakan yang ada telah melampaui ambang batas kemampuan bumi untuk menanggungnya. Solusi berupa deindustrialisasi yang dikemukakan oleh beberapa pakar sebenarnya mengandung risiko yang sama besarnya dengan melanjutkan pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, industrialisasi bagi sebagian kalangan masih tetap dibutuhkan.

Namun, untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut, upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembangunan dalam hal ini industrialisasi

dengan cara-cara yang lebih baik sehingga memperkecil –bila tidak dapat meniadakan- dampak buruknya terhadap lingkungan. Biaya-biaya eksternal tidak dapat lagi dibiarkan menjadi tanggungan masyarakat. Dunia usaha harus mengambil tanggung jawab untuk memperhatikan masalah lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya.

Akan tetapi, mengingat selama ini perusahaan dijalankan dengan cara "*business as usual*", maka cukup banyak pendapat yang meragukan akan adanya keinginan perusahaan untuk menerapkan konsep tanggung jawab lingkungan dunia usaha ini. Di lain pihak tidak kalah banyak juga yang percaya bahwa perusahaan mau menjalankan tanggung jawab ini. Hal ini disebabkan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan pada akhirnya bukan hanya memberikan manfaat pada lingkungan serta masyarakat, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Bentuk-bentuk pelaksanaan produksi yang lebih bersih (*Cleaner Production*) bermuara pada pengurangan biaya-biaya produksi (*eco-efficiency*) sehingga memberi nilai tambah pada bisnis mereka. Oleh sebab itu cukup banyak industri yang kini mengedepankan kepedulian pada lingkungan.

Upaya ini tidak serta merta mendapat sambutan yang positif. Cukup banyak kalangan yang menganggap bahwa hal itu hanya sebagai "*greenwash*" dan semata-mata dilakukan untuk *public relations* dan bahkan disinformasi citra perusahaan. Perusahaan-perusahaan Multi dan Trans Nasional adalah yang paling mendapat kecaman mengenai hal ini karena dianggap telah memainkan praktek standar ganda di negara-negara berkembang. Ada perbedaan kepedulian lingkungan antara perusahaan yang berada di negara asalnya dengan cabang pabrik yang ada di negara berkembang. Berdasarkan permasalahan inilah penelitian ini dibuat yaitu dengan **tujuan penelitian** pertama menggambarkan bentuk penerapan tanggung jawab lingkungan salah satu perusahaan Trans Nasional di Indonesia dan kedua menggambarkan kesamaan dan perbedaan antara apa yang telah dilakukan oleh perusahaan induk dengan apa yang diterapkan di Indonesia. **Hipotesis kerja** penelitian ini adalah pertama, dalam skala tertentu, ada bentuk tanggung jawab lingkungan yang diberikan oleh perusahaan trans nasional. Kedua, ada cukup banyak kesamaan antara apa yang dilakukan oleh perusahaan induk dengan cabang yang ada di Indonesia.

Untuk memahami bentuk penerapan tanggung jawab ini, peneliti melihatnya dari perundang-undangan yang ada di bidang lingkungan. Kepatuhan terhadap perundang-undangan merupakan hal yang paling mendasar dari bentuk tanggung jawab lingkungan dunia usaha. Lebih lanjut lagi, apabila kepatuhan telah dilakukan, maka upaya lain yang dilakukan adalah melaksanakan cara-cara berproduksi yang lebih bersih (*Cleaner Production*) dan membuat suatu manajemen lingkungan.

Salah satu teori yang mempunyai pengaruh besar di dalam cara pandang hubungan antara industri dan lingkungan adalah teori *Ecological Modernization*. Teori inilah yang menjelaskan bahwa sebenarnya adanya

industri tidak selalu harus bertentangan dengan lingkungan. Industri dapat sejalan dengan lingkungannya melalui perbaikan di bidang teknologi sehingga proses produksi dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik. Dalam perkembangannya, teori ini juga menekankan pada transformasi manajerial dan institusional. Pada akhirnya, berdasarkan semua landasan tersebut, maka bentuk penerapan tanggung jawab dunia usaha dapat dilihat.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian *Case Study* dan dengan menggunakan metode pengumpulan data pengamatan, wawancara mendalam, penggunaan dokumen dan *visual image* untuk dianalisis. Sebagai Studi Kasus diambil PT. RBI yaitu suatu industri perbekalan kesehatan rumah tangga yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka.

Dari pembahasan hasil temuan diperoleh bahwa PT. RBI telah melakukan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang mengatur pengolahan limbah, karena perusahaan ini berada di kawasan industri yang mempunyai kebijakan cukup ketat di dalam pengolahan limbah cair yang dihasilkan oleh industri yang ada di dalamnya. Lebih jauh lagi, sebagai bagian dari kebijakan perusahaan induk, maka perusahaan ini telah pula menjalankan *cleaner production* dalam tingkatan tertentu. Namun, berbeda dengan perusahaan induk, PT. RBI belum memiliki kebijakan lingkungan serta sasaran dan target lingkungan.

Dari apa yang dihasilkan dalam temuan dan pembahasannya maka dapat disimpulkan bahwa memang benar, PT. RBI telah menjalankan tanggung jawab lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan pengolahan limbah cairnya. Selain itu hipotesis kedua ternyata terdapat sedikit perbedaan antara apa yang telah dijalankan oleh perusahaan induk dengan apa yang dilaksanakan PT. RBI. Akan tetapi, perbedaan ini tidak sampai pada perusakan lingkungan, karena hal prinsip berupa perhatian pada efek negatif proses produksi tetap menjadi fokus utama PT. RBI.

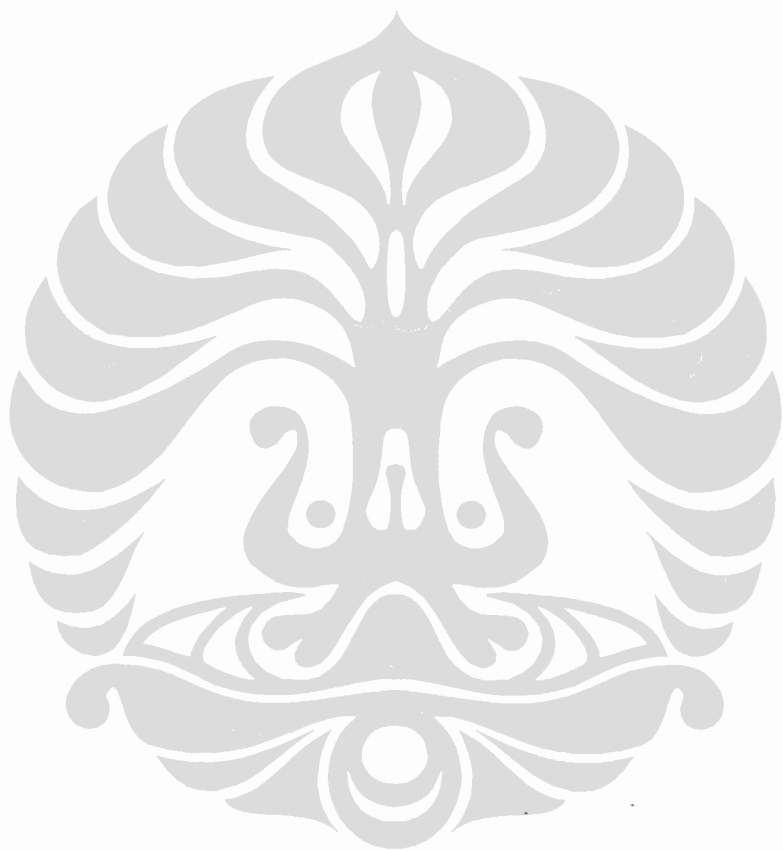
Dengan melihat bagaimana perusahaan trans nasional ini beroperasi, maka tampaknya apa yang dikemukakan oleh teori *ecological modernization* bahwa industri dapat berjalan bersama dengan lingkungan memang cukup relevan. Perubahan-perubahan cara memproduksi yang dilakukan oleh perusahaan induk (yang diterapkan pula oleh PT. RBI) memperlihatkan bahwa pada perbaikan teknologi dan manajerial memang mampu mendorong kearah pengurangan dampak negatif proses produksi terhadap lingkungan.

Mengenai transformasi institusional, saat ini memang pemerintah telah membuat instrumen insentif dan disinsentif untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (Program PROPER). Akan tetapi berbeda dengan apa yang dikemukakan dalam teori ini, salah satu tujuan dan sasarannya adalah justru meningkatkan penataan terhadap regulasi yang ada. Hal ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan, mengingat



kondisi di Indonesia masih sangat membutuhkannya. Dengan demikian, pengurangan *command and control* dan peran tradisional negara seperti yang ditawarkan teori ini belum saatnya untuk dilakukan.

E. Daftar Kepustakaan : 50 (1982-2003)



## SUMMARY

Study Programme of Environmental Science  
Postgraduate Programme of University of Indonesia  
Thesis, January 2004

- A. Name : Shanty Novriaty
- B. Title of Thesis : IMPLEMENTATION OF CORPORATE ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY  
(Case Study on A Household Cleaning and Health Product Manufacturer in Jababeka Industrial Estate-Cikarang)
- C. Number of Pages : xx + 120; Ilustration: 8 Tables, 7 Figures, 5 Appendices
- D. Summary:

In line with the growth of the industrial sector in many developing nations in the last three decades, the industrial sector in Indonesia in the period showed an impressive growth. Contribution of the sector, especially manufacturing industries, to the national GDP and GNP also showed a significant increase. However, the increasing GDP and GNP were not accurate measurements of Indonesian development. GDP and GNP calculations put no regard to the external costs which must be borne by the public, and environmental damage, depletion of resources and lower quality of public health.

This condition certainly causes serious problems, since the existing damage has resulted in a critical condition of the environment. According to Meadow et al., the earth will be inhabitable before 2100, because the damages done has surpassed the ability of the earth to sustain. Proposed solutions such as deindustrialization have similar risks compared to continuing development itself. For many, industrialization seems to be the only possible alternative.

Thus, in order to solve environmental problems, development attempts, especially industrialization, must be done in a better way to eliminate – at least minimize – negative impacts towards the environment. External costs must not be borne by the public. The business sector must assume the responsibility to solve environmental problems caused by its actions.

However, as most businesses are currently being operated 'business as usual,' many are at least distrustful of the commitment of the businesses to apply the concept of corporate environmental responsibility. On the other hand, many believe that businesses will be responsible, as implementation of environmental responsibility will not only benefit the environment and the public, but also the business itself. Cleaner production will result in lower production costs (eco-efficiency), giving value to their products. Thus, many businesses now begin to pay attention to environmental issues.

However, these attempts are not immediately responded positively. Many regarded that these attempts are merely "greenwash," public relations moves or even disinformation regarding the image of the company. Multi- and trans-national companies are the ones with the harshest criticism, since they are regarded to use double standards in developing countries. There are differences between the practices of environmental responsibility of multinationals and transnationals in their home countries and in the developing countries.

This study is based on this problem. The study intends to describe the implementation of environmental responsibility in a trans-national corporation operating in Indonesia, and also to describe similarities and differences of the implementation of environmental responsibility between the holding company and the Indonesian operation. The working hypotheses of the study are: first, in a certain scale, trans-national companies have some kind of environmental responsibility. Second, there are similarities between the holding company and the Indonesian operation.

In order to understand the implementation of environmental responsibility, the researcher will analyze the issue with the framework of environmental legislations. Observance to legislations is the most basic responsibility among the environmental responsibilities. Other responsibilities include cleaner production methods and a sort of environmental management.

An influential theory regarding the relations of industry and the environment is the ecological modernization theory. The theory explains that industries are not always polar opposites of the environment. The industries can be compatible with the environment through technological advances allowing better production methods. In its development, the theory also gives attention to managerial and institutional transformation. In the end, those are indicators with which implementation of environmental responsibility can be measured.

The research was performed with the case study method, and data is collected with observations, in-depth interviews, document study and visual imaging. The case study was performed to PT. RBI, a manufacturer of household cleaning and health product located in the Jababeka industrial estate - Cikarang.

The analysis found that PT. RBI has fulfilled its responsibilities regarding observance of legislations regulating disposal of waste, as the company is located in an industrial estate with tight regulations regarding liquid waste water disposal of the industries located within the area. Furthermore, as part of the holding company's policy, the company has also applied cleaner production in a certain scale. However, unlike the holding company, PT RBI has yet to have an environmental policy and environmental goals and targets.

Thus, a conclusion can be deduced from the results of the study and the analysis, that PT. RBI has fulfilled their environmental responsibility, especially related to the disposal of liquid waste. The second working hypothesis was also found correct, as there are differences in the application of environmental responsibility of the holding company and in PT RBI. However, the difference was not significant, i.e. the Indonesian company's actions resulting in environmental damage. In principle, PT. RBI still focuses on the negative effects of the production process.

With regard to the case study of the operations of a trans-national corporation, it seems that what is proposed by the ecological modernization theory remains relevant, that is industries can compatible with the environment. Changes in production methods in the holding company (which is also applied by PT. RBI) show that technological and managerial advances are indeed capable of reducing negative effects of the production processes towards the environment. In regard to institutional transformation, the government has created incentive and disincentive instruments to improve corporate performance in environmental management (PROPER program). However, unlike what the theory proposes, the intention is to increase the effectivity of existing regulations. This is necessary since the condition in Indonesia still requires regulations. Thus, reduction of command and control and the traditional roles of the state is not yet possible.

E. Number of Reference : 50 (1982-2003)

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan berkembangnya sektor industri di banyak negara sedang berkembang (NSB) pada 30 tahun terakhir, perkembangan industri di Indonesia pada kurun waktu 1970 hingga akhir tahun 1990-an pun mengalami peningkatan yang cukup besar, dengan pertumbuhan yang juga cukup mengesankan. Seperti dikemukakan dalam Agenda 21 Indonesia (1997: 206), pertumbuhan sektor industri Indonesia pada dekade lalu sangat impresif, yaitu melebihi 10% pada tahun-tahun terakhir. Dalam periode 1985-1995, sektor industri memberikan peningkatan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto dalam jumlah yang cukup besar yaitu dari 27% menjadi 40% dalam kurun waktu tersebut (Nazech, 2001: 1).

Dari seluruh sektor industri, peningkatan sektor manufaktur memperlihatkan peningkatan yang tinggi. Seperti dikemukakan oleh Rizal Ramli yaitu bahwa sektor manufaktur merupakan sektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan paling tinggi. Bahkan, sektor ini dijadikan indikator yang lebih lazim untuk menjelaskan perbedaan tingkat industrialisasi antar negara yaitu dengan melihat besarnya sumbangan sektor manufaktur terhadap PDB (Ramli, 1982: 26).

Pada tahun 2000, sumbangan yang diberikan oleh sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 26.04%. Angka ini merupakan sumbangan terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sebagai pembandingan, dapat

dilihat tabel berikut yang memberikan gambaran mengenai besarnya sumbangan 9 sektor ekonomi yang cukup penting terhadap produk domestik bruto.

**Tabel 1.** Persentase Sumbangan Sektor terhadap Produk Domestik Bruto Tahun 2000

No.	Sektor	Persentase
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	16.92
2.	Pertambangan	12.91
3.	<b>Industri Manufaktur</b>	<b>26.04</b>
4.	Listrik, Gas, Air	1.17
5.	Konstruksi	7.14
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	15.19
7.	Transportasi dan komunikasi	5.00
8.	Jasa keuangan	6.20
9.	Jasa lainnya	9.43
	TOTAL PDB	100

Sumber: Unido, Kantor Jakarta (Nazech, 2001: 1).

Selain itu, kontribusi sektor manufaktur juga terlihat di dalam pertumbuhan ekspor, yaitu yang semula hanya 7.5% pada dekade 1970, berkembang menjadi 47% pada dekade 1980 (Agenda 21 Indonesia, 1997: 206). Tingginya pertumbuhan di sektor ekspor manufaktur ini, telah terbukti merupakan bagian yang penting dari keberhasilan industrialisasi di negara berkembang manapun (Hughes, 1992: 8-10).

Peningkatan GDP ataupun GNP bagi para developmentalis merupakan tolok ukur bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Padahal seperti diketahui cukup banyak kelemahan-kelemahan bila menjadikan GDP dan GNP sebagai tolok ukur kemajuan apalagi pembangunan suatu negara. Salah satunya adalah seperti yang dikemukakan oleh Ismawan. Ia mengemukakan bahwa kedua tolok ukur tersebut tidak sanggup mencerminkan secara akurat tingkat pertumbuhan ekonomi secara apa adanya. Menurutnya, perhitungan GNP dan GDP selalu

mengesampingkan biaya eksternalitas, biaya sosial, dan biaya masa depan. Faktor kerusakan lingkungan, deplesi sumberdaya alam, dan degradasi kualitas kesehatan diabaikan (Ismawan, 1999:7). Sejalan dengan itu, Emil Salim mengemukakan bahwa:

"Karena lingkungan hidup "luput" dari perhitungan harga dan biaya pembangunan, maka luput pula ia dalam perhitungan Produk Nasional. Apabila kemudian pembangunan mengejar peningkatan Produk Nasional, maka akibatnya terhadap lingkungan hidup juga tidak masuk dalam perhitungan" (Salim, 1986:21).

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh didirikannya suatu industri di suatu lokasi, seringkali menimbulkan malapetaka yang besar bagi masyarakat setempat. Pengalihan fungsi lahan yang semula merupakan lahan produktif masyarakat ataupun lahan pelindung menjadi lokasi industri, seringkali memberikan dampak berupa kerusakan lahan, kekeringan di musim panas, dan banjir yang tidak terelakkan di musim hujan.

Selain kerusakan lahan, polusi/pencemaran udara maupun air yang dihasilkan oleh sektor industri juga telah berada pada kondisi yang sangat mencemaskan, padahal udara dan air merupakan dua hal penting dalam kehidupan manusia. Polusi menurut Odum adalah perubahan yang tidak diinginkan pada udara, daratan dan air secara fisik, kimiawi atau pun biologi yang mungkin atau akan merupakan bahaya bagi kehidupan manusia atau jenis-jenis penting lainnya (Odum, 1996: 528). Cukup banyak bahan-bahan pencemar udara, dan terdapat pencemar utama yang berasal dari proses produksi industri. Pencemar udara yang utama (*major air pollutants*) tersebut adalah: golongan oksida karbon ( $\text{CO}$ ,  $\text{CO}_2$ ), oksida belerang ( $\text{SO}_2$ ,  $\text{SO}_3$ ), oksida nitrogen ( $\text{N}_2\text{O}$ ,  $\text{NO}$ ,  $\text{NO}_3$ ), senyawa hasil

reaksi foto kimia, partikel (asap, debu, asbestos, metal, minyak, garam sulfat), senyawa inorganik (asbestos, HF, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub>), hidrokarbon (CH<sub>4</sub>, C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>), unsur radio aktif (Tritium, Radon), energi panas (suhu), dan kebisingan (Soedomo, 2001: 6).

Inventarisasi yang dilakukan oleh BAPEDAL menyatakan bahwa di Jakarta emisi yang berasal dari sektor industri mencakup 15% dari total SPM, 16% dari total NO<sub>x</sub>, dan 63% dari total SO<sub>x</sub> yang masuk ke udara (Agenda 21 Indonesia, 1997: 207). Hal yang kurang lebih sama terjadi di Surabaya. Sektor industri di tempat ini memberikan sekitar 28%, 43%, dan 88% dalam urutan yang sama (Lubis dalam Agenda 21 Indonesia, 1997:207).

Salah satu contoh dari peningkatan polusi adalah dengan melihat laju pertumbuhan emisi Karbon dioksida yang dihasilkan dari industri. Menurut catatan World Bank penambahan tersebut adalah sebesar 9.9% per tahun. Emisi yang dihasilkan dari proses produksi semen misalnya, memberikan sumbangan yang cukup besar yaitu 2,4% dari seluruh emisi yang berasal dari kegiatan produksi. Tabel berikut ini menunjukkan besarnya emisi CO<sub>2</sub> dari produksi semen.

**Tabel 2.** Produksi semen dan Emisi CO<sub>2</sub> (ton)

Tahun	Produksi	Emisi CO <sub>2</sub>
1978	3.050.000	1.520.425
1984	12.310.000	6.136.535
1990	17.200.000	8.574.200
1996	25.879.000	22.282.950
2001	53.595.000	26.717.108
2011	77.517.000	38.642.225

Faktor Emisi CO<sub>2</sub> = 0.4985

Sumber: Agenda 21 Indonesia, 1997: 237



Emisi CO<sub>2</sub> merupakan salah satu emisi terpenting yang mendapat perhatian baik secara nasional maupun global. Hal ini disebabkan karena peningkatan emisi CO<sub>2</sub> merupakan sumber utama meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca –GRK (*Green House Gases*). Sedangkan gas-gas lain yaitu CO, N<sub>2</sub>O, dan CH<sub>4</sub> memberikan kontribusi yang jauh lebih kecil terhadap Gas Rumah Kaca dibandingkan CO<sub>2</sub>. Dampak penambahan konsentrasi GRK dapat menimbulkan efek pemanasan bumi, yang berpengaruh baik secara regional maupun global.

Selain pencemaran udara, pencemaran air juga terjadi akibat dibuangnya limbah produksi (baik limbah padat maupun limbah cair) ke badan air, tanpa melalui *treatment* yang membuat sisa buangan layak untuk dialirkan ke badan air. Sebenarnya, dibuangnya limbah rumah tangga baik cair maupun padat ke badan air pun merusak kualitas air. Dari segi persentase, limbah rumah tangga yang dibuang lebih besar dibandingkan limbah industri. Akan tetapi dilihat dari segi bahan-bahan yang dikeluarkan, tampaknya limbah industri cenderung lebih sering mengeluarkan bahan berbahaya dan beracun.

Hal ini disebabkan karena sifat pencemar air dapat dibedakan menjadi limbah yang dengan mudah dapat diasimilasi oleh alam atau lingkungan (*fund pollutant*) dan limbah yang sulit diasimilasi oleh alam (*stock pollutant*) (Suparmoko & Suparmoko, 2000: 48). Limbah-limbah yang berasal dari rumah tangga umumnya termasuk dalam jenis limbah yang bersifat mudah diasimilasi, seperti limbah organik yang dapat diurai oleh bakteri di dalam aliran air, deterjen yang mengandung nitrogen dan fosfor yang merupakan gizi makanan bagi tanaman air seperti rumput dan ganggang, serta organisme seperti bakteri dan virus.

Adapun limbah industri umumnya merupakan jenis pencemar yang sulit diasimilasi oleh alam seperti bahan-bahan kimia anorganik dan mineral yang pasti akan terakumulasi dalam lingkungan. Aliran air atau sumberdaya air tidak akan mampu membersihkan dirinya dari pencemar jenis ini, terutama untuk bahan-bahan mineral seperti timah hitam, cadmium, dan merkuri (Suparmoko & Suparmoko, 2000: 50).

Contoh pencemaran air yang cukup parah yaitu di Teluk Jakarta, dan di Pantai Semprotan Kali Baru misalnya, lebih mirip sosok kolam minyak menghitam. Airnya berwarna pekat dengan bau yang menyengat menusuk hidung. Sumber polusi Pantai Semprotan adalah tumpukan kardus berisi ampas minyak yang diletakkan begitu saja di sekitar pantai. Selain itu sumber polusi lainnya adalah limbah pabrik di kawasan Marunda (Kompas, 21 Agustus, 2000: 17).

Kondisi lingkungan yang rusak, baik karena pencemaran udara ataupun air, dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia. Seperti dikatakan dalam Agenda 21 Indonesia, secara empiris pengukuran-pengukuran pencemaran di Jakarta menunjukkan kecenderungan peningkatan. Hasil pemantauan kadar SPM (*Suspended Particulate Matter*), selama tahun 1990/1991 menunjukkan bahwa angka rata-rata tertinggi terdapat di lokasi pemantauan adalah sebesar 577,31 mg/m<sup>3</sup>. Angka ini melampaui standar yang diperkenankan yaitu 260 mg/m<sup>3</sup>. Penduduk perkotaan diperkirakan memiliki risiko dampak pencemaran sebesar 8 sampai dengan 12 kali dibanding penduduk perdesaan (Achmadi, 1992, dalam Agenda 21 Indonesia, 1997: 113). Penelitian yang dilakukan oleh Achmadi ini lebih lanjut menunjukkan bahwa kadar Pb dalam darah penduduk kota adalah

sebesar 0,065 mg/100cc darah. Hal ini menimbulkan dampak yang cukup besar bagi perekonomian yaitu berupa penurunan produktivitas, hilangnya jam kerja serta biaya-biaya lain yang tidak diperlukan (Agenda 21 Indonesia, 1997: 113).

## **I.2. Perumusan Permasalahan**

Tingkat pencemaran yang parah akan semakin meningkat dengan adanya kenaikan produksi dan industri. Hal ini menurut Ismawan (1999:10), akan meningkatkan biaya eksternalitas. Eksternalitas merupakan terminologi yang mengacu kepada sejumlah implikasi yang ditimbulkan oleh proses produksi terhadap kerusakan lingkungan. Biaya ini adalah biaya yang bersifat tersamar dan tidak termasuk di dalam struktur biaya produksi yang dipakai oleh institusi.

Pencemaran dalam ekonomi lingkungan dianalisis sebagai eksternalitas (Suparmoko & Suparmoko, 2000:29). Menurutnya, "Eksternalitas adalah setiap dampak terhadap tingkat kesejahteraan pihak ketiga yang timbul karena tindakan seseorang tanpa dipungut kompensasi atau pembayaran". Contoh yang paling mudah untuk menggambarkan eksternalitas ini adalah bila industri mengeluarkan limbah cair ke badan air sungai, yang kemudian mengganggu kualitas air tersebut sehingga mematikan ikan-ikan sungai yang biasanya menjadi sumber mata pencaharian penduduk setempat. Dengan matinya ikan-ikan tersebut, maka penduduk akan kehilangan mata pencaharian mereka. Kerugian yang harus ditanggung oleh penduduk inilah yang disebut dengan biaya eksternal.

Biaya-biaya eksternal seperti ini menempatkan industri dalam posisi yang sangat nyaman, karena tidak menanggung efek atau akibat dari kegiatannya. Limbah dibuang secara gratis ke alam yang sebenarnya juga merupakan sumberdaya bagi industri itu sendiri. Dapat dibayangkan apa yang terjadi pada alam yang suatu saat akan tidak sanggup lagi menanggung beban yang diberikan oleh industrialisasi. Sebagai akibatnya, bukan hanya bumi yang akan menderita, akan tetapi semua makhluk didalamnya pun akan turut merasakan akibatnya. Dengan menggunakan teka-teki tradisional Perancis yang biasanya diajarkan kepada siswa-siswa di sekolah, Lester R. Brown (Ismawan, 1999:135) menyatakan bahwa bumi saat ini telah berada pada hari ke 29. Teka-teki matematis tersebut berkisar tentang kolam yang berisi teratai. Kolam itu berisi sehelai daun teratai di hari pertama, kemudian daun teratai tersebut bertambah dua kali lipat setiap harinya. Jika kolam tersebut penuh pada hari ke 30, pada hari keberapakah kolam tersebut berisi separuhnya? Jawabannya adalah hari ke 29. Kerusakan bumi yang sudah cukup parah dewasa ini, menurut Brown menempatkan generasi saat ini pada hari ke 29. Tanpa disadari, pada generasi berikutnya, bumi telah penuh dengan limbah, kerusakan, dan habis. Sumber-sumber energi yang dikuras dengan sangat ambisius membuat generasi mendatang tidak bisa mendapatkannya lagi karena telah habis dieksploitasi.

Kekhawatiran yang sama juga dinyatakan oleh Meadow dan kawan-kawan, berdasarkan teknik prediksinya. Dalam tulisannya yang berjudul *Limits to Growth*, Meadow dan kawan-kawan mengadopsi teknik untuk membuat prediksi mengenai konsekuensi dari melanjutkan pertumbuhan industrialisasi. Teknik prediksi ini ditemukan oleh Jay Forrester dan ahli teknologi serta sistem analisis

lainnya dari MIT (*Massachusetts Institute of Technology*), yang mengembangkan teknik modeling dengan komputer. Teknik ini mampu menganalisis variabel-variabel kompleks yang sangat berkaitan dan memproyeksikan berbagai skenario perubahan. Dengan menggunakan teknik ini, Meadow dan kawan-kawan melakukan ekstrapolasi dari pertumbuhan setiap faktor, sejak tahun 1900 hingga 1970. Ekstrapolasi dilakukan hingga tahun 2100. Hasil yang diperoleh adalah pada akhirnya bumi akan kolaps sebelum tahun 2100 (Martelli, 1994: 24-27).

Berbagai reaksi muncul menanggapi tulisan Meadow dan kawan-kawan. Sebagian menganggap bahwa banyak kekurangan dari apa yang telah dilakukan Meadow. Menurut Ismawan (1999: 15), bagi kaum environmentalis dan penganut aliran neo-Mathusian, reaksi terhadap ancaman datangnya ambang batas pertumbuhan adalah dengan cara memperlemah dorongan ke arah pertumbuhan. Reaksi ini memang bernuansa pesimisme.

Memperlemah pertumbuhan atau dengan kata lain melakukan deindustrialisasi yang berarti pula tidak melakukan pembangunan (dari segi ekonomi), menurut Emil Salim juga mengandung risiko. Tidak melakukan pembangunan (*zero growth*) juga mengandung risiko terganggunya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan seperti halnya melakukan pembangunan itu sendiri. Bila tidak melakukan pembangunan, penduduk pun tetap terus bertambah. Tidak adanya pembangunan, membuat kemiskinan akan semakin bertambah. Hal ini membawa pada keterbelakangan pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan pangan. Kekurangan dalam kebutuhan pokok tersebut mendorong manusia mencari pemecahan sehingga pada akhirnya akan merusak lingkungan pula.

Dengan demikian, pembangunan tetap harus dilaksanakan untuk mengimbangi keterbelakangan (Salim, 1986: 28). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ismawan (1999: 15):

"Akan tetapi, pesimisme ini, setidaknya menurut Jahoda (1975: p.211), adalah kurang beralasan. Jahoda mencoba memasukkan variabel kemampuan adaptif dan daya kreasi manusia untuk mengatasi sinyal-sinyal sebelum datangnya ambang batas pertumbuhan, sehingga mampu menyikapinya dengan baik. Inilah yang mendasari ide 'keharusan untuk tumbuh' (*growth imperative*). Alasan utamanya, milyaran jiwa umat manusia di muka bumi ini masih hidup dibawah garis kemiskinan. Mereka menikmati konsumsi secara subsisten dengan kualitas dan kuantitas yang sangat memprihatinkan. Mereka jelas membutuhkan pertumbuhan produksi,..."

Pada saat ini, hampir semua negara tidak dapat melepaskan diri dari industrialisasi, dan pada saat industrialisasi dihentikan, maka akibat-akibat yang sama buruknya akan terjadi, maka yang perlu dilakukan dengan sangat segera adalah mencari cara agar kegiatan industri dapat dilakukan dengan mengurangi dampak buruknya bagi lingkungan.

Hal ini sebenarnya telah lama menjadi pemikiran internasional. Sejak konferensi pertama PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada tahun 1972, serta sidang-sidang umum PBB sebelumnya, pemikiran tentang perlunya melakukan tindakan guna menanggulangi kepenurunan kualitas lingkungan hidup telah menjadi gagasan yang terus dikembangkan. Gagasan-gagasan dan pemikiran yang kemudian menjadi sangat berpengaruh karena memuat cukup banyak rekomendasi khusus untuk perubahan institusional dan hukum dalam rangka mengatasi masalah lingkungan adalah hasil kerja dari komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan (*The World Commission on Environment and Development—WCED*) yang tertuang dalam laporannya pada tahun 1987 yang

diberi judul *Our Common Future* (Hari Depan Kita Bersama) (Hardjasoemantri, 2000: 6-15). Laporan ini juga dikenal dengan laporan Brundtland yaitu mengambil nama dari ketua komisi, Gro Harlem Brundtland.

Dalam salah satu bagiannya yaitu tentang industri, laporan tersebut mengemukakan bahwa:

"Industri menempati posisi sentral dalam ekonomi masyarakat modern dan merupakan motor penggerak yang tidak tergantikan bagi pertumbuhan. Bagi negara-negara berkembang, industri sangat esensial untuk memperluas landasan pembangunan dan memenuhi kebutuhan yang terus meningkat" (WCED, 1988: 282).

Namun untuk dapat mengatasi masalah lingkungan ini, maka industri tidak dapat lagi berjalan apa adanya dan mengeluarkan limbah yang merusak lingkungan serta mengeluarkan biaya-biaya eksternal pada masyarakat. Industri perlu melakukan perubahan-perubahan dalam cara-cara berproduksinya sehingga mengurangi risikonya bagi lingkungan dan masyarakat. Untuk ini, industri mempunyai tanggung jawab untuk memikirkan efek dari kegiatannya mulai dari awal proses hingga akhir produksi, bahkan pasca produksi. Industri juga perlu memasukkan biaya-biaya tersebut ke dalam struktur biaya Internal perusahaan sehingga efek dari kegiatan produksi tersebut tidak lagi menjadi beban lingkungan dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan ekonomi dapat terus berlanjut dan bumi tidak habis/hancur sebagaimana yang diprediksi oleh Meadow dan kawan-kawan.

Akan tetapi mengingat selama ini perusahaan dijalankan secara "*business as usual*", maka cukup banyak pendapat yang meragukan akan adanya keinginan

perusahaan untuk menerapkan konsep tanggung jawab perusahaan ini. Brown (1993: 391-392) misalnya, mengemukakan bahwa: "Dari semua sumber perlawanan terhadap Revolusi Lingkungan Hidup, tidak ada yang lebih besar dari yang berasal dari ruang sidang dewan direksi perusahaan". Hal ini menurutnya, disebabkan karena perusahaan telah terbiasa mengadakan internalisasi keuntungan dan mengadakan eksternalisasi biaya dengan menyerahkan biaya kerusakan dan gangguan lingkungan hidup kepada masyarakat. Perusahaan, masih menurut Brown, enggan melakukan pembaruan secara besar-besaran. Ia menilai bahwa perusahaan yang baru didirikan, mungkin akan melakukan hal ini, akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi perusahaan lama yang konservatif.

Selain mereka yang tidak terlalu yakin bahwa perusahaan mau menjalankan tanggung jawab ini, terdapat pula orang-orang yang yakin bahwa akan cukup banyak perusahaan yang mau melakukannya mengingat selain upaya tersebut memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat, hal ini juga memberikan manfaat bagi mereka sendiri. Cannon, adalah salah satu diantaranya. Dalam bukunya *Tanggung Jawab Perusahaan (Corporate Responsibility)* (1995: 199-200), ia mengemukakan bahwa banyak perusahaan yang akan menyesuaikan perilaku mereka agar dapat mengurangi dampak dari kegiatan mereka pada lingkungan dan masyarakat. Bahkan beberapa perusahaan memperkenalkan "Pentingnya Hijau" dalam misi mereka. Selain itu menurutnya, perusahaan mungkin dapat bekerjasama dengan departemen yang ada di pemerintahan atau dengan kelompok penekan untuk dapat melaksanakan Audit ataupun Analisis Dampak Lingkungan. Perusahaan-perusahaan lain mungkin menegaskan sikap positif mereka terhadap lingkungan sebagai unsur kunci untuk keberhasilan



pemasaran mereka. Ada pula perusahaan yang melihat bahwa melakukan pengurangan limbah melalui daur ulang akan mengurangi biaya dan meningkatkan nilai tambah pada bisnis mereka.

Namun pemberian label hijau atau pun upaya-upaya lain dunia industri untuk mengedepankan masalah lingkungan, juga cukup banyak mendapat tanggapan dari mereka yang pesimis bahwa dunia usaha atau industri mau melakukannya untuk lingkungan. Mereka menganggap bahwa apa yang dinyatakan sebagai "peduli lingkungan" oleh industri, hanyalah kamufase hijau yang tujuannya semata-mata untuk membuat citra baik bagi perusahaan tersebut, dan bukan merupakan kesungguhan yang mendalam untuk tujuan lingkungan dan masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Utting, kritik yang dikemukakan oleh mereka yang pesimis ini adalah bahwa upaya penghijauan dunia usaha ini hanyalah sebagai "*greenwash*" (Utting, 2002: 5). Kritik seperti ini misalnya dikemukakan oleh Greer dan Bruno yang melihat esensi dari upaya tersebut hanyalah merupakan sebuah *public relations* atau bahkan disinformasi yang berusaha memberikan citra adanya kepedulian perusahaan kepada lingkungan sedangkan dalam faktanya masih terus melakukan kerusakan yang serius pada lingkungan (Greer dan Bruno: 1999).

Perusahaan Multi atau Trans Nasional merupakan yang paling banyak mendapat kecaman dalam hal ini, terutama mereka yang memiliki cabang di negara-negara berkembang. Sonny Keraf misalnya, mengemukakan bahwa: "Ada standar ganda yang tidak fair dan licik yang dimainkan oleh negara-negara maju beserta perusahaan-perusahaan multinasionalnya" (Keraf, 2002: 232). Lebih lanjut ia

mengemukakan bahwa standar ganda tersebut sangat merugikan kepentingan lingkungan hidup. Di negara asalnya sendiri, perusahaan tersebut menjalankan standar pengelolaan lingkungan secara sangat serius, sementara di negara berkembang dapat dengan mudah mengabaikan semua standar pengelolaan lingkungan hidup (Keraf, 2002: 240). Seperti juga dikemukakan oleh Bryant & Bailey, yaitu bahwa relatif kurangnya kontrol polusi di negara ketiga, serta bergabung dengan hal-hal lain seperti buruh yang murah, maka sejak tahun 1960 banyak perusahaan Trans Nasional yang merelokasikan kegiatan usahanya di dunia ketiga (Bryant & Bailey, 1997: 57).

Dengan melihat perdebatan yang ada tersebut, maka amat menarik untuk melihat bagaimana perusahaan-perusahaan besar terutama perusahaan trans nasional menjalankan atau menerapkan bentuk tanggung jawab lingkungannya serta benarkah bahwa terjadi perbedaan standar pelaksanaan produksi dari apa yang dilakukan oleh negara induk dengan yang beroperasi di negara berkembang.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Menggambarkan bentuk penerapan tanggung jawab lingkungan salah satu perusahaan trans nasional di Indonesia.
2. Menggambarkan kesamaan dan perbedaan antara apa yang telah dilakukan oleh perusahaan induk dengan apa yang diterapkan di Indonesia.

#### **1.4. Hipotesis Kerja**

1. Dalam skala tertentu, ada bentuk tanggung jawab lingkungan yang diberikan oleh perusahaan trans nasional.
2. Ada cukup banyak kesamaan antara apa yang dilakukan oleh perusahaan induk dengan cabang yang ada di Indonesia.

#### **1.5. Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan trans nasional yang ada di Indonesia. Perusahaan yang diambil adalah perusahaan yang berada di dalam sektor industri manufaktur, mengingat sektor ini cukup banyak memberikan sumbangan pada produk domestik bruto Indonesia. Dari industri manufaktur tersebut, akan diambil salah satu industri yang berkaitan dengan kepentingan rumah tangga atau yang termasuk di dalam kategori industri perlengkapan rumah tangga. Diambilnya industri ini salah satunya adalah karena dalam melakukan kegiatannya, industri ini menggunakan material yang termasuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun (B3), sehingga menarik untuk dilihat bagaimana atau upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir (atau mungkin bahkan meniadakan dampak negatif terhadap lingkungan akibat proses produksi).

## **1.6. Manfaat Penelitian**

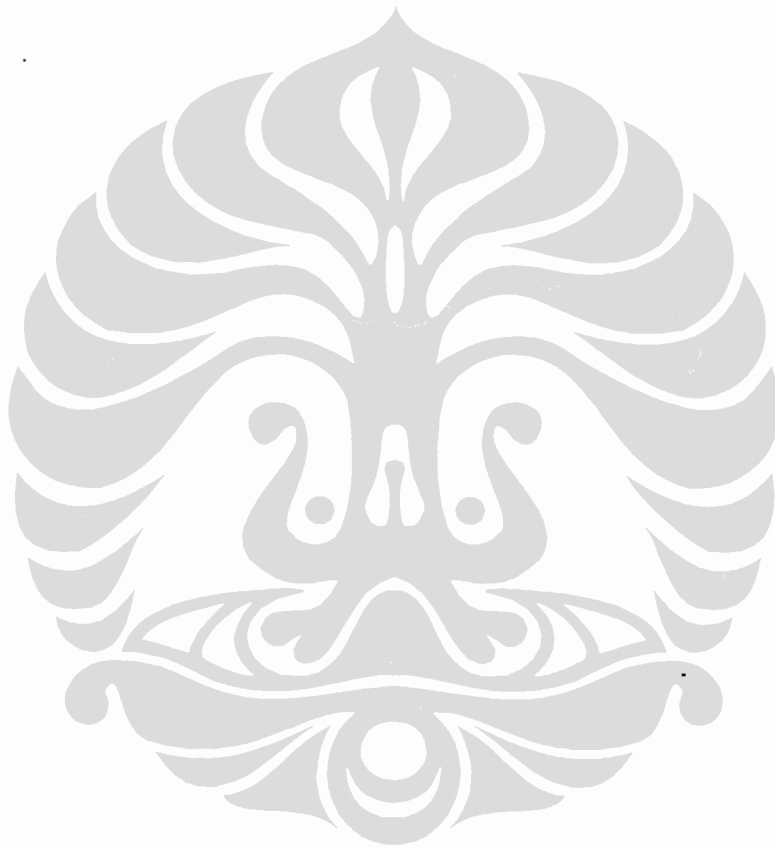
Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi :

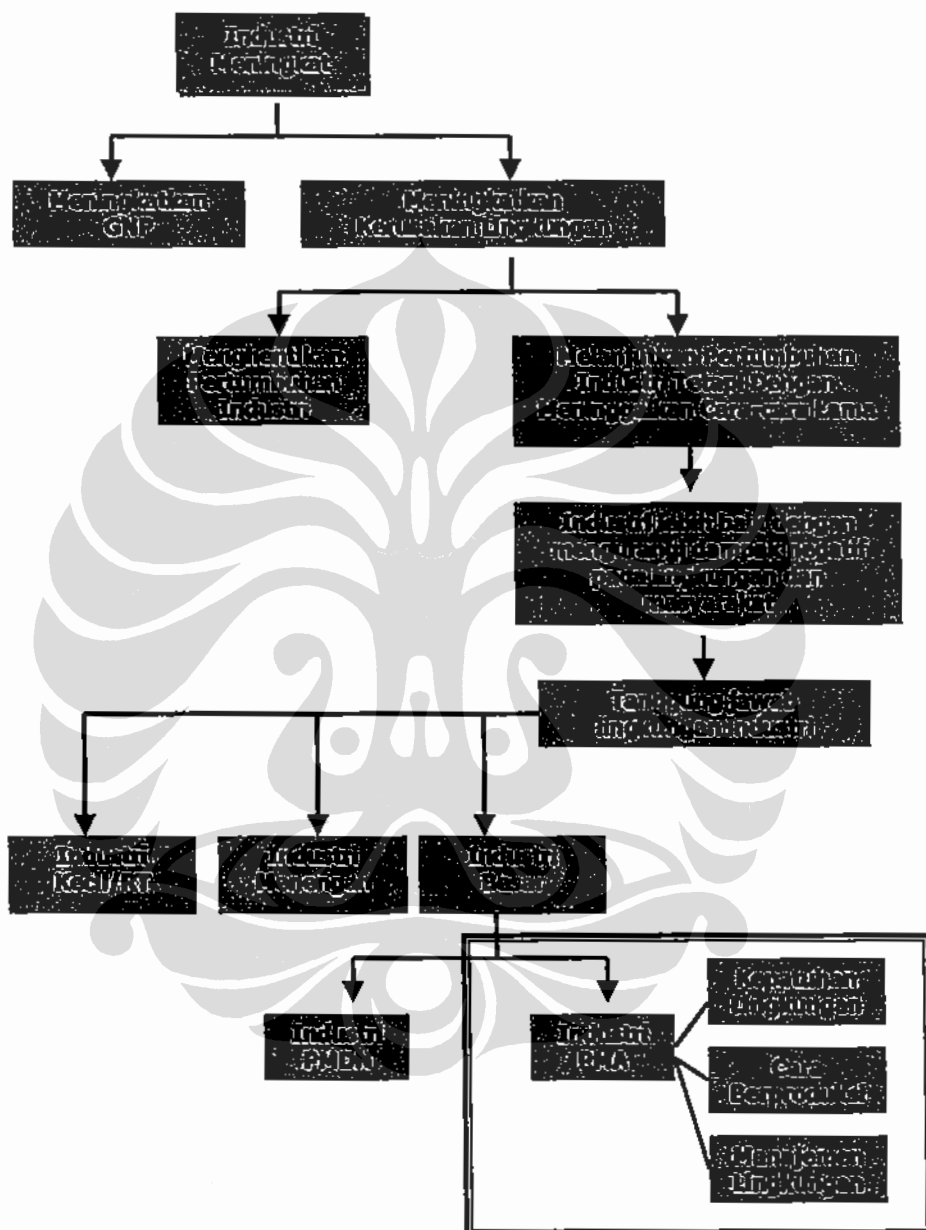
1. **Akademis:** hasil penelitian ini diharapkan akan menambah khasanah pengetahuan di bidang ekonomi lingkungan terutama yang berkaitan dengan penerapan dari Tanggung Jawab Lingkungan di Industri Manufaktur.
2. **Pemerintah:** hasil ini dapat bermanfaat untuk mengetahui kondisi perusahaan dalam kaitannya dengan permasalahan lingkungan sehingga diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumusan bentuk-bentuk kebijakan yang berkaitan dengan upaya pemerintah memberikan suasana yang kondusif bagi industri untuk dapat melaksanakan Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan ini.

## **1.7. Kerangka Berpikir**

Keseluruhan alur pemikiran dari tesis ini dimulai dengan melihat bahwa pada saat ini industrialisasi sudah merupakan hal yang tak terelakkan lagi, karena sumbangannya yang sangat besar pada Produk Domestik Bruto atau nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Meski pun demikian, dibalik cukup banyaknya keuntungan yang diakibatkan pertumbuhan industri ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kerusakan lingkungan pun merupakan suatu akibat yang mengikuti pertumbuhan tersebut. Ada dua cara dalam memandang dampak negatif industri terhadap lingkungan ini. Satu cara menganggap bahwa industrialisasi (sebagai akar masalah kerusakan lingkungan) harus dihentikan pertumbuhannya dan cara

lain yaitu tetap melakukan pertumbuhan industri, namun dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik sehingga dapat mengurangi dampak negatifnya pada lingkungan. Hal ini menuntut tanggung jawab dari industri untuk melakukan perubahan dalam hal berproduksi serta membuat manajemen lingkungan yang baik. Untuk lebih lengkap, alur pemikiran tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini.





**Gambar 1.** Kerangka Berpikir

## **2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

### **2.1. Peran dan Tanggung Jawab Manusia di dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Segala permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini pada dasarnya adalah merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh adanya saling hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Di dalam Ekologi, dijelaskan bahwa kehidupan merupakan suatu ekosistem atau sistem ekologi yaitu suatu satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup (dari berbagai jenis), dengan berbagai benda mati yang berinteraksi membentuk suatu sistem (Soerjani et.al, 1987: 3). Karena berada di dalam suatu sistem --yaitu dimana komponen-komponennya bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan (Soemarwoto, 2001:23), maka perubahan pada salah bagian atau komponennya tentu saja akan mempengaruhi bagian lainnya. Manusia --sebagai makhluk hidup-- adalah yang mempunyai peranan terbesar di dalam melakukan perubahan di dalam sistem tersebut.

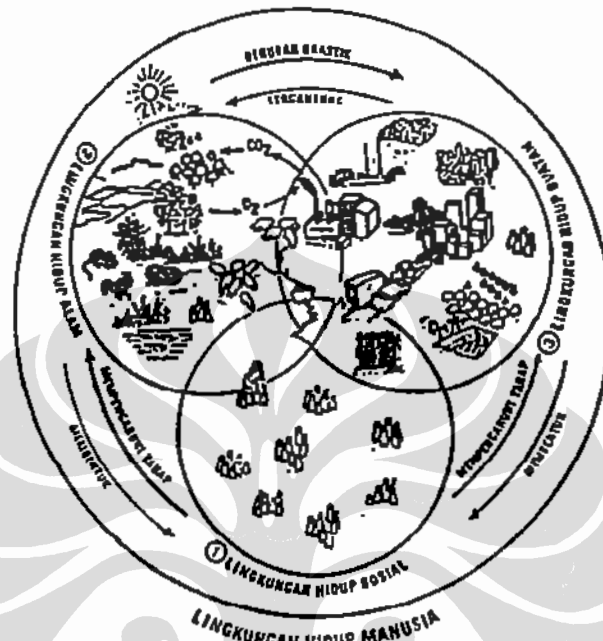
Sebenarnya, perubahan itu sendiri dapat terjadi karena faktor-faktor alam dan faktor manusia. Akan tetapi, faktor alam ini bukanlah faktor yang dominan dalam menentukan perubahan, karena perubahan yang terjadi karena faktor alam tidak secara intensif dan terus menerus, sehingga sistem tersebut mempunyai kesempatan untuk kembali kedalam keseimbangannya. Berbeda halnya dengan perubahan yang dilakukan oleh manusia yaitu dimana manusia secara terus

menerus melakukan perubahan sehingga tidak ada kesempatan bagi sistem tersebut untuk melakukan keseimbangan kembali.

Seperti dikemukakan oleh Soerjani (1997:8), suatu ekosistem dapat disebut sebagai lingkungan hidup alami (*natural environment* atau *natural living environment*), dan tetap disebut sebagai alami selama manusia yang terdapat di dalamnya tidak bersikap dan berperilaku mendominasi lingkungan hidup atau ekosistem dimana dia berada. Hal ini dapat diberlakukan pada ekosistem dimana manusia tidak banyak menimbulkan perubahan di dalam ekosistem tersebut.

Lingkungan hidup manusia menurut Soerjani, terdiri atas lingkungan hidup alam, lingkungan hidup buatan atau binaan manusia, serta lingkungan hidup sosial. Lingkungan hidup alam atau ekosistem terdiri atas lingkungan hidup fisik (sekumpulan pengada ragawi = abiotika) dan lingkungan hidup hayati (sekumpulan/komunitas pengada insani = biota). Ada pun lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang ada sebagai penerapan dari ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Lingkungan hidup sosial adalah masyarakat manusia yang mempunyai kesamaan kepentingan pokok untuk mempertahankan eksistensi manusia serta untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, lingkungan hidup sosial harus didasari pranata kelembagaan baik pemerintah, swasta, organisasi lingkungan (termasuk LSM) dan masyarakat secara umum yang tertib, beraturan dan diwarnai kesepakatan serta kemitraan sosial yang kokoh. (Soerjani, 1997: 9-14). Secara keseluruhan, lingkungan hidup manusia itu dapat digambarkan sebagai berikut:





**Gambar 2.** Lingkungan hidup manusia yang terdiri dari ekosistem, lingkungan hidup buatan dan lingkungan hidup sosial (Soerjani 1997:9 dari Soerjani 1989)

Di dalam memahami semua inilah kemudian berkembang ilmu lingkungan, dengan ekologi sebagai dasar. Bila ekologi mempelajari susunan dan fungsi seluruh makhluk hidup dan komponen kehidupan lainnya, maka Ilmu Lingkungan mempelajari tempat dan peranan manusia di antara makhluk hidup dan komponen kehidupan lainnya. Dengan demikian, Ilmu Lingkungan dapat dikatakan sebagai ekologi terapan (*applied ecology*), yakni bagaimana menerapkan berbagai prinsip dan ketentuan ekologi itu dalam kehidupan manusia, atau ilmu yang mempelajari bagaimana manusia harus menempatkan dirinya di dalam ekosistem atau dalam lingkungan hidupnya (Soerjani, 1987: 3).

Dengan demikian, di dalam ilmu lingkungan, peranan dan tanggung jawab manusia di dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan hal sangat pokok. Di dalam Undang-undang No. 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 6, disebutkan bahwa "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup". Bila setiap orang memiliki tanggung jawab di dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka tentu saja dunia usaha pun memiliki kewajiban yang sama, terlebih lagi mengingat di dalam kegiatan usahanya tersebut berbagai efek negatif yang terhadap lingkungan mungkin terjadi. Dengan demikian, dari sini dapat didefinisikan bahwa Tanggung Jawab Lingkungan Dunia Usaha adalah : Segala upaya yang dilakukan oleh Dunia Usaha untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai akibat dari adanya usaha dan atau kegiatannya itu.

## **2.2. Tanggung Jawab Lingkungan Dunia Usaha di dalam Undang-Undang**

Pemerintah sebenarnya melalui Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dengan cukup tegas mengatur mengenai upaya untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai akibat dari adanya suatu usaha dan atau kegiatan. Seperti dijelaskan di dalam BAB V mengenai Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, pada pasal 14 ayat (1) dinyatakan: Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan

mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tamponnya diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal ini menunjukkan adanya tanggung jawab dunia usaha untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui ketaatan terhadap aturan-aturan baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bentuk tanggung jawab lingkungan lain dari dunia usaha yang juga tercakup di dalam Undang-undang No. 23 ini adalah kewajiban untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup (Pasal 15 ayat (1) dan (2)). Sedangkan di dalam pasal 16 dikemukakan adanya kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan atau kegiatan. Pengelolaan limbah ini pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain. Lebih lanjut pada Pasal 17 ayat (1) dikemukakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Selain hal-hal yang diwajibkan, di dalam Undang-undang No. 23 ini juga mengatur mengenai audit lingkungan hidup, yang sebenarnya hanyalah bersifat sukarela, dimana pemerintah hanya mendorong pelaksanaan audit tersebut, akan tetapi untuk kasus tertentu yaitu apabila terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan yang ada, maka Menteri dapat membuat audit ini menjadi wajib. Lebih lengkapnya, dijelaskan pada Pasal 28 yaitu "Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup. Pasal 29 ayat (1)

menjelaskan "Menteri berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini". Sedangkan pada ayat (2) disebutkan "Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selain ketentuan di dalam Pasal 28 dan 29 tersebut, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan menjelaskan lebih lanjut mengenai pedoman umum pelaksanaan audit tersebut. Di dalam keputusan tersebut ditetapkan pertama bahwa Audit Lingkungan merupakan suatu kegiatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh dan merupakan tanggung jawab pihak penanggung jawab usaha atau kegiatan. Dengan demikian, selain diwajibkan membuat AMDAL atau UKL/UPL, pemerintah juga menganjurkan atau mendorong dunia usaha untuk melakukan audit lingkungannya sendiri.

Pasal 15 hingga 17 yang telah dikemukakan di atas, memberikan garis besar mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh dunia usaha ketika menjalankan kegiatannya. Lebih lanjut, secara lebih terinci, undang-undang ini kemudian dijabarkan di dalam beragam peraturan pemerintah. Mengenai kewajiban untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) misalnya, tertuang di dalam satu peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, serta diikuti oleh kurang lebih 21 buah Keputusan Menteri yang mendukungnya (memberikan aturan lebih terinci). Di dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 ini pada Pasal 4 ayat

(1) dikemukakan bahwa "Usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun di dalam kawasan yang sudah dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup tidak diwajibkan membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup lagi. Akan tetapi, lebih lanjut di dalam ayat (2) dinyatakan pula bahwa:

"Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan".

Untuk Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dituangkan dalam kurang lebih 15 Peraturan baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau pun Keputusan kepala Bapedal. Begitu pula dengan Pengendalian terhadap pencemaran baik air maupun udara. Dengan demikian, apabila dunia usaha melakukan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan, sebenarnya telah melakukan salah satu bentuk tanggung jawab lingkungannya.

Perundang-undangan yang mengatur pentingnya dunia industri untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup, juga diberikan di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang PERINDUSTRIAN. Di dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa "Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan: ayat (4) Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengaman terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Sedangkan di dalam Bab VIII tentang Industri

dalam Hubungannya dengan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup lebih ditegaskan lagi bahwa:

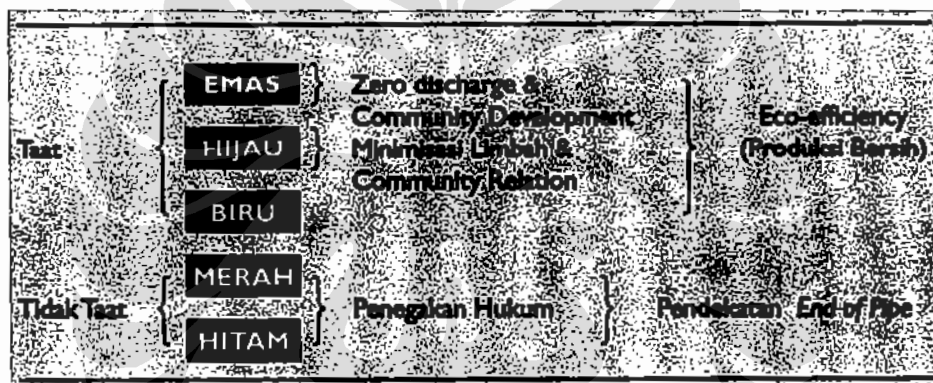
- (1) Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.
- (2) Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri.
- (3) Kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.

### **2.3. Program PROPER**

Selain melakukan pengaturan melalui perundang-undangan, pemerintah juga melakukan upaya lain yang mendorong kepatuhan lingkungan dunia usaha. Upaya tersebut saat ini dinamakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan atau biasa disingkat dengan PROPER. Seperti dijelaskan di dalam booklet yang berisi gambaran rinci tentang program ini, dinyatakan bahwa prinsip dasar pelaksanaan PROPER adalah mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrumen insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan instrumen disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang memiliki kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk.

Dengan demikian, pelaksanaan PROPER harus dilakukan bersama dengan instrumen penataan lainnya seperti instrumen ekonomi dan instrumen penegakan hukum. Contoh yang dapat diberikan misalnya, pemberian

penghargaan untuk perusahaan yang berperingkat Emas dan Hijau agar menjadi contoh pengelolaan lingkungan yang baik bagi perusahaan lainnya, dan didorong untuk melakukan produksi bersih. Sedangkan bagi perusahaan yang memperoleh peringkat hitam perlu diikuti dengan upaya penegakan hukum, untuk perusahaan berperingkat merah perlu dilakukan pembinaan dan diberikan waktu untuk melakukan perbaikan sebelum diikuti dengan upaya penegakan hukum.



**Gambar 3.** PROPER dan Instrumen Penataan lainnya

Sebenarnya, PROPER telah dilaksanakan oleh KLH sejak tahun 1995 dengan nama PROPER PROKASIH. Akan tetapi, program ini belum mencerminkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh karena hanya melihat kinerja di dalam pengendalian pencemaran air. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja penataan pengelolaan lingkungan yang komprehensif, maka penilaian kinerja perlu diarahkan pada kinerja pengelolaan lingkungan yang meliputi: air limbah, emisi udara, dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Semua kegiatan perusahaan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan wajib diikutsertakan dalam PROPER. Namun karena terbatasnya sumberdaya yang ada dan untuk efektifitas pelaksanaan PROPER maka PROPER dilakukan secara bertahap dengan kriteria tertentu yaitu mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, mempunyai dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan sangat besar, berpotensi mencemari dan merusak lingkungan, terdaftar pada pasar modal baik di dalam mau pun di luar negeri dan berorientasi ekspor. Jenis-jenis industri yang diprioritaskan tersebut adalah: Untuk sektor Manufaktur, Prasarana dan Jasa (MPJ) adalah: Pulp dan Kertas, Tekstil, Semen, Pupuk, Otomotif, Peleburan Besi dan Baja, MSG, Alkohol, Industri Kimia Dasar dan Pengolah Limbah Kawasan Industri. Untuk sektor Pertambangan Energi dan Migas adalah: Pertambangan Mineral, Pertambangan Batubara, Pembangkit Energi, Pengolahan Minyak dan Gas, Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas. Sedangkan untuk Pertanian dan Kehutanan adalah: Pengolahan Kelapa Sawit, Pabrik Gula, Kayu lapis, Karet, Tapioka dan Hutan Tanaman Industri.

Pelaksanaan dari penentuan peserta ini adalah dimana KLH memberikan kriteria yang ditetapkan kepada daerah. Daerah kemudian mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya untuk diikutkan didalam penilaian ini berdasarkan kriteria tersebut. Perusahaan yang telah ditetapkan oleh daerah, wajib mengikuti penilaian ini. Pada tahun 2002, PROPER diikuti oleh 43 perusahaan dan pada tahun 2003 ini diikuti oleh 150 perusahaan yang terdiri dari 120 industri manufaktur dan 30 jasa hotel.



Dari keseluruhan apa yang dilakukan oleh PROPER ini, tujuannya selain mengurangi dampak negatif kegiatan perusahaan terhadap lingkungan, meningkatkan penataan dalam pengendalian dampak lingkungan, meningkatkan kesadaran para pelaku usaha/kegiatan untuk menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, meningkatkan komitmen *stakeholder* dalam upaya pelestarian lingkungan dan mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Ada pun sasarannya adalah: mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui instrument insentif dan disinsentif reputasi serta mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*Cleaner Production*).

#### **2.4. Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Produksi Bersih**

Pembangunan, dimana tonggak penopang utamanya diletakkan pada pertumbuhan industri tentunya diharapkan dapat terus berlangsung secara berkelanjutan. WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai: "*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*" (Pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (Hardjasoemantri, 2000: 15).

Pembangunan berwawasan lingkungan atau pola pembangunan dengan pengembangan lingkungan atau seperti diistilahkan oleh WCED yaitu

pembangunan yang berkelanjutan, inheren didalamnya pengetatan dalam penggunaan sumberdaya alam, pemanfaatan sumberdaya alam serasional mungkin serta mengupayakan pengeluaran limbah yang seminimal mungkin. Hal ini berarti penghematan dalam sumberdaya alam, serta mengurangi pencemaran sebagai hasil sisa produksi. Seperti dikemukakan oleh Djajadiningrat, "...pembangunan berkelanjutan memerlukan pergeseran yang berjangkauan jauh dalam sikap perusahaan dan cara baru dalam melaksanakan bisnis. Keberlanjutan mengharuskan produsen memperhatikan keseluruhan daur hidup produk..." (Djajadiningrat, 2000:20)

Dengan melakukan pengetatan atau penghematan terhadap sumberdaya alam serta penggunaan secara rasional maka limbah yang dihasilkan pun akan menurun. Hal ini berarti terjadi efisiensi dari segi ekonomi dan ekologi sehingga disebut sebagai eko-efisiensi. Berkaitan dengan hal ini, Djajadiningrat (2000: 20), mengemukakan bahwa:

"Perusahaan yang mencapai efisiensi yang lebih tinggi sambil sekaligus mencegah pencemaran melalui pengaturan manajemen yang baik, penggantian bahan, penerapan teknologi yang bersih dan pembuatan produk yang lebih bersih dan berusaha untuk dapat menggunakan dan memperoleh kembali sumberdaya dengan eko-efisiensi".

Lebih jauh ia mengemukakan bahwa dalam dekade mendatang, industri cenderung untuk melakukan penataan proses produksinya menuju sistem produksi yang nir limbah (*zero emission*). Konsep ini meniru ekosistem (tatanan lingkungan) yang tidak mengenal limbah, karena limbah dari satu unsur akan dimanfaatkan oleh unsur lainnya. Ini berarti, kegiatan industri yang menggunakan konsep *zero emission* merupakan kelompok industri (*cluster of*

*industries*) dimana limbah dari satu kegiatan industri akan dimanfaatkan sebagai input (*trough put*) oleh kegiatan industri lainnya dalam satu kesatuan (*cluster*). Oleh karena itu seluruh bahan baku akan dimanfaatkan secara menyeluruh dan efisiensi dapat ditingkatkan setinggi mungkin.

Sejalan dengan eko-efisiensi tersebut, maka dalam hal pengolahan limbah pun terjadi pergeseran paradigma pengolahan limbah yang berarti limbah yang semula diolah pada akhir produksi (*end of pipe*) menjadi paradigma minimisasi limbah yang bersifat pencegahan. Menurut Pudjiastuti (1999) definisi minimisasi limbah yang digunakan di Indonesia diberikan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) adalah sebagai berikut:

"Minimisasi limbah (*waste minimization*): adalah upaya mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan jalan reduksi pada sumbernya dan/atau pemanfaatan limbah. Dengan demikian upaya minimisasi limbah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu: reduksi pada sumbernya dan pemanfaatan limbah (Pudjiastuti, 1999: III-2).

Pudjiastuti (1999: III 2-7) memaparkan upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi limbah pada sumbernya dan pemanfaatan limbah. Upaya mengurangi limbah dilakukan pertama adalah dengan melakukan perubahan bahan baku. Perubahan ini dilakukan apabila bahan yang digunakan menimbulkan limbah yang berbahaya baik pada saat proses pembuatan atau pada daur hidup produknya. Oleh sebab itu, perlu dicari alternatif penggantinya yaitu dengan bahan baku yang tidak terlalu berbahaya, atau bahan baku yang berbahaya tersebut mengalami pemurnian terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai input.

Upaya kedua yang dilakukan untuk mengurangi limbah pada sumbernya adalah dengan melakukan kegiatan *housekeeping* yang baik. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan suatu program untuk mencegah kebocoran dan tambahan bahan, melakukan pemeriksaan peralatan secara terus menerus, serta menjalankan instruksi kerja yang ada dengan supervisi yang ketat. Selain itu perlu pula dilakukan modifikasi prosedur kerja, instruksi mesin dan pencatatan proses agar diperoleh efisiensi yang lebih tinggi.

Modifikasi terhadap peralatan merupakan upaya ketiga yang dapat dilakukan untuk mengurangi limbah pada sumbernya. Modifikasi ini misalnya dengan menambah piranti alat ukur dan alat pengendali proses, otomatisasi peralatan agar proses dapat berjalan dengan lebih efisien serta limbah yang dihasilkan menjadi lebih rendah serta mengurangi laju emisi yang dikeluarkan. Upaya lainnya (terakhir) yaitu dengan memodifikasi produk. Hal ini dilakukan dengan memodifikasi karakteristik produk sehingga dapat meminimalkan dampak pada lingkungan baik selama proses produksi atau pun sesudah digunakan (*disposal*).

Bagian kedua dari minimisasi limbah yaitu penggunaan kembali atau pemanfaatan limbah yang akan sangat membantu mengurangi jumlah limbah yang ada di lingkungan. Pemanfaatan limbah berarti memberikan nilai tambah pada limbah yang semula tidak mempunyai nilai ekonomi, menjadi bahan yang mempunyai nilai ekonomi. Hal ini dapat berlangsung baik di dalam pabrik yang bersangkutan (*on site*) mau pun di luar pabrik (*off-site*). Terdapat tiga hal dalam kegiatan pemanfaatan limbah ini. Hal pertama adalah melakukan daur ulang (*Recycle*), yang dapat dilakukan dengan perolehan kembali atau pun

penggunaan kembali, dan melalui pengolahan dihasilkan produk yang sama atau produk yang lain. Hal yang kedua yaitu dengan melakukan penggunaan kembali (*Reuse*) yaitu pemanfaatan limbah dengan jalan menggunakannya kembali untuk keperluan yang sama atau fungsinya sama, tanpa mengalami pengolahan atau perubahan bentuk. Hal ketiga yaitu dengan melakukan perolehan kembali (*Recovery*) yaitu pemanfaatan limbah dengan cara memprosesnya untuk memperoleh kembali salah satu atau lebih materi/komponen yang terkandung di dalamnya.

Penerapan pengetahuan penggunaan sumberdaya alam serta minimisasi limbah, merupakan suatu bentuk upaya perusahaan untuk menjaga agar dalam proses produksinya tidak membawa kerugian baik pada lingkungan maupun masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, hal ini menjadi tanggung jawab yang mesti diemban oleh perusahaan, meskipun untuk itu sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan untuk melakukannya atau mengaturnya sendiri.

Sebenarnya, perusahaan tidak perlu khawatir atau takut akan kehilangan sebagian dari laba yang biasa mereka peroleh. Karena, apabila mereka melakukan tanggung jawab tersebut, sebenarnya bukan hanya biaya eksternal yang harus menjadi biaya internal, akan tetapi akan banyak keuntungan lain yang diperoleh sehingga pada akhirnya secara keseluruhan akan menguntungkan mereka pula. Otto Soemarwoto mengidentifikasi keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan bila mereka melaksanakan salah satu bentuk dari tanggung jawab perusahaan tersebut yaitu penerapan produksi bersih. Keuntungan tersebut adalah:

1. Sebagai pedoman bagi perbaikan produk dan proses
2. Penghematan bahan baku dan energi yang sekaligus pengurangan ongkos produksi persatuan produk
3. Peningkatan daya saing melalui penggunaan teknologi baru dan/atau perbaikan teknologi.
4. Pengurangan kebutuhan bagi penataan baku mutu dan peraturan yang lebih banyak
5. perbaikan citra perusahaan di mata masyarakat
6. Pengurangan biaya secara meningkat sebagai alternatif solusi pengolahan ujung pipa (*end of pipe*) yang mahal (Soemarwoto, dalam Djajadiningrat, 1995: 30).

Dari dua gambaran di atas yaitu kepatuhan kepada hukum-hukum yang berlaku untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup serta bagian kedua berupa upaya sukarela dari dunia usaha untuk tidak hanya melakukan pencegahan pencemaran di akhir produksi, tetapi juga melakukan upaya-upaya perlindungan lingkungan sejak awal produksi (tertuang di dalam produksi bersih), maka dapat terlihat, bahwa bentuk tanggung jawab lingkungan dunia usaha dapat berupa tingkatan-tingkatan. Salah satu teori yang cukup berpengaruh di dalam pembuatan instrument-instrumen kebijakan untuk membuat dunia usaha dapat menjadi kompatibel dengan lingkungan sehingga kegiatan usahanya tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dikemukakan oleh teori *ecological modernization* di bawah ini.

## 2.5. Teori *Ecological Modernization* dan Tanggung Jawab Lingkungan Dunia Usaha

### 2.5.1. Asumsi Dasar Teori *Ecological Modernization*

Berbicara mengenai Tanggung Jawab Lingkungan dunia usaha (*Corporate Environmental Responsibility*) yang merupakan suatu upaya dari industri sendiri untuk mengurangi dampak dari proses produksinya, tidak dapat dilepaskan dari dari suatu teori yang pada saat ini cukup banyak dikenal yaitu Teori *Ecological Modernisation*. Teori ini merupakan teori sosial (sosiologi) yang relatif baru dalam melihat/memahami hubungan antara industri dengan lingkungan. Seperti dikemukakan oleh Utting, inisiatif dan intervensi yang diasosiasikan dengan penghijauan bisnis diasosiasikan dengan *Ecological Modernisation* (Dryzek, 1997; Dryzek and Schlosberg, 1998 sebagaimana dikutip oleh Utting, 2002: 2).

*Ecological Modernisation* muncul pada awal tahun 1980 an dengan Joseph Huber dianggap sebagai penemunya. Blower (1997: 852) mengemukakan bahwa teori *Ecological Modernisation* muncul pada tahun 1980 an sebagai hasil kerja dari seorang sosiolog Jerman yaitu Joseph Huber. Menurut Joseph Murphy (2001:2):

*"Ecological modernization theory emerged in the early 1980s, largely as a result of the work of Joseph Huber. During the late 1980s and early 1990s it was then discussed and developed by relatively small group of European environmental social scientists, particularly within politics and sociology"*

(Teori *Ecological Modernisation* muncul diawal tahun 1980 an sebagai hasil kerja Joseph Huber. Selama akhir 1980 an dan awal 1990 an teori ini telah didiskusikan dan dikembangkan oleh sekelompok kecil ilmuwan sosial lingkungan di Eropa, khususnya dalam bidang politik dan sosiologi).

Teori ini kemudian dianggap sebagai teori yang dapat memahami hubungan antara industri, lingkungan dan masyarakat. *"From the initial contribution*

*onwards, the aim of Ecological Modernisation Theory has been to analyse how contemporary industrialized societies deal with environmental crises'* (Dari awal kontribusinya hingga kini, tujuan dari teori Ecological Modernisation adalah menganalisa masyarakat industri kontemporer dalam menghadapi krisis lingkungan) (Mol & Sonnenfeld, 2000: 5).

Sebenarnya, hubungan antara industri dengan lingkungan dan masyarakat telah menjadi perhatian yang cukup serius dari ilmuwan sosial dalam 20 tahun terakhir. Berbagai teori dengan asumsi yang berbeda-beda telah muncul untuk menjelaskan hubungan-hubungan tersebut. Asumsi yang terdapat dalam Teori *Ecological Modernization* ini adalah bahwa permasalahan lingkungan dan masyarakat yang diakibatkan oleh industri dapat dikurangi, atau dicegah dengan melakukan inovasi teknologi dalam industri. Dengan cara ini, mereka yang menjadi pendukung teori ini menganggap bahwa hubungan antara industri dengan lingkungan dan masyarakat dapat terhindar dari hubungan yang disfungsional.

Asumsi lain, seperti yang dikemukakan oleh Hannigan (1995: 183) dengan melirik pada semangat dari laporan Brundtland, *Ecological Modernization*, mengindikasikan kemungkinan untuk mengatasi krisis lingkungan tanpa meninggalkan jalan modernisasi (Hannigan, 1995: 183).

Masih merupakan asumsi dari teori ini adalah muncul dari kepercayaan Huber bahwa perkembangan industri melalui fase-fase tertentu. Dalam skema yang dibuat Huber, masyarakat industri berkembang dalam tiga fase yaitu: (1) terobosan industri; (2) konstruksi masyarakat industri; (3) perubahan secara



ekologis dari sistem industrial melalui proses 'superindustrialisasi'. Hal yang memungkinkan munculnya fase terakhir adalah teknologi baru: inovasi dan difusi dari teknologi *microchip* (Hannigan, 1995: 183). Berkaitan dengan tahapan Huber ini, Murphy mengatakan bahwa dalam kerangka kerjanya, Huber mempromosikan bahwa masalah-masalah lingkungan akan dapat diatasi melalui superindustrialisasi. Hal ini berarti mengatasi masalah lingkungan melalui transformasi produksi dengan pengembangan dan aplikasi teknologi yang jauh lebih canggih (Murphy, 2001:2). Murphy, dengan mengutip Mol 1995 hal 37 menyatakan bahwa Huber menetapkan semangat dari *Ecological Modernisation* ketika ia mengatakan bahwa: ".....*the dirty and ugly industrial caterpillar will transform into a(n) ecological butterfly* ( Larva industri yang kotor dan buruk akan berubah menjadi kupu-kupu) (Murphy, 2001:2).

Asumsi teori ini yang didasarkan pada pentahapan dari sejarah industri juga dilihat oleh Utting (2002:2). Ia melihat bahwa sejarah kapitalisme industrial dapat dibagi dalam fase-fase yang berbeda yang masing-masing diasosiasikan dengan seperangkat inovasi institusi dan teknologi yang membawa pada dampak lingkungan yang berbeda. Bagi beberapa pengamat, kita saat ini berada di pertengahan transisi yang melibatkan perubahan dari '*mass production and consumption* kepada apa yang diistilahkan secara spekulatif sebagai '*total quality*' (Socolow, 1994: 20 sebagaimana dikutip oleh Utting, 2002:2), dimana perusahaan mengadopsi berbagai hal yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan.

Pada umumnya teori ini mengasumsikan bahwa institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial dapat menginternalisasikan kepedulian pada lingkungan. (Hajer, 1995:25 sebagaimana dikutip oleh Utting, 2002:2). Selain itu, menurut Murphy, teori ini tidak mengasumsikan adanya hubungan yang disfungsional antara masyarakat industri dan lingkungan (Murphy, 2001:4). Hal ini tentu saja bertentangan dengan teori lainnya yang lebih menekankan pada nilai-nilai intrinsik dari alam, atau posisi ekosentris seperti yang diasumsikan oleh *deep ecology*. Asumsi lain dari teori *Ecological Modernisation* yang bertentangan dengan aliran ini adalah bahwa komitmen teori ini pada perubahan terencana, rasional dan mengarah pada kemajuan dan sebagainya (Murphy, 2001: 7).

Dikemukakan oleh Mol dan Sonnenfeld (Murphy, 2001:4) bahwa *Ecological Modernization* memiliki 3 perspektif umum yaitu bahwa: pertama, *Ecological Modernization* bergerak melebihi argumen *apocalyptic* yang berkaitan dengan environmentalisme di masa lalu dan menjelaskan bahwa negara maju menghadapi persoalan lingkungan yang menantang dan bukan masalah lingkungan mendasar yang tidak dapat diselesaikan. Kedua, bahwa *Ecological Modernization* menekankan pada transformasi dari institusi utama dari modernitas. Terakhir, posisi intelektual dari *Ecological Modernization* adalah jelas berbeda dari posisi lainnya dalam wilayah teori sosial lingkungan—khususnya *Deep Ecology/Eco-Centrism*, *De-industrialisation/Small is Beautiful*, *Postmodernist/Strong Social Constructionist* dan *Neo Marxist* pendekatan anti kapitalis.

Menanggapi kritik-kritik yang diberikan oleh teori-teori sosial lingkungan lainnya, mereka yang mendukung teori *Ecological Modernisation* ini memberikan argumentasi sanggahan. Mereka menganggap bahwa argumentasi yang disampaikan oleh kritik-kritik tersebut adalah argumentasi yang sederhana yaitu bahwa teori *Ecological Modernization* hanya memfokuskan diri pada perubahan teknologi daripada perubahan institusional secara umum (Murphy, 2001: 7). Padahal lebih lanjut Murphy mengatakan bahwa sebenarnya dalam teori ini teknologi hanyalah salah satu cara dimana institusi-institusi dalam masyarakat industri maju dapat ditransformasikan.

Murphy sendiri melihat hal-hal yang masih sangat memerlukan perhatian dari para pendukung teori *Ecological Modernisation*. Menurutnya, teori ini lahir untuk menganalisis kondisi industri di negara maju yang telah memiliki seperangkat institusi tertentu, seperti dikemukakannya: "*Much of this work has examined the economic and environmental implication of trying to deal with environmental problems in advanced industrial societies.* (Kebanyakan dari apa yang telah dilakukan oleh teori ini adalah melihat implikasi lingkungan dan ekonomi dalam melihat masalah-masalah lingkungan di masyarakat industri maju)" (Murphy, 2001: 8).

Mengacu pada hal ini menurut Murphy, bagaimana pun terdapat 2 risiko yang jelas dari teori *Ecological Modernization* ini yaitu pertama adalah bahwa akademisi barat mengembangkan pendekatan dalam konteks barat yang kemudian mereka gunakan sebagai standar untuk menilai hubungan antara lingkungan dan masyarakat di negara sedang berkembang. Risiko kedua yaitu

diasosiasikan dan dikaitkan dengan penggunaan rekomendasi-rekomendasi tindakan ke negara-negara berkembang ini (Murphy, 2001:8).

Hal ini cukup disadari oleh Mol dan Sonnenfeld. Mereka mengemukakan bahwa adalah masih terlalu awai untuk memastikan kemampuan penerapan teori *Ecological Modernisation* ini bagi negara-negara yang berbeda ekonomi, budaya dan institusi politik serta lokasi dan geografisnya di berbagai belahan dunia. Namun dari berbagai tulisan yang dikumpulkan oleh Mol dan Sonnenfeld menunjukkan bahwa teori *Ecological Modernisation* adalah berguna bagi analisis ilmiah ilmu sosial dan pembentukan kebijakan, bahkan di negara yang berbeda. Seperti dikemukakannya: "*At the same time, some processes of ecological modernisation are global (even while others are not), and thus this body of theory remains at least partially relevant around the world.* (Pada saat yang sama, proses *Ecological Modernisation* adalah bersifat global (meskipun sebagian lagi tidak mengalaminya), dengan demikian teori ini tetap relevan di seluruh dunia, paling tidak sebagiannya)" (Mol & Sonnenfeld, 2000: 10).

Terlepas dari berbagai perdebatan yang ada mengenai teori ini, menurut Mol dan Sonnenfeld teori *Ecological Modernisation* merupakan suatu teori yang berharga dalam ilmu sosial kontemporer untuk menganalisa interaksi masyarakat dan lingkungan pada saat ini (Mol & Sonnenfeld, 2000).

### 2.5.2. Teori *Ecological Modernization*

Bila dikaji lebih jauh, sebenarnya apa yang menjadi kritik dari teori lain terhadap teori ini yaitu mengenai fokus pada teknologi, tidaklah terlalu berlebihan. Hal ini disebabkan karena pada awalnya teori ini memang menekankan pada teknologi. Benton mengemukakan: "*Strong element of 'technological determinism' characterizes the Ecological Modernization perspectives: technical 'fixes', it is assumed, can go a long way towards solving environmental problems* (Elemen yang kuat dari 'determinisme teknologi' merupakan ciri dari perspektif *Ecological Modernisation*: 'perbaikan' teknik diasumsikan, dapat memecahkan masalah lingkungan"(Utting, 2002:2).

Mol (Mol & Sonnenfeld, 2000: 4) mengemukakan bahwa teori *Ecological Modernisation* ini telah berkembang melalui serangkaian pertimbangan dan perdebatan. Paling tidak, menurutnya, terdapat 3 tahap dalam pengembangan dan pematangan pemikiran ini. Pada awal kontribusinya, khususnya Huber (di tahun 1982 dan 1985), dicirikan dengan penekanan yang kuat pada peranan inovasi teknologi dalam mereformasi lingkungan-khususnya pada produksi industri; kritik terhadap birokrasi negara; perhatiannya pada aktor pasar dan dinamikanya pada reformasi lingkungan; suatu sistem—teoritis dan lebih pada perspektif evolutioner dengan pemikiran yang terbatas pada manusia dan pergolakan sosial; dan orientasi ke arah analisis pada tingkat negara bangsa.

Pada periode kedua, yaitu dari akhir tahun 1980 hingga pertengahan tahun 1990, menunjukkan penekanan yang berkurang pada inovasi teknologi sebagai kunci penggerak dari *Ecological Modernisation*; perhatian yang lebih seimbang

antara respek terhadap peran pemerintah dan "pasar" dalam transformasi ekologis dan perhatian yang lebih pada dinamika institusional dan budaya dari *Ecological Modernisation*. Selama periode ini, pemikiran dalam *Ecological Modernisation* melakukan studi perbandingan dari produksi industri di berbagai negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*).

Periode terakhir yaitu sejak pertengahan tahun 1990, pendukung awal dari teori ini telah memperluas teoritik dan wilayah geografisnya untuk memasukkan studi mengenai transformasi ekologis dan konsumsi; *Ecological Modernisation* di negara-negara non Eropa (seperti di negara-negara industri baru, negara-negara kurang berkembang, transisi ekonomi di Eropa tengah dan tenggara seperti juga di negara-negara OECD seperti Amerika dan Kanada); serta proses-proses global.

Dengan melihat perkembangan dari pemikiran-pemikiran ini, Mol kemudian menekankan bahwa perbaikan yang perlu dilakukan bukan hanya perbaikan fisik semata atau dalam istilah Murphy bukan hanya inovasi teknologi belaka, akan tetapi lebih umum yaitu pada inovasi manajerial dan institusional. Sedangkan Mol sendiri lebih menyebutnya sebagai transformasi sosial dan institusional. Mol kemudian mengklasifikasikan transformasi-transformasi ini dalam 5 kelompok (Mol & Sonnenfeld. 2000: 6) yaitu:

1. Perubahan peran dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya dilihat dari peranan mereka sebagai pembuat masalah lingkungan, tetapi juga dinilai dari peranan aktual dan potensialnya untuk pemeliharaan dan pencegahan masalah lingkungan. Pilihan perbaikan dan penyelesaian tradisional digantikan oleh pendekatan

sosio-teknologis yang preventif yang melibatkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan sejak awal tahap perancangan teknologi dan inovasi organisasional. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dimarginalkan meskipun terdapat ketidakpastian terhadap definisi dan sebab-sebab serta solusi untuk masalah-masalah lingkungan.

2. Peningkatan yang penting dari dinamika pasar dan pelaku-pelaku ekonomi (seperti produser, pedagang, konsumen, institusi kredit, perusahaan asuransi dan sebagainya) sebagai pembawa restrukturisasi dan reformasi ekologis (sebagai tambahan pada kategori yang lebih konvensional dari negara dan gerakan sosial yang berlaku bagi hampir semua teori sosial mengenai lingkungan).
3. Transformasi dari peranan negara bangsa. Lebih desentralisasi, fleksibel serta tumbuhnya gaya konsensus dari pemerintah, dengan mengurangi *top-down*, pengaturan lingkungan secara nasional yang didasari pada *command and control* – seringkali diacu oleh modernisasi politik. Kesempatan yang lebih pada pelaku-pelaku non negara untuk mengasumsikan administratif tradisional, pengaturan, manajerial, perusahaan/korporasi dan fungsi-fungsi penengah dari negara bangsa, yang dirujuk oleh kebanyakan orang sebagai pengaturan sub-politis. Munculnya institusi supra nasional juga mengurangi peran tradisional negara bangsa dalam reformasi lingkungan.
4. Modifikasi pada posisi, peranan dan ideologi dari gerakan-gerakan sosial. Secara terus meningkat, gerakan-gerakan sosial dilibatkan dalam institusi-institusi pembuat keputusan publik maupun swasta berkaitan dengan

reformasi lingkungan, sebagai kotras dari terpinggirkannya mereka dalam proses-proses dan institusi-institusi tersebut di tahun 1970 dan 1980. Sejalan dengan itu, reformasi dari ideologi anti sistemik dan demodernisasi. Perubahan-perubahan ini, pada gilirannya, membawa pada perdebatan diantara organisasi-organisasi gerakan sosial berkaitan dengan strategi dan ideologi yang dualistik

5. Terakhir, praktek-praktek diskursif dan munculnya ideologi baru. Ketidakperdulian pada lingkungan dan pemisahan antara ekonomi dan lingkungan tidak lagi dapat diterima sebagai posisi yang dibenarkan. Solidaritas antar generasi dalam menghadapi dasar-dasar keberlanjutan telah muncul sebagai prinsip utama yang tidak terbantahkan.

Murphy (2001), membahas lebih mendalam mengenai inovasi teknologi, manajerial dan institusional. Berangkat dari pemahaman mengenai inovasi ia kemudian melihat perbedaan antara perubahan yang *incremental* dan *radical*. Menurutnya, inovasi yang *incremental* berkaitan dengan perbaikan yang bertahap dari proses-proses serta struktur organisasi yang telah ada. Ada pun inovasi *radical* melibatkan perubahan yang tidak terputus dan penggantian -- dalam cara segala sesuatu dilakukan. Perbedaan perubahan *incremental* dan *radical* hanya difokuskan dalam pemahaman mengenai bagaimana *Ecological Modernisation* diartikan dalam praktek. Meskipun demikian, ia menyarankan bahwa *Ecological Modernisation* dari produksi akan juga melibatkan *incremental* dan *radical* dalam hal inovasi teknologi, manajerial dan institusional. Akan tetapi, di dalam penelitian ini, tidak dimaksudkan untuk melihat transformasi



institusional secara keseluruhan seperti dikemukakan oleh Mol, melainkan hanya melihat pada industri dan peranan pemerintah saja.

Berkaitan dengan peranan pemerintah dalam reformasi lingkungan ini, Murphy mengutip apa yang dikemukakan oleh Mol yaitu:

"Teori *Ecological Modernisation* telah mengidentifikasi dua strategi untuk mengatasi kekuarangan dalam birokrasi negara yang tradisional dalam pembuatan keputusan mengenai lingkungan. Pertama yaitu bahwa transformasi kebijakan negara dari tindakan kuratif dan reaktif ke preventif adalah sangat diperlukan. Hal ini berarti perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi, dari kebijakan lingkungan yang "*over regulated*" ke kebijakan yang menciptakan kondisi dan konteks yang nyaman untuk praktek dan perilaku yang mengarah pada lingkungan. Negara akan memfokuskan pada pengendalian melalui mekanisme ekonomi dan mengubah strategi manajemennya dengan memperkenalkan kewajiban diri sendiri secara kolektif pada sektor ekonomi. Kedua, berkaitan dengan hal tersebut pilihan yang diberikan adalah meliputi peralihan tanggung jawab, insentif dan tugas-tugas dari negara ke "pasar". Hal ini akan meningkatkan dan mempercepat proses transformasi ekologis, utamanya karena "pasar" dipandang memiliki mekanisme yang lebih efisien dan efektif untuk mengkoordinasi dan mengatasi masalah lingkungan lebih daripada negara....ide utamanya adalah bukan mengesampingkan negara dalam manajemen lingkungan tetapi lebih pada transformasi dalam hubungan antara negara dan masyarakat serta memberikan titik berat atau tekanan yang berbeda pada peran pengendalian negara. Negara memberikan kondisi dan menstimulasi 'pengaturan diri sendiri ---*self regulation*' baik melalui mekanisme dan dinamika ekonomi atau melalui lingkup publik yaitu dalam kelompok-kelompok masyarakat, organisasi non pemerintah dalam bidang lingkungan dan organisasi konsumen" (Mol, 1995: 46-47, sebagaimana dikutip oleh Murphy, 2000: 15).

Dengan transformasi peran pengaturan negara seperti yang dikemukakan oleh Mol diatas, maka jelas pula bahwa untuk mengatasi masalah lingkungan, tanggung jawab lingkungan dari perusahaan (*Corporate environmental responsibility*) menjadi hal yang sangat berperan penting.

Seperti telah dikemukakan oleh Murphy bahwa dalam *Ecological Modernisation* tidak hanya melihat pada inovasi teknologi semata akan tetapi juga manajerial dan institusional. Dari segi manajerial, perkembangan atau inovasi terjadi dalam praktek bisnis yang dilakukan di negara-negara maju. Seperti dikemukakan oleh Utting:

"faktanya adalah banyaknya perusahaan (seperti mereka yang terlibat dalam *United Nation Global Compact*) dan asosiasi-asosiasi bisnis (seperti *World Business Council for Sustainable Development--WBCSD*), yang semula hanya menekankan pada eko-efisiensi, sekarang terlibat lebih aktif dengan issue *corporate social responsibility* (Holme and Watts, 2000, sebagaimana dikutip oleh Utting, 2002: 4).

Lebih jauh Utting mengemukakan bahwa banyak pengamat melihat bahwa dinamika tersebut relatif kuat di negara-negara dengan industrialisasi yang telah maju, dan diharapkan akan menyebar ke negara-negara yang sedang berkembang. Pada umumnya perusahaan-perusahaan besar di Utara mengambil posisi sebagai pemimpin dalam adopsi dan promosi inovasi teknologi dan manajerial. Utting mengutip Flaherty dan Rappaport, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan seperti ini mencari uniformitas yang lebih luas dalam proses, produksi dan standar produk dan mempertimbangkan keuntungan kompetitif yang diperoleh dari image perusahaan atau produk yang diasosiasikan dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan (Flaherty and Rappaport, 1997, sebagaimana dikutip oleh Utting, 2002: 5).

Dari gambaran mengenai teori *Ecological Modernisation* di atas, terlihat jelas bahwa pada akhirnya upaya mengatasi krisis atau masalah yang terjadi di lingkungan membawa pada upaya dari diri perusahaan sendiri untuk melakukan

transformasi dalam bidang teknologi dan manajerial, yang mana hal ini terlihat dari tanggung jawab lingkungan perusahaan (*Corporate Environmental Responsibility*). Dalam bidang teknologi, yaitu dunia usaha melakukan apa yang dibagikan awal disebut sebagai *Cleaner Production* dan di dalam bidang manajerial yaitu perbaikan dalam hal manajemen lingkungan.

Manajemen lingkungan didefinisikan sebagai implementasi yang terencana dan sistematis dari sasaran dan strategi lingkungan yang dibuat oleh perusahaan (Janicke, Kunig, Stützel, 1999: 290 sebagaimana dikutip oleh Freier, 2003:2).

Adapun manajemen lingkungan mengandung 7 elemen yang terdiri dari:

1. Analisis dampak dan dampak terhadap lingkungan
2. Menentukan kebijakan lingkungan
3. Membuat target dan sasaran lingkungan
4. Menentukan program lingkungan
5. Membentuk sistem manajemen lingkungan
6. Melaksanakan audit lingkungan serta
7. Melakukan komunikasi lingkungan (Dyllick, 1999: 5ff, sebagaimana dikutip oleh Freier, 2003:2).

Dengan melihat ketiga gambaran di atas yaitu adanya kepatuhan pada peraturan atau hukum-hukum lingkungan sebagai dasar utama tanggung jawaban lingkungan perusahaan, lalu melakukan *eco-efficiency* melalui Produksi bersih (*Cleaner Production*) serta adanya manajemen lingkungan yang baik, maka sebenarnya Tanggung Jawab Lingkungan dunia usaha dapat dilihat dalam 3 tahapan seperti yang dikemukakan di dalam *Industry and Environment* vol. 21

No. 1-2 January-June 1998. Dalam volume tersebut, dinyatakan bahwa di tahun 1998 sebuah paper kebijakan disampaikan kepada Komisi Pembangunan Berkelanjutan, UNEP yang secara luas mendefinisikan "dunia usaha yang bertanggung jawab" ke dalam 3 tahap proses yaitu:

Tahap pertama: Kepatuhan kepada hukum-hukum yang berlaku secara nasional. Pada tahap ini dunia usaha secara mendasar harus menjalankan kepatuhan kepada peraturan-peraturan di tingkat nasional dalam hal standar terhadap lingkungan, kesehatan dan keamanan kerja. Di sini, dunia usaha juga telah membuka diri terhadap emisi yang diatur, mengadopsi piagam kode perilaku yang dipromosikan oleh asosiasi industri. Akan tetapi, pada tahap ini, monitoring dan pelaporan masih dilakukan dengan terbatas (*sedikit sekali*). Persepsi dunia usaha terhadap lingkungan masih merupakan suatu pengeluaran (*expense*) dari pada sebagai suatu kesempatan (*opportunity*).

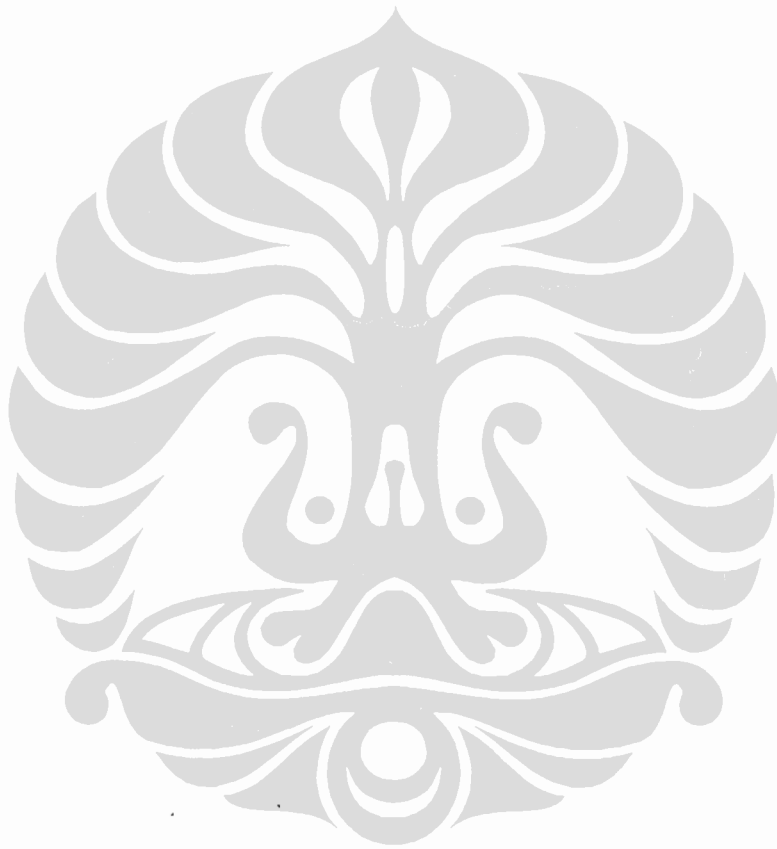
Tahap kedua: Kepatuhan pada hukum-hukum yang berlaku dan juga menjalankan *eco-efficiency*. Pada tahap ini telah dilakukan pendekatan yang lebih proaktif terhadap pembangunan berkelanjutan, khususnya diperlihatkan melalui kegiatan yang secara ekonomi sangat baik (*eco-efficiency*). Pada tahap ini, dunia usaha juga telah menetapkan sasaran dan target bagi kinerja lingkungannya. Melakukan perbaikan lingkungan yang terus menerus, melakukan pemantauan dan pelaporan dari implementasi terhadap kode-kode perilaku yang dibuat oleh asosiasi industri. Perusahaan juga melaksanakan standar pelaksanaan yang sama di setiap bagiannya di dunia ini. Bekerja dengan *suppliers* untuk memperbaiki kinerja lingkungan (*supply chain management*).

Mempublikasikan laporan kinerja lingkungannya dengan data-data kuantitatif. Namun dalam tahap ini masih adanya laporan yang terbatas mengenai issue sosial, namun telah terbuka terhadap dialog dengan pemerintah dan juga lembaga swadaya masyarakat (NGO's).

Tahap ketiga: Kepatuhan pada hukum-hukum yang berlaku, melakukan *eco-efficiency* dan redefinisi usaha yang strategis. Suatu redefinisi dari strategi dan kebijakan untuk memasukkan "tiga hal mendasar" dari pembangunan berkelanjutan, yaitu kemakmuran ekonomi, kualitas lingkungan, dan kesetaraan sosial. Hal ini diimplementasikan di setiap divisi dari perusahaan (baik itu bagian pemasaran, penjualan, promosi maupun pembuatan produk) dan juga di semua pelaksanaannya di dunia. Membuat desain ulang terhadap proses, produk dan pelayanan untuk mengintegrasikan "Tiga Hal Mendasar". Dalam tahap ini perusahaan aktif menjadi mitra di dalam pembangunan/implementasi dari perjanjian-perjanjian internasional. Perusahaan juga sangat peduli dengan "masyarakat perlu mengetahui" ("*public right to know*") dan "prinsip pencegahan" ("*precautionary principle*"). Mengembangkan indikator-indikator keberlanjutan, dalam konsultasi dengan *stakeholder*, perusahaan ini juga digunakan sebagai pembanding bagi kinerja lingkungan, ekonomi, dan sosial di antara maupun antar sektor industri. Melakukan audit sosial, transparansi, keterbukaan dan kontribusi aktif terhadap dialog dengan seluruh *stakeholder*.

Dengan menggunakan kerangka di atas, maka penelitian ini mencoba untuk menganalisis bagaimana bentuk penerapan Tanggung Jawab Lingkungan

perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan global yang memiliki pabrik di berbagai tempat di belahan dunia ini.



## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Pendekatan Penelitian

Terdapat dua pendekatan dalam penelitian sosial yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menurut Creswell didefinisikan:

*"...is an inquiry into a social or human problem, based on testing a theory composed of variables, measured with numbers, and analyzed with statistical procedures, in order to determine whether the predictive generalizations of the theory hold true (Suatu penelitian atau pemahaman mengenai masalah manusia atau sosial yang didasarkan pada pengujian teori yang tersusun dari beberapa variabel, diukur dengan jumlah dan dianalisis dengan prosedur-prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi yang diprediksi dalam teori dapat berlaku)" (Creswell, 1994:2).*

Pendekatan kualitatif di lain pihak didefinisikan *"as an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with word, reporting detailed views of informans and conducted in a natural setting (Suatu proses penelitian untuk memahami masalah manusia atau pun sosial, yang didasarkan pada bangunan yang kompleks, gambaran yang holistik, dibentuk oleh kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan informan secara lengkap dan dilaksanakan dalam situasi alamiah)"(Creswell, 1994:2).*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini ingin menggali secara mendalam bagaimana penerapan yang dilakukan oleh dunia usaha atau perusahaan dalam hal ini perusahaan bermodal asing terhadap tanggung jawab lingkungannya. Dengan demikian, penelitian ini berusaha

menggali secara mendalam segala aspek untuk memahami penerapan Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan.

### 3.2. Tipe Penelitian

Sejalan dengan pendekatan kualitatif yang digunakan, maka tipe penelitian ini adalah deskriptif. Neuman mengemukakan bahwa:

*"Descriptive research presents a picture of the spesific detail of a situation, social setting or relationships. Much of the social research found in scholarly journals or used for making policy decisions is descriptive. (Penelitian deskriptif menyajikan gambaran mengenai situasi, kondisi sosial atau hubungan-hubungan secara lengkap. Banyak penelitian sosial yang ditemukan dalam jurnal atau digunakan untuk membuat keputusan kebijakan adalah tipe penelitian deskriptif ini)"* (Neuman, 1997:20).

Lebih jauh Neuman mengatakan bahwa penelitian deskriptif dimulai dengan subyek yang didefinisikan dengan baik, dan melakukan penelitian untuk menggambarannya dengan lengkap.

### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Creswell mengemukakan bahwa dalam pendekatan kualitatif terdapat beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan. Dari 4 metode yang dipaparkannya, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan *Case Study*. Dalam *Case Study*, menurut Creswell, peneliti menggali satu entitas atau fenomena (*the case*) yang berkaitan dengan waktu dan kegiatan, (misalnya sebuah program, kejadian, proses, institusi atau pun kelompok sosial) dan mengumpulkan informasi dengan menggunakan beragam prosedur pengumpulan



data selama periode waktu tertentu (Creswell, 1994: 12). Ada pun Neuman mengemukakan "*a qualitative researcher may use a Case Study approach. He or She might gather a large amount of information on one or a few cases into greater depth, and get more details on the cases being examined.* (Peneliti kualitatif dapat menggunakan *Case Study*. Ia dapat mengumpulkan sejumlah besar informasi pada satu atau beberapa kasus dengan sangat mendalam, dan mendapatkan rincian dari kasus-kasus yang diteliti)" (Neuman, 1997: 331).

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Creswell dan Neuman, maka penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data *Case Study*, karena dengan metode pengumpulan data ini, peneliti dapat menggali segala aspek dari bentuk tanggung jawab lingkungan dunia usaha yang menjadi salah satu cabang dari suatu perusahaan global.

#### **3.4. Prosedur Pengumpulan Data**

Terdapat beberapa prosedur pengumpulan data yang terdapat di dalam penelitian kualitatif. Creswell mengemukakan bahwa terdapat 4 tipe dasar yaitu pengamatan (*observations*), wawancara (*interviews*), dokumen (*documents*), dan gambar (*visual images*). Ke empat tipe ini biasanya digunakan bersama-sama di dalam penelitian kualitatif (Creswell, 1994: 149). Pemanfaatan beberapa tipe pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran utuh (komprehensif) dari fenomena, mengingat penggunaan hanya salah satu tipe saja, akan memberikan keterbatasan dalam pengungkapan data yang diinginkan

dari penelitian kualitatif. Berdasarkan hal itulah maka dalam penelitian ini, semua tipe prosedur pengumpulan data akan digunakan.

Pengamatan akan dilakukan untuk melihat kondisi perusahaan secara rinci, mulai dari tata letak pabrik, proses kerja, hingga pembuangan limbah yang ada. Sementara wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) terhadap informan-informan kunci yang dapat menjelaskan kondisi Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan ini. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara mendalam yaitu suatu pedoman yang berisi pertanyaan-pertanyaan kunci yang memberikan keleluasaan informan untuk menjawab pertanyaan seluas-luasnya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Manager *Quality Assurance*, Manager Sumber Daya manusia (SDM). Dalam salah satu kunjungan, ketika Manajer *Quality Assurance* tidak dapat mendampingi, maka beberapa pertanyaan dijawab oleh Supervisor *Quality Assurance*.

Selain itu dokumen perusahaan yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan dan termasuk hal yang akan menambah informasi, karena dengan dokumen-dokumen yang ada di perusahaan, akan dapat diketahui kebijakan-kebijakan tertulis apa saja yang dimiliki oleh perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan ini. Hal ini akan merupakan data yang sangat bermanfaat dalam penelitian. Dokumen yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam hal ini adalah *company profile*, manual kebijakan *Health, Safety and Environment Division*, Manual kebijakan standar *operation procedure* untuk penanganan material berbahaya, Manual pelatihan kebakaran, serta untuk merujuk apa yang

dilakukan perusahaan global digunakan dokumen laporan kinerja lingkungan perusahaan global tahun 2001 dan 2002.

Gambar (*visual images*) yang akan dikumpulkan adalah mengenai tata letak pabrik dan proses kerja untuk mendapatkan gambaran mengenai mesin-mesin/teknologi yang digunakan, proses sejak masuknya material hingga proses akhir pembuangan. Dengan demikian, maka seluruh gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian diharapkan dapat terungkap dengan lebih akurat.

### **3.5. Analisis Data**

Proses analisis data, dalam kualitatif dimulai dengan melakukan *coding*. Berbeda dengan pembuatan *coding* yang dilakukan oleh penelitian kuantitatif, yaitu yang dilakukan setelah semua data terkumpul dan diukur melalui variabel dengan menggunakan angka-angka untuk diproses dengan statistik, maka dalam penelitian kualitatif, *coding* dilakukan dengan mengorganisasikan data mentah ke dalam kategori-kategori konseptual dan menciptakan tema-tema atau konsep-konsep yang kemudian akan digunakan dalam analisis data. Namun *coding* tidak harus dilakukan setelah semua data terkumpul, melainkan dapat digunakan untuk membawa pada pertanyaan berikutnya (Neuman, 1997: 421).

Neuman dengan mengutip Strauss (1987) mendefinisikan 3 bentuk *coding* data kualitatif yaitu *open coding*, yaitu dimana peneliti menempatkan tema-tema dan memberikan kode awal atau label sebagai usaha awal untuk memadatkan data yang sangat luas menjadi kategori-kategori. Setelah melakukan *open coding*,

peneliti mulai mengorganisasikan seperangkat kode-kode awal atau konsep-konsep awal tersebut. Proses ini disebut dengan *axial coding*. Di sini, peneliti mulai mengidentifikasi dasar/akar dari konsep kunci dalam analisis. Selama proses ini, peneliti mempertanyakan mengenai sebab dan konsekuensinya, kondisi-kondisinya serta interaksi, strategi dan proses serta melihat kategori atau konsep yang dapat dikelompokkan. *Axial coding* menstimulasi pemikiran mengenai hubungan antara konsep dan tema-tema. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama. Hal ini disebut dengan *Selective coding*. Dalam proses ini, peneliti melihat secara selektif kasus-kasus yang mengilustrasikan tema-tema dan membuat perbandingan serta kontras-kontras setelah semua data terkumpul secara lengkap. Hal ini dimulai setelah sebelumnya diperoleh konsep-konsep yang telah terbangun dengan baik dan mulai mengorganisasikan analisis keseluruhan (Neuman, 1997: 422-424).

Dengan menggunakan proses analisis yang dikemukakan oleh Strauss sebagaimana dikutip oleh Neuman di atas, penelitian ini akan menganalisis data yang terkumpul sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan lengkap (komprehensif).

### **3.6. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dengan unit analisis perusahaan ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Dibutuhkan cukup banyak waktu untuk melakukan pendekatan pada perusahaan yang akan diteliti. Biasanya, perusahaan sudah melakukan upaya defensif ketika peneliti mengajukan usulan penelitian. Beragam cara

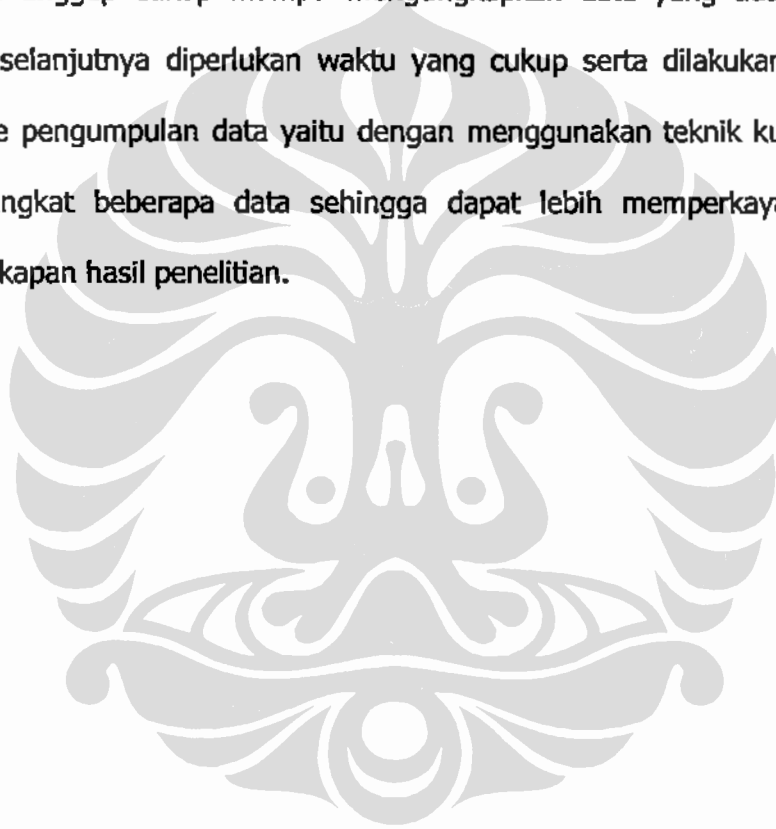
penolakan diberikan sehingga peneliti mengalami kesulitan untuk mendapatkan suatu perusahaan yang bersedia untuk dikaji secara mendalam.

Permasalahan lain yang kemudian muncul adalah ketersediaan data serta kemungkinan data untuk digunakan sebagai bagian yang akan dianalisis. Masalah waktu juga merupakan kendala untuk perolehan data yang cukup ini. Berkaitan dengan metode penelitian yang menggunakan metode *case study*, maka analisis dilakukan bersamaan dengan berjalannya proses penelitian. Dengan demikian, dari sedikit data yang diperoleh di awal penelitian, kemudian dibuat *coding-coding* awal berupa pemetaan konsep-konsep yang ditemukan. Dari sini peneliti kemudian mendapatkan hal-hal baru yang perlu untuk diteliti kembali untuk menambah khasanah pengetahuan awal yang telah diperoleh. Informasi-informasi ini kemudian kembali dianalisis sampai akhirnya peneliti menemukan tema-tema lain. Akan tetapi, proses ini memakan waktu yang cukup lama sehingga pada suatu titik, peneliti harus menghentikan pencarian sementara belum seluruhnya informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi kedalaman dari analisis, meskipun untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan dengan mencari sumber-sumber lain seperti penelusuran melalui internet dan sebagainya.

Meskipun penelitian ini dilakukan dengan waktu yang menurut peneliti belum memadai akan tetapi karena segala cara pengumpulan data dilakukan untuk memperdalam subyek yang diteliti yaitu dengan melihat dokumen yang ada, wawancara mendalam, obeservasi, maka data yang terkumpul menjadi cukup

baik dan mampu untuk mengungkapkan kondisi yang sebenarnya dari aspek yang diteliti ini.

Berdasarkan pengalaman peneliti di dalam melakukan penelitian dengan unit analisis industri ini, maka peneliti menganggap bahwa untuk melakukan penelitian sejenis, maka metode *case study* tetap merupakan metode yang peneliti anggap cukup mampu mengungkapkan data yang ada, akan tetapi, untuk selanjutnya diperlukan waktu yang cukup serta dilakukan penambahan metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik kuantitatif untuk mengangkat beberapa data sehingga dapat lebih memperkaya analisis dan kelengkapan hasil penelitian.



## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum

PT. Reckitt Benckiser Indonesia adalah suatu perusahaan modal asing (PMA) dengan lokasi pabrik di kawasan industri Jababeka I. Perusahaan ini merupakan salah satu dari 49 perusahaan yang berada di bawah bendera Reckitt Benckiser plc, yang berkedudukan di Inggris.

Sebenarnya, nama Reckitt Benckiser sendiri baru muncul pada tahun 1999 yaitu dengan dilakukannya merger antara perusahaan Reckitt & Colman plc dengan Benckiser N.V. Di Indonesia sendiri, perusahaan ini pertama berdiri dengan nama PT. Reckitt & Colman di tahun 1996, dan baru mulai berproduksi pada tahun 1997. Seiring dengan perubahan nama dari perusahaan induk inilah maka pada tahun 2000, PT. Reckitt & Colman berubah menjadi PT. Reckitt Benckiser Indonesia.

Bergerak di bidang industri kebersihan rumah tangga dan kesehatan serta perawatan diri, Reckitt Benckiser plc menyatakan diri sebagai "*The world no. 1 in household cleaning product (excluding laundry detergent) and a leading player in health and personal care*". Untuk pabrik di Indonesia, PT. Reckitt Benckiser memproduksi produk-produk seperti pembasmi serangga (mortein), antiseptik (Dettol), pembersih metal (Brasso), pembersih perak (Silvo), desinfektan (Lysol), toiletries (Harpic) serta pengharum ruangan (*Air Wick* dan *Air Spray*).

Perusahaan global yang memiliki pabrik tersebar di 30 negara ini, mempunyai visi sebagai berikut: *"Reckitt Benckiser is about passionately delivering better solutions in household and health & personal care to customers and consumers, wherever they may be, for the ultimate purpose of creating shareholders value* (Reckitt Benckiser memberikan solusi terbaik dalam perawatan rumah tangga dan kesehatan & personal bagi konsumen dan kostumer dimana pun mereka berada, dengan tujuan untuk menambah nilai saham perusahaan)". Bila dalam laporan kinerja lingkungannya tahun 2001, Reckitt Benckiser menyadari bahwa untuk dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi konsumen serta menjaga nilai saham untuk jangka waktu yang lama, sangatlah diperlukan komitmen yang nyata untuk menjalankan bisnis dengan cara yang bertanggung jawab, peduli pada lingkungan berkelanjutan, maka di dalam laporan kinerja lingkungan tahun 2002, dinyatakan bahwa Reckitt Benckiser sangat yakin akan hal tersebut. Lebih lanjut dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa komitmennya pada pertumbuhan yang berkelanjutan tidak hanya ditujukan untuk kepentingan ekonomi dari bisnis mereka semata, akan tetapi juga ditujukan bagi lingkungan dan manusia.



**Tabel 3.** Perhatian pada Lingkungan Reckitt Benckiser plc

Tahun Laporan	Th. 2001	Th. 2002
Pernyataan	<p><i>We are keenly aware that better consumer solutions and long term shareholder value require a real commitment to running our business in a responsible, environmentally sound and sustainable manner</i></p> <p>(Sangat menyadari bahwa untuk dapat memberikan solusi terbaik bagi konsumen dan menjaga nilai saham untuk jangka waktu yang lama, sangatlah diperlukan komitmen yang nyata untuk menjalankan bisnis dengan cara yang bertanggung jawab, peduli pada lingkungan dan perilaku yang berkelanjutan</p>	<p><i>We firmly believe that achieving our vision requires a real commitment to running our business in a responsible, environmentally sound and sustainable manner</i></p> <p>(Sangat meyakini bahwa untuk mencapai visi kami sangatlah diperlukan komitmen nyata untuk menjalankan bisnis dengan cara yang bertanggung jawab, peduli pada lingkungan dan perilaku yang berkelanjutan</p>

Sumber: Laporan Kinerja Lingkungan Reckitt Benckiser plc Tahun 2001 dan 2002

Perbedaan dua kata tersebut menggambarkan betapa dalam kurun waktu satu tahun, perusahaan ini telah benar-benar meyakini (dan bukan hanya menyadari) pentingnya menjalankan bisnis dengan cara yang bertanggung jawab, peduli pada lingkungan, dan perilaku yang berkelanjutan.

Sebagai konsekuensi logisnya, maka strategi yang digunakan untuk mencapai visi tersebut pun menjadi sangat kental dengan kepedulian pada lingkungan. Seperti dinyatakan dalam laporan lingkungan tahun 2002, strategi tersebut adalah merealisasikan kegiatan dan mengelola segala risiko yang muncul pada lingkungan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatannya; memberikan nilai saham yang berkelanjutan melalui perbaikan yang terus menerus dari kinerja lingkungan dan kemajuan ke arah sasaran pengembangan yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan melihat dampak lingkungan dari keseluruhan siklus hidup produk yang dihasilkan.

Untuk mencapai ini semua, dibutuhkan tiga hal yaitu:

1. Mengidentifikasi, memahami, mengontrol serta mengkomunikasikan dampak lingkungan, risiko dan kegiatan-kegiatan dengan berdasarkan pada proses yang sedang berjalan, pada semua level mulai dari kegiatan kelompok bisnis hingga fasilitas individual.
2. Bekerja dengan pemasok dan kontraktor untuk memperbaiki kinerja lingkungan dari produk serta prosesnya.
3. Terlibat dengan stakeholder baik internal maupun eksternal berkaitan dengan isu lingkungan

Dari semua upaya pencapaian visi ini, Reckitt Benckiser plc, tampak ingin memberikan dasar kebijakan yang kuat dan tegas yang akan menjadi rujukan utama bagi beroperasinya pabrik-pabrik yang tersebar di berbagai negara itu. Untuk merealisasikan kepedulian lingkungan yang telah digariskan dengan sangat kuat tersebut, Reckitt Benckiser membuat 5 buah pusat-pusat Riset dan Pengembangan dari produknya dan tersebar di berbagai negara. Pusat-pusat riset inilah yang kemudian berupaya mengembangkan secara terus menerus produk-produk Reckitt sehingga dapat lebih ramah lingkungan.

Dalam menjalankan kegiatannya, PT. Reckitt Benckiser Indonesia, tentu saja tidak dapat terlepas dari kebijakan umum yang telah digariskan oleh perusahaan induknya. Sebagai salah satu pabrik, PT. Reckitt Benckiser Indonesia hanya menjalankan apa yang telah ditentukan. Kedudukan pabrik yang berada di kawasan industri, merupakan suatu keuntungan sehingga tidak diperlukan upaya-upaya yang keras dalam hal memperkecil risiko terhadap lingkungan

sebagai akibat dari kegiatan produksinya. Meskipun untuk ini perusahaan harus membayar sangat mahal.

#### **4.2. PT. Jababeka : Lokasi Pabrik Reckitt Benckiser Indonesia**

Sebelum memberikan gambaran tentang tanggung jawab lingkungan perusahaan pada Reckitt Benckiser Indonesia yang akan dilihat dari bagaimana manajemen lingkungan yang ada serta bagaimana pula proses produksi dilakukan, adalah sangat bermanfaat untuk mengetahui gambaran lokasi pabrik Reckitt Benckiser yang berada di kawasan industri. Hal ini penting mengingat akan sangat berkaitan dengan analisis berikutnya yaitu dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Reckitt Benckiser Indonesia misalnya dalam hal pengolahan limbah.

Seperti telah dikemukakan di bagian awal bab ini, Reckitt Benckiser mempunyai pabrik di kawasan industri Jababeka I. Jababeka merupakan kawasan industri swasta pertama yang berdiri pada tahun 1989. Berada di wilayah Cikarang, Bekasi. Kawasan industri ini pada awalnya memiliki areal seluas 540 hektar. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah selama tiga tahun mengalami sukses penjualannya, maka wilayah ini segera berkembang menjadi 790 hektar. Saat ini, areal telah mencapai 2970 hektar yang meliputi kawasan industri, komersial, dan tempat tinggal. Sedangkan untuk kawasan industri sendiri mencakup wilayah seluas 1570 hektar. Konsep yang menyatukan segala kegiatan (kawasan industri, komersial, dan tempat tinggal) ini, dimaksudkan untuk membuat perusahaan yang berlokasi di areal tersebut dapat menghemat waktu dan biaya baik pada

saat awal pembentukan maupun pada saat beroperasi. Sejak awal berdirinya, Jababeka memang bertujuan untuk membangun lingkungan yang total bagi industri. Di dalam buku *Industrial Estate in Indonesia: A Guide for the Investor*, di antara kawasan industri utama yang ada di Indonesia, kawasan industri Jababeka Cikarang ini memperoleh penilaian dengan : *Highly recommended, top quality, reliable service and sound management*. Sebuah penilaian tertinggi yang diberikan kepada kawasan industri utama dan hanya didapat oleh 3 buah kawasan industri saja dari seluruh kawasan industri utama yang ada di Indonesia.

Kawasan industri yang menjadi lokasi lebih dari 600 perusahaan ini mempunyai infrastruktur yang mampu mendukung beragam kebutuhan industri sekaligus memelihara standar lingkungan. Infrastruktur tersebut yaitu air yang disuplai dari fasilitas *treatment* sendiri, seperti yang terlihat dalam gambar berikut ini:



**Gambar 4.** Water Treatment PT. Jababeka

Fasilitas lain adalah listrik dengan kapasitas yang tinggi, jaringan telepon, serta pengolahan air limbah yang saat ini dapat menampung 18.000 m<sup>3</sup> air limbah setiap harinya. Namun sebenarnya, fasilitas pengolahan air limbah ini didesain untuk mengolah 42.000 m<sup>3</sup> air limbah setiap harinya.



**Gambar 5.** *Waste Water Treatment* PT. Jababeka

Selain itu, pelayanan lain yang diberikan oleh Jababeka adalah berupa pelayanan terintegrasi didasarkan pada konsep "*one-stop-shop*" yaitu membantu perusahaan penyewanya dengan pengurusan perizinan termasuk salah satunya adalah sertifikasi kepatuhan lingkungan.

Jababeka akan mengadopsi pendekatan pembangunan *eco-industrial* untuk mengembangkan kawasan industri yang ekologis (*Eco-Industrial Estate*). Dalam tahap pertama proyek tersebut, Jababeka akan memfokuskan pada issue-issue manajemen lingkungan. Pada tingkatan perusahaan (*company*), beberapa topik seperti mempromosikan perangkat manajemen lingkungan, pra pengolahan air

limbah, dan sistem respon keamanan pabrik. Pada tingkatan kawasan, sistem manajemen yang terintegrasi untuk limbah cair dan padat serta monitoring lingkungan akan menjadi fokus perhatian.

Dengan menerapkan konsep *Eco-Industrial Estate* ini, perusahaan-perusahaan yang ada didorong untuk terlibat dalam jaringan kerjasama satu sama lain, dengan Jababeka sebagai manajer kawasan dan komunitas sekitarnya untuk membentuk suatu komunitas industrial. Melalui promosi terhadap berbagai program-program lingkungan, dengan melakukan sinergi produk, promosi produksi bersih dan eko-efisiensi, penyediaan jaringan dan pelayanan informasi produk-produk kawasan, perusahaan-perusahaan yang ada akan mampu mengurangi biaya serta dampak bagi lingkungannya. Melalui kerjasama dengan penyedia jasa pelayanan, PT. Jababeka akan mengembangkan kesempatan baru bagi pelayanan eko-efisiensi bagi perusahaan penyewanya. Salah satu dari kegiatan pertama dari *Eco-Industrial Estate* ini adalah pembentukan pusat EID (*Eco-Industrial Estate Development*) yaitu dimana perusahaan-perusahaan dan komunitas dapat mengakses informasi, pelatihan dan jasa-jasa bagi perangkat *eco-industrial*. ([www.eieasia.org](http://www.eieasia.org)). Untuk memfasilitasi pembangunan *Eco-Industrial Estate* yang pertama di Indonesia ini, di bulan April 2003, Menteri Lingkungan Hidup dan PT. Jababeka menandatangani perjanjian untuk bekerjasama.

### **4.3. Gambaran mengenai Bentuk Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan PT Reckitt Benckiser Indonesia.**

#### **4.3.1. Manajemen Lingkungan**

##### **4.3.1.1. Kebijakan Lingkungan dan Tujuan/Sasaran**

PT. Reckitt Benckiser Indonesia tidak memiliki kebijakan lingkungan sendiri.

Namun merujuk pada perusahaan induk, yaitu Reckitt Benckiser plc, secara jelas telah menyatakan kebijakan lingkungan adalah:

Reckitt Benckiser mempunyai komitmen untuk menjalankan bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab, peduli lingkungan dan berkelanjutan. Kami menyadari bahwa proses dan produk kami mempunyai dampak yang langsung maupun tidak langsung pada lingkungan. Kami akan mengidentifikasi dampak buruk dan menemukan cara yang efektif untuk mengurangnya, bermaksud melakukan perbaikan yang terus menerus dalam hal kinerja lingkungan kami dan membuat kemajuan kearah sasaran pengembangan yang berkelanjutan. Melalui pelaksanaan kegiatan kami akan patuh pada peraturan sebagai standar minimum yang akan dicapai.

Pernyataan kebijakan lingkungan itu, diikuti pula dengan pernyataan mengenai sasaran lingkungan yaitu:

1. Mempertimbangkan masalah lingkungan dalam seluruh pelaksanaan kegiatan.
2. Memberikan jaminan bahwa faktor-faktor lingkungan telah dinilai dan dipertimbangkan dengan selayaknya, bersama dengan masalah-masalah lainnya, ketika memlakukan keputusan mengenai produk dan proses baru.
3. Menetapkan dan mengukur dampak lingkungan yang signifikan dari pelaksanaan kegiatan, membuat target yang realistis untuk perbaikan kinerja dan memantau kemajuannya

4. Terlibat dengan stakeholder dalam masalah lingkungan, termasuk mengintegrasikan faktor-faktor lingkungan dalam hubungan dengan pemasok utama
5. Menjamin bahwa pegawai kami memiliki pemahaman yang baik mengenai isu lingkungan, mengetahui mengapa hal tersebut penting bagi perusahaan dan masyarakat luas dan melakukan pelatihan untuk tanggung jawab lingkungan mereka.
6. Melaksanakan kajian tahunan terhadap kinerja lingkungan, termasuk kemajuan terhadap sasaran dan target, dan membuat kajian tersebut dapat diterima oleh umum.

Tidak adanya kebijakan lingkungan yang dinyatakan secara eksplisit di PT. RBI, berkaitan erat dengan terletaknya pabrik di kawasan industri Jababeka. Dengan berada di kawasan ini, PT. RBI tidak memberikan efek yang negatif bagi lingkungan sekitar akibat dari proses produksinya. Hal ini membuat PT. RBI tidak memberikan fokus perhatian yang khusus pada masalah lingkungan eksternal perusahaan.

Seperti telah dipaparkan sebelumnya, kawasan industri Jababeka memang telah memberikan banyak kemudahan bagi perusahaan penyewanya. Segala hal yang berkaitan dengan lingkungan luar perusahaan, telah menjadi bagian yang ditangani, dengan demikian perusahaan penyewanya hanya tinggal menjalani usaha atau proses produksi mereka saja. Hal ini tentu saja di satu pihak menjadi jaminan keamanan dan kemudahan bagi perusahaan penyewanya, tetapi di lain



pihak, membuat perusahaan penyewanya menjadi tidak memikirkan lagi tentang lingkungan di luar perusahaannya.

Tidak adanya kebijakan lingkungan di PT. RBI berimplikasi pada tidak adanya program-program lingkungan.

#### **4.3.1.2. Penanggung Jawab Lingkungan PT. RBI**

##### **4.3.1.2.1. Kebijakan Penanggung Jawab Lingkungan PT. RBI**

Tidak adanya kebijakan lingkungan di PT. RBI, tidak berarti bahwa perusahaan ini tidak mempunyai divisi yang berkaitan atau bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan. PT. Reckitt Benckiser Indonesia memiliki divisi *Health, Safety & Environment*, meskipun divisi ini masih sangat baru. Masih sejalan dengan pemikiran awal yaitu tidak mendesaknya masalah lingkungan eksternal perusahaan untuk menjadi perhatian, maka meskipun terdapat kata lingkungan pada divisi ini, akan tetapi maknanya hanya ditekankan pada lingkungan di dalam tempat kerja. Hal ini terlihat mulai dari pernyataan visi, misi maupun keseluruhan isi manual kebijakan dari divisi ini.

Dalam pernyataan visi dari divisi ini disebutkan bahwa adalah komitmen Reckitt Benckiser Indonesia untuk menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang bebas kecelakaan, dimana setiap karyawan berperan sebagai anggota team yang saling tergantung satu sama lain, mampu mengontrol diri sendiri, inovatif, dan dapat menjadi mitra kerja yang memiliki kesadaran tinggi atas biaya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Ada pun sasaran/tujuan yang diberikan adalah:

1. Menghilangkan/meminimalkan risiko kecelakaan kerja.
2. Meningkatkan kesadaran individu atas pentingnya keselamatan kerja.
3. Meningkatkan tanggung jawab setiap individu atas dirinya sendiri, atas rekan kerja serta perusahaan.
4. Melatih seluruh lapisan manajemen agar dapat memberdayakan karyawan dan menciptakan suatu team untuk peningkatan keselamat kerja.
5. Menciptakan suatu proses yang dapat melibatkan seluruh karyawan, proses yang akan mampu menjawab tantangan yang muncul serta menciptakan "rasa memiliki" yang lebih kuat lagi di lingkungan seluruh karyawan.
6. Melatih dan membekali setiap karyawan dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan mereka akan mampu melakukan pekerjaannya dengan baik dan aman.
7. Menunjukkan secara nyata kepedulian terhadap keselamatan, kesehatan dan kenyamanan setiap karyawan, baik di tempat kerja mau pun di luar.
8. Mengevaluasi pekerjaan/lingkungan kerja yang terkait dengan masalah keselamatan kerja.

Dari uraian mengenai visi serta sasaran dan tujuan ini terlihat bahwa fokus utama divisi ini adalah pada pengurangan risiko terjadinya kecelakaan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang baik. Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, tidak ada satu pun yang memberikan perhatian kepada lingkungan di luar PT. RBI. Tentu saja hal ini disebabkan karena bagi PT. RBI, masalah lingkungan di luar pabrik tidak lagi menjadi permasalahan yang perlu mendapat fokus utama saat ini, karena pabrik ini berada dalam kawasan industri, dimana limbah sudah

tertangani dengan adanya instalasi pengolahan air limbah serta tiadanya hal-hal lain yang mengganggu seperti emisi dan kebisingan. Hal lain yaitu karena berada di dalam kawasan, maka perusahaan ini tidak terlalu bersentuhan dengan masyarakat sekitar. Oleh sebab itulah Divisi *Health, Safety & Environment* hanya menekankan pada lingkungan di tempat kerja. Seperti dikemukakan oleh narasumber:

*"Fokus kita internal, karena kan tidak ada yang berbahaya. Kita kan di kawasan, jadi tidak berbahaya, jadi kita tidak ke lingkungan eksternal".*

Sangat banyak hal yang menjadi perhatian bagi divisi ini berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Berbagai acuan kebijakan diberikan mulai dari acuan kebijakan untuk tanggung jawab karyawan, *housekeeping* yang baik, prosedur tempat kerja bagi seluruh karyawan serta alat perlindungan dan keselamatan kerja, hingga kebijakan khusus yang berkaitan dengan hal-hal rinci seperti diantaranya adalah penyimpanan bahan-bahan kimia dan lain sebagainya.

Dengan demikian sebenarnya, meskipun fokus perhatian divisi ini hanya pada lingkungan internal pabrik, akan tetapi bila jalankan dengan seksama, maka memberikan hasil yang positif pula kepada lingkungan. Contoh yang dapat dilihat adalah pada kebijakan yang dibuat oleh divisi untuk tanggung jawab *supervisor/ coordinator shift* yaitu diantaranya adalah

1. mengerti dan bersikap hati-hati terhadap barang-barang yang berbahaya dan paham bagaimana menanganinya dengan aman

2. mengerti tentang limbah dan pembuangannya demi terciptanya *housekeeping* yang baik serta paham mengenai perlindungan terhadap kebakaran.

Dari dua point tanggung jawab yang ditetapkan oleh divisi ini, terlihat bahwa barang-barang yang berbahaya serta limbah perlu ditangani dengan baik sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini akan melindungi lingkungan yaitu dimana bahan berbahaya diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan tercecer dan terbuang pada saluran domestik melainkan ke saluran limbah yang akan bermuara pada instalasi pengolahan air limbah.

Hal ini secara tegas dinyatakan juga di dalam Petunjuk Kerja Penanganan Bahan Beracun dan Berbahaya yang menjadi acuan pekerja dalam menangani bahan berbahaya dan beracun. Di dalam petunjuk tersebut diinformasikan mengenai identifikasi bahaya, efek potensial pada kesehatan dan lingkungan, pertolongan pertama bila terjadi sesuatu pada pekerja, cara-cara menanggulangi tumpahan, perlindungan karyawan, dan perlindungan tambahan. Di dalam cara penanggulangan bila terjadi tumpahan misalnya, dengan tegas dinyatakan prosedur mengatasinya, dan selalu terdapat pernyataan bahwa air pencucian dari bahan yang tercecer tersebut harus diperlakukan sebagai air limbah dan dilarang keras dibuang ke pembuangan air domestik karena berbahaya. Efek bahaya yang ditimbulkan bila dibuang ke pembuangan domestik pun dinyatakan pula dalam petunjuk ini.

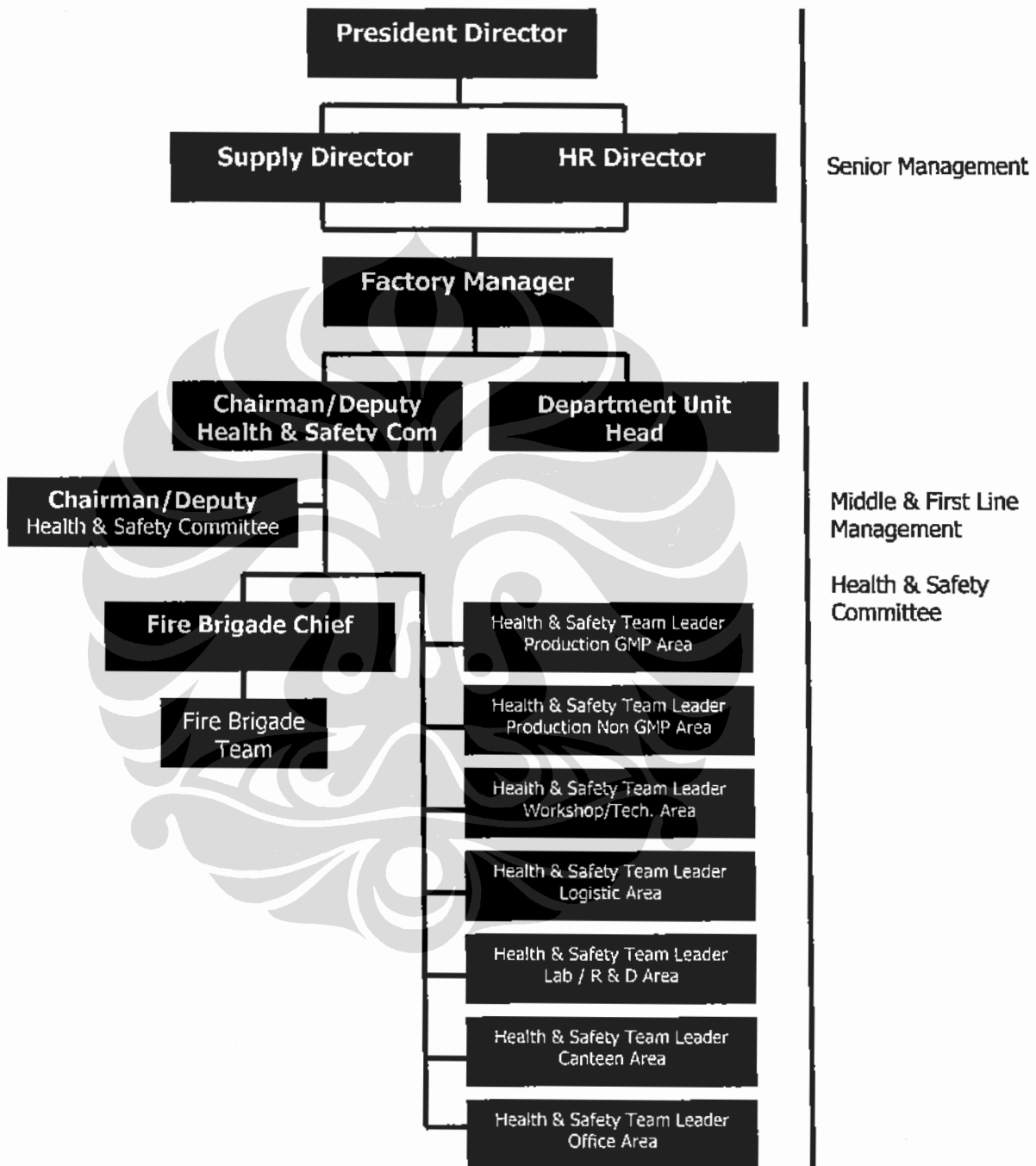
Perhatian terhadap sisa buangan cairan beracun tidak hanya diberikan sebagai petunjuk bagi karyawan pekerja di bagian pabrik, akan tetapi juga menjadi acuan

kebijakan keamanan bagi laboratorium. Di dalam acuan kebijakan tersebut salah satu point yang diberikan adalah: Jangan membuang sisa cairan beracun yang berbahaya yang mungkin mengandung gas beracun ke dalam saluran air. Pembuangan benda-benda semacam ini harus dilakukan di bawah supervisi/ pengawasan.

Masalah lain yang juga menjadi fokus utama dari divisi ini adalah masalah kebakaran. Terlihat dalam banyak petunjuk dan manual kebijakan, perhatian terhadap masalah ini sangatlah besar dan fasilitas yang diberikan untuk pencegahannya pun cukup banyak, seperti lokasi alarm kebakaran, *hydrant* dan *sprinkler*. Meskipun upaya ketat untuk pencegahan kebakaran ini adalah penting bagi pabrik itu sendiri, akan tetapi, efek bagi lingkungan juga sangat besar. Dapat dibayangkan betapa berat beban yang akan ditanggung oleh lingkungan bila hal ini terjadi.

#### **4.3.1.2.2. Organisasi Penanggung Jawab Lingkungan PT. RBI**

Di dalam keseluruhan struktur organisasi dari PT. Reckitt Benckiser Indonesia, posisi kepala divisi HSE berada di bawah manager pabrik (*Factory Manager*) yaitu setara dengan kepala departemen unit. Kepala divisi ini membawahi 6 *team leader safety & health* di tiap-tiap bagian dari pabrik serta satu unit kebakaran. Untuk lebih memperjelas, berikut ini adalah gambar struktur organisasi dari HSE Division.



**Gambar 6.** Struktur *Health, Safety and Environment* Division

Ada pun tugas atau tanggung jawab dari masing-masing *team leader* ini adalah :

1. Mencek terus menerus bahwa karyawan bekerja dengan aman.
2. Mendorong dan menegakkan terciptanya perilaku kerja yang aman.
3. Menegur perilaku tidak aman yang diamati/ditemuainya.
4. Memberikan on-the-job training pada karyawan baru.
5. Memastikan bahwa karyawan tahu dan paham mengenai pekerjaan mereka.
6. Melaporkan pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja yang ada.
7. Mendorong seluruh karyawan untuk dapat memberikan masukan.
8. Berkomitmen untuk terus maju.
9. Memastikan bahwa seluruh karyawan bagian memperoleh training yang perlu.

Di samping *team leader* dari tiap-tiap bagian, dalam organisasi HSE ini ada pula yang dinamakan dengan *team P2K3* yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki tanggung jawab untuk mengadakan rapat dan membahas masalah HSE secara periodik. Mereka juga menetapkan target dan prioritas HSE, melakukan inspeksi *hazard/risiko* bahaya secara periodik, melakukan investigasi kecelakaan kerja dan kecerobohan kerja, menganalisis perilaku dan proses kerja. Hal-hal lain yang juga menjadi tanggung jawabnya adalah mengkaji aturan dan prosedur serta menetapkan dan menjalankan prosedur emergensi, mengkomunikasikan, mendidik, dan menganalisis umpan balik yang diterima dan memastikan bahwa program HSE tetap relevan dan

mendorong terciptanya partisipasi dan keterlibatan seluruh karyawan dan memberikan pengakuan atas perilaku keselamatan kerja yang baik.

#### **4.3.1.3. Sosialisasi**

Sebaik apa pun kebijakan yang dibuat oleh perusahaan dan divisi khusus seperti HSE ini, tidak akan berarti apa-apa bila tidak disosialisasikan kepada karyawan yang merupakan ujung tombak perusahaan dalam pelaksanaan proses produksi. Kebijakan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, prosedur standar penanganan bahan beracun dan berbahaya, upaya penghematan energi dan lain sebagainya perlu diketahui karyawan dan diterima sebagai suatu nilai yang harus dijalankan dalam perusahaan ini. Untuk itulah maka salah satu dari sekian banyak tugas dan tanggung jawab manajer lini pertama dan P2K3 yang ditetapkan di dalam manual kebijakan divisi HSE ini membuat karyawan berperilaku sesuai dengan kebijakan tersebut.

Berbagai cara dilakukan oleh para manajer untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Upaya paling awal yaitu merupakan suatu keharusan bagi setiap supervisor bagian untuk menginformasikan kebijakan-kebijakan yang ada serta melakukan *on-the-job training*. Selanjutnya, upaya yang mengingatkan karyawan diberikan dengan menempelkan stiker dan kebijakan-kebijakan yang ada di tempat-tempat yang mudah terlihat. Misalnya, untuk membuat para karyawan berperilaku hemat dalam menggunakan energi, di samping stop kontak diberikan stiker untuk selalu mematikan lampu apabila tidak digunakan. Untuk membuat karyawan berperilaku yang tepat dalam menangani bahan beracun dan



berbahaya, maka di tempat penyimpanan bahan tersebut ditempelkan prosedur penanganan bahan yang bersangkutan.

Upaya lain yaitu dengan melakukan training atau pelatihan-pelatihan. Mengingat di dalam manual kebijakan divisi HSE penekanan yang utama pada masalah kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, maka tidak mengherankan bahwa pelatihan-pelatihan yang diberikan pada karyawan adalah pelatihan mengenai kebakaran dan K3 (keselamatan, kesehatan karyawan). Biasanya pelatihan seperti ini dilakukan setahun sekali. Untuk materi-materi tertentu seperti penanganan kebakaran, dilakukan bekerjasama dengan pihak luar seperti tim penanganan kebakaran kawasan industri.

**Tabel 4.** Bentuk-bentuk Sosialisasi bagi Karyawan PT RBI

Hal yang disosialisasi	Cara Sosialisasi
Cara melakukan pekerjaan dengan baik	<i>On the Job Training</i>
Standar penanganan bahan berbahaya	<i>On the Job Training</i> , Poster tertempel di dinding tempat bahan berbahaya berada.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	<i>On the Job Training</i> , Pelatihan-pelatihan khusus
Penanganan kebakaran	Pelatihan khusus

*Sumber: Hasil wawancara dengan QA manager*

Hambatan di dalam melakukan upaya penyadaran ini adalah pada sikap mental karyawan sendiri yang memang masih sangat sulit untuk menjadikan nilai-nilai kesehatan dan keselamatan kerja sebagai nilai yang dijalankan dalam bekerja. Untuk mengatasi hal ini, pihak pabrik akan melihat tingkat pelanggarannya. Untuk kasus yang berisiko tinggi, maka penerapan aturan yang ada diberlakukan

dengan sangat ketat. Misalnya aturan-aturan di dalam laboratorium dan aturan dalam penanganan bahan beracun dan berbahaya. Akan tetapi dalam kasus yang tidak mempunyai risiko terlalu tinggi, maka biasanya hanya diberikan teguran ringan dan kesadaran untuk menjalankan aturan tersebut, namun bila karyawan tidak mematuhi juga, biasanya tidak dilakukan tindakan yang serius.

#### **4.3.1.4. Audit yang Dilakukan**

Mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa apa yang telah dibuat tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi telah benar-benar dilaksanakan sebagaimana harusnya.

Selama dalam perjalanan melakukan kegiatan produksinya yang telah berjalan kurang lebih 6 tahun, PT Reckitt Benckiser Indonesia telah mengalami beberapa kali audit. Terdapat beberapa jenis audit yang dijalani oleh pabrik. Audit yang paling sering dilakukan oleh perusahaan induk adalah audit *Quality Assurance*. Jenis audit lain yang juga dilakukan oleh perusahaan induk adalah audit HSE. Namun yang terakhir ini baru pertama kali dilakukan. Hasil audit yang diberikan untuk audit *Quality Assurance* adalah berupa pemeringkatan yang ditandai dengan warna yang diperoleh. Warna hijau merupakan peringkat yang terbaik, yaitu dimana kualitas dianggap baik. Warna-warna lain yaitu abu-abu, dan merah. Bagi PT. RBI, untuk audit *Quality Assurance* sudah memperoleh peringkat hijau, seperti dikemukakan oleh salah seorang narasumber berikut ini:

*"Kalau kemarin itu, kita dapat green, itu dari segi qualitynya, itu seperti sistem ISO gitu ya, kalau misalnya green itu pas, bisa lewat. Kalau*

*misalnya grey, harus ada koreksi yang diperbaiki, jadi ada beberapa pemeringkatan sebenarnya dari Reckitt sendiri..."*

Sedangkan untuk HSE, karena baru pertama kali bagi PT RBI dan baru saja dilakukan, belum diketahui hasil yang diperoleh. Adapun hasil yang diperoleh dari audit ini nantinya juga berupa pemeringkatan, hanya saja berupa penekanan seperti *strong* (kuat), *medium* (sedang) dan *low* (rendah). Artinya, kinerja dari HSE dianggap kuat, sedang atau masih dinilai rendah.

Penekanan yang lebih pada *Quality Assurance* dibandingkan dengan audit lainnya (seperti HSE yang baru pertama kali dilakukan), hal ini karena mutu produk adalah hal yang paling rentan untuk mendapatkan keluhan dari konsumen. Apabila terjadi suatu kekurangan dalam hal mutu produk, maka ini akan dengan sangat cepat dan langsung memberikan efek pada perusahaan. Audit Kualitas ini mencakup kelengkapan dari dokumen dari setiap produk yang dilepas ke pasaran. Hal ini merupakan prosedur standar bagi PT RBI untuk dapat mempertanggungjawabkan produk mereka. Setiap produk yang dilepas harus mempunyai sampel dan dokumen yang lengkap. Setiap detail dari pembuatan produk tersebut harus tercatat dengan lengkap. Selain pemeriksaan dalam hal dokumen, audit dilakukan juga dengan memeriksa perlengkapan yang harus ada, untuk melihat apakah perlengkapan tersebut memenuhi standar kualitas. Kemampuan dari operator juga menjadi hal penting untuk diaudit. Pemeriksa akan menanyakan langsung kepada operator apakah mereka mengerti apa yang mereka kerjakan. Seperti dikemukakan oleh narasumber, ketika menjelaskan audit yang dilakukan oleh perusahaan induk (global):

*Itu dari segi QA. Nanti pertama dia akan periksa kelengkapan dokumen, dari kelengkapan dokumen, karena kita memang punya standar ya, bahwa setiap produk itu harus punya record ya. Kalau quality kan itu harus terecord untuk dipertanggungjawabkan gitu, harus ada korelasi antara yang dilapangan dengan dokumen yang kita buat. Jangan asal buat dokumen, tetapi actualnya lain. Terus juga audit atau survey dari segi equipment yang dipergunakan apakah memenuhi standar quality, bila disana dikatakan bahwa airnya musti disoftener dulu, apakah kita memeriksa softener itu, apakah kita akan pakai air dari material itu, itu nanti kita periksa, juga kemampuan dari segi operator, mereka tanyakan langsung pada teknisi kita, mereka kerjain apa, mengerti atau tidak apa yang dikerjakan gitu,....”*

Ada pun audit mengenai HSE, adalah berkisar pada apakah perlengkapan perlindungan bagi pekerja sudah cukup dan baik, berapa kali dilakukan pelatihan bagi karyawan, bagaimana penempatan pemadam kebakaran, bagaimana dengan ventilasi, dan sebagainya.

Selain mendapatkan audit dari perusahaan induk, juga terdapat audit yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja. Audit oleh Depnaker ini berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan dari departemen kesehatan pernah terdapat pemeriksaan terhadap pabrik GMP (*Good Manufacturing Practice*) yang memproduksi Dettol. Karena produk ini termasuk dalam kategori kosmetik (karena salah satu produknya adalah *shower foam*), maka harus dilakukan dengan CPKB (cara pembuatan kosmetik yang baik). Untuk itulah Departemen Kesehatan melakukan pemeriksaan, dan untuk ini, PT RBI telah memiliki sertifikat CPKB.

**Tabel 5.** Jenis Audit yang Dilaksanakan PT RBI

Jenis Audit	Di audit oleh
1. <i>Quality Assurance</i>	Perusahaan induk (Global)
2. <i>Health, Safety and Environment</i>	Perusahaan induk (Global, Depnaker)
3. <i>Good Manufacture Product</i>	Departemen Kesehatan

Sumber: wawancara dengan QA manager dan supervisor

#### 4.3.1.5. Sertifikasi SML

PT. Reckitt Benckiser Indonesia belum memiliki sertifikasi standar internasional dalam sistem manajemen lingkungan. Dari 49 pabrik Reckitt Benckiser plc sendiri, baru terdapat 16 pabrik yang memiliki sertifikasi standar internasional yaitu ISO 14001, dan semuanya merupakan pabrik yang berada di Eropa. Dinyatakan dalam laporan lingkungan Reckitt Benckiser plc tahun 2002 bahwa hampir 50% pemasukan bersih berasal dari pabrik yang telah memperoleh sertifikat ISO 14001 ini.

Ketika ditanyakan mengapa PT RBI belum mempunyai sertifikasi ISO 14001, dinyatakan bahwa hal ini mungkin disebabkan karena pabrik masih berskala kecil dan hanya merupakan salah satu bagian dari Reckitt Benckiser plc. Hal ini tidak berpengaruh pada penjualan yang dilakukan, karena apabila produk yang ada ingin diekspor ke negara yang selama ini menjadi tempat pemasaran produk, maka yang dibutuhkan oleh negara yang bersangkutan adalah bahwa produk tersebut teregistrasi di Indonesia. Untuk produk yang termasuk dalam kategori kosmetik seperti Dettol, maka dibutuhkan sertifikat GMP (*good manufacturing practice*) dari Departemen Kesehatan. Dengan demikian, sejauh ini tidak adanya

sertifikat ISO 14001 tidak mempengaruhi pemasaran yang dilakukan, karena dari segi produk sangat terjaga mutu atau kualitasnya.

Akan tetapi, meskipun PT Reckitt Benckiser Indonesia termasuk pabrik yang belum memperoleh sertifikasi standar internasional dalam sistem manajemen lingkungan, namun, Reckitt Benckiser plc sendiri memiliki Kelompok Sistem Manajemen Lingkungan untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi lingkungan secara global. Reckitt Benckiser plc menggunakan serangkaian standar kinerja lingkungan kelompok untuk menjamin tingkat minimum dan mendorong perbaikan ke arah pelaksanaan terbaik dalam kinerja dan manajemen lingkungan secara global. Misalnya, fasilitas pengolahan limbah dan kontrol terhadap kepatuhan lingkungan. Dengan demikian, dari perusahaan induk terdapat ketentuan bahwa perusahaan-perusahaan Reckitt yang tersebar di berbagai negara paling tidak telah memenuhi ketentuan minimum tadi. Salah satu contoh yang dapat diberikan adalah seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu adanya ketentuan yang ketat untuk tidak membuang limbah bahkan pencucian bahan tercecer sekali pun ke saluran domestik.

#### **4.3.2. Proses Produksi**

##### **4.3.2.1. Teknologi**

Sejak dimulainya produksi di tahun 1997 hingga kini, PT Reckitt Benckiser Indonesia belum pernah melakukan perubahan dalam hal teknologi. Hal ini menurut manajer *Quality Assurance* disebabkan karena teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang baru dan sudah mempunyai tingkat efisiensi yang

tinggi. Apabila terdapat inovasi dalam hal produk, maka teknologi yang digunakan biasanya berbeda sehingga pabrik mendatangkan teknologi baru untuk menghasilkan produk inovasi tersebut.

Dengan demikian, apabila satu jenis produk baru ingin dibuat, maka salah seorang dari bagian *Research & Development* akan datang untuk melihat kemungkinannya sekaligus untuk melakukan transfer pengetahuan. Setelah itu baru dilakukan pengadaan alat atau teknologi yang dibutuhkan. Apabila alat atau teknologi tersebut belum ada, maka produk tersebut belum dapat diproduksi oleh PT RBI. Berikut ini apa yang dikemukakan oleh narasumber:

*"Harus sama untuk produk yang sama, karena begitu launch produk baru, satu orang dari R & D akan datang. Dia akan lihat dan transfer ilmunya,... Misalnya mau buat produk A, bila belum ada teknologinya, ngga bisa. Jadi untuk dapat membuat produk A, harus ada approval dari R & D,...."*

#### **4.3.2.2. Bahan Baku**

Penggantian bahan baku sudah pernah dilakukan. Hal ini disebabkan berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh R & D Global ditemukan bahan baku baru yang lebih ramah lingkungan, sehingga bahan baku lama yang dianggap berbahaya harus digantikan. Biasanya, R & D Global telah secara langsung menginformasikan kepada pemasok bahan baku untuk menggantinya. Dengan demikian, secara otomatis untuk semua pabrik Reckitt Benckiser bahan baku yang telah ditemukan penggantinya itu tidak lagi digunakan. Apabila terjadi kealpaan dari pabrik sehingga masih melakukan pemesanan atas bahan baku lama, maka pemasok akan segera mengingatkan bahwa bahan tersebut telah diganti. Hal ini tentu saja menjamin kesamaan produk dimana pun pabrik berada.

Pemasok bahan baku PT Reckitt Benckiser Indonesia adalah sama untuk semua pabrik Reckitt Benckiser (supplier global). Hanya untuk bahan baku sederhana saja atau pelengkap (seperti HCl) yang diperoleh dari produk lokal Indonesia.

#### **4.3.2.3. Operasi Produksi**

Dalam hal operasi produksi, pabrik telah melakukan hal-hal penting yang berkaitan dengan proses produksi yang baik. Hal-hal tersebut misalnya dilakukannya segregasi limbah. Pabrik sangat menekankan pemisahan limbah yaitu antara limbah produksi dan limbah domestik (toilet). Dalam hal ini, pabrik cukup ketat menetapkan limbah cair yang ada. Segala bentuk pencucian yang berkaitan dengan proses produksi pun termasuk dalam kategori air limbah. Seperti telah dikemukakan di atas, pencucian terhadap bahan berbahaya yang sangat sedikit pun termasuk dalam kategori air limbah. Hal lain yang berkaitan dengan proses produksi adalah pencegahan kebocoran dan luapan bahan. Mengingat bahan-bahan baku produksi merupakan bahan kimia, maka penekanan diberikan pada upaya pencegahan kebocoran dan luapan bahan. Sedangkan hal-hal lainnya seperti pengaturan kerja/instruksi kerja/prosedur kerja, supervise dan pelaksanaan tata tertib tidak dilakukan dengan sangat ketat. Adapun perawatan dilakukan dengan teratur. Pada saat jam kerja, perawatan merupakan tanggung jawab pekerja. Akan tetapi, apabila jam kerja usai, maka perawatan dan pembersihan dilakukan oleh bagian pembersih (*cleaning service*).



**Tabel 6.** Hal-hal yang Dilakukan di dalam Operasi Produksi

<b>Kegiatan</b>	<b>Keketatan pelaksanaan</b>
1. Segregasi limbah	Sangat ketat, antara limbah domestik dan limbah hasil kegiatan
2. Pencegahan kebocoran	Cukup ketat
3. Pengaturan kerja	Tidak ketat
4. Perawatan	Ketat

*Sumber: Hasil wawancara dengan QA Manager*

#### **4.3.2.4. Penghematan Energi Listrik dan Air**

Salah satu penekanan lagi dari PT. Reckitt Benckiser adalah penghematan terhadap energi listrik dan air. Untuk pabrik selalu memberikan anjuran serta teguran-teguran apabila terdapat pemakaian yang tidak semestinya (berlebihan). Anjuran ini dilakukan dengan menempelkan stiker pada setiap stop kontak dan juga poster-poster. Namun penghematan ini tentu saja tidak dapat dilihat dari penggunaan listrik atau air setiap bulannya, karena hal ini berkaitan dengan unit produksi yang dihasilkan setiap bulannya. Pada bulan tertentu misalnya pemakaian air menjadi begitu besar, namun produksi pada saat itu pun berbeda dengan bulan sebelumnya. Hal yang paling mudah untuk membandingkan adalah dengan melihat pemakaian air dan listrik per 1000 unit produksi seperti yang dibuat Reckitt Benckiser plc dalam laporan lingkungan setiap tahunnya.

#### **4.3.2.5. Pengolahan Limbah**

Keuntungan yang diperoleh PT Reckitt Benckiser Indonesia dengan menempatkan pabriknya di kawasan industri adalah tidak bermasalahnya mereka

dengan pengolahan limbah. Menurut manajer *Quality Assurance*, setiap air limbah dari proses produksi sudah langsung masuk ke dalam pipa IPAL. Dengan demikian, pabrik hanya tinggal secara ketat dan tegas menyatakan mana yang merupakan limbah proses dan limbah domestik. Seperti halnya air pencucian alat atau pun bahan secara tegas harus diperlakukan sebagai limbah proses dan bukan limbah domestik. Sanksi yang dikenakan oleh pihak kawasan terhadap pabrik yang secara sengaja atau pun tidak membuang air limbah yang mengandung bahan berbahaya ke pembuangan limbah domestik. Oleh sebab itu, pabrik pun mensosialisasikan kepada tenaga kerjanya untuk benar-benar mematuhi ketentuan tersebut.

#### **4.3.2.6. Daur Ulang (*Recycling*)**

Sampai saat ini PT Reckitt Benckiser Indonesia belum melakukan pendaur ulangan, atau pun penggunaan kembali limbah-limbah yang ada, seperti pada limbah padatnya. Hal yang dilakukan selama ini terhadap limbah padat adalah dengan menjualnya kepada *third party*.

#### **4.4. Upaya-upaya Perusahaan Induk dalam Hal Kepedulian terhadap Lingkungan**

Upaya untuk memahami bagaimana bentuk tanggung jawab lingkungan PT Reckitt Benckiser Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap Reckitt Benckiser plc yang merupakan induk dari perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena sebagai salah satu pabrik dari banyak pabrik yang tersebar di

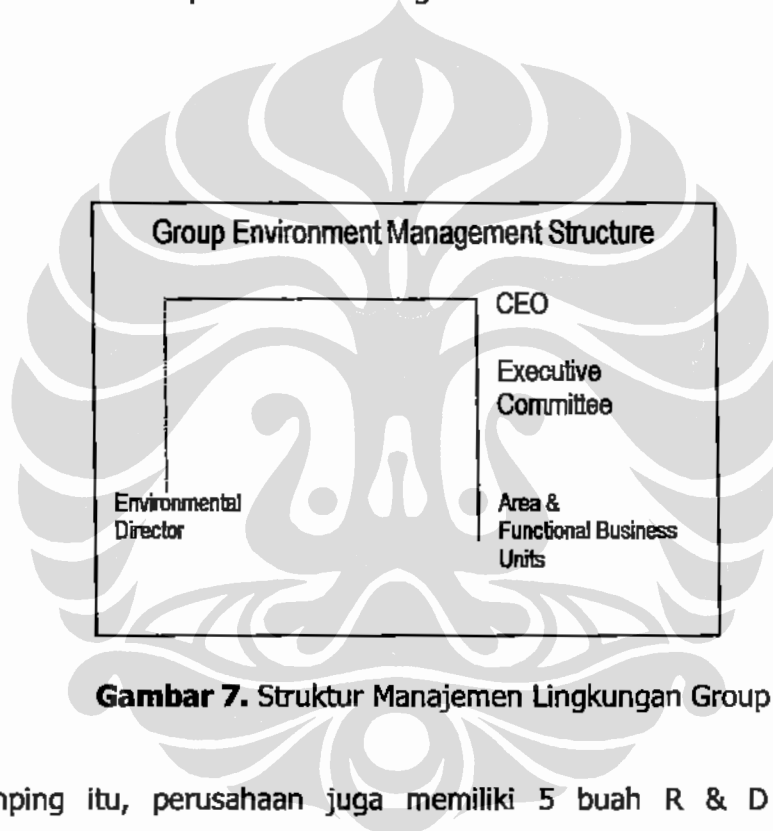
berbagai negara, PT RBI hanya menjalankan apa yang telah menjadi kebijakan perusahaan induk, terutama kebijakan-kebijakan inti yang berkaitan dengan produk. Dengan demikian, sebelum uraian masuk ke pembahasan mengenai seberapa besar tanggung jawab lingkungan PT Reckitt Benckiser Indonesia, maka akan diuraikan terlebih dahulu kebijakan dari perusahaan induk yang kemudian menjadi pijakan bagi berjalannya proses di berbagai pabrik termasuk pabrik yang berada di Indonesia ini.

Reckitt Benckiser plc (perusahaan induk dari PT Reckitt Benckiser Indonesia) memiliki perhatian dan tanggung jawab lingkungan yang cukup tinggi. Ketika sebuah visi yang dibuat untuk meningkatkan keuntungan bisnis ditetapkan untuk dicapai dengan perilaku yang bertanggung jawab dan mempedulikan lingkungan maka tampak bahwa lingkungan akan menjadi dasar pertimbangan untuk segenap kebijakan yang diambil dalam mencapai keuntungan bisnis tersebut. Hal ini kemudian tercermin di dalam strategi yang dibuat. Meskipun upaya untuk itu memang tidak dilakukan dengan cara yang revolusioner, akan tetapi lebih bersifat *incremental* atau bertahap, namun bersifat menyeluruh bahkan hingga bekerja bersama-sama dengan pemasok dan kontraktor untuk memperbaiki kinerja lingkungan dari produk dan prosesnya.

Untuk merealisasikan semua itu, Reckitt Benckiser membentuk struktur yang bertanggung jawab atas kinerja dan manajemen lingkungan. Karena, masalah lingkungan menjadi arus utama (*mainstreaming*) di dalam perusahaan, maka penanggung jawab lingkungan tersebut adalah terintegrasi dalam struktur manajemen perusahaan, dengan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai

penanggung jawab bagi kebijakan dan kinerja lingkungan perusahaan. Tanggung jawab ini, kemudian didelegasikan pelaksanaannya kepada *Executive Committee* dan selanjutnya ke masing-masing unit usaha yaitu dimana setiap manajer pabrik memiliki tanggung jawab untuk kinerja lingkungan yang kemudian pada gilirannya didelegasikan ke masing-masing bagian dalam struktur organisasinya.

Organisasi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:



**Gambar 7.** Struktur Manajemen Lingkungan Group

Di samping itu, perusahaan juga memiliki 5 buah R & D (*Research & Development*). Di sini dilakukan berbagai upaya untuk mendapatkan produk yang lebih bermutu dan ramah lingkungan. Fungsi dari R & D ini juga meliputi tim pelayanan perundang-undangan, keselamatan dan lingkungan yang bertanggung jawab untuk mengkaji produk dari segi ketaatan pada keamanan produk dan persyaratan lingkungannya sebelum dikeluarkan ke pasaran.

Setiap pabrik yang ada di berbagai negara serta R & D memiliki Koordinator lingkungan yang bertanggung jawab untuk mensinkronisasikan kegiatan manajemen lingkungan pabrik serta memberikan laporannya paling sedikit setahun sekali mengenai kinerja lingkungan serta ketaatan lingkungan langsung kepada direktur lingkungan global.

Upaya lain yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan lingkungan adalah dengan memperhatikan proses produksi. Secara keseluruhan, Reckitt Benckiser plc, melakukan perbaikan-perbaikan produk, menjalankan *eco-efficiency*, *eco-design*. Suatu proyek perbaikan produk yang melibatkan prinsip *eco-design* dapat memperbaiki kinerja lingkungan di dalam banyak hal dari daur kehidupan produk tersebut. Salah satu contoh yang dapat diberikan adalah produk *Air Wick plug-in*, yaitu produk penyegar atau pengharum ruangan. Produk ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1997, dan pertama mengalami proses desain ulang pada tahun 2000 menjadi lebih langsing. Pada tahun 2002, produk ini mengalami desain ulang untuk kedua kalinya. Sebagai hasil dari perbaikan produk dan pengemasannya, beberapa hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat diperbaiki misalnya lebih sedikit bahan mentah yang digunakan, lebih sedikit transport yang digunakan, lebih sedikit limbah yang dihasilkan dari pasca penggunaan barang oleh konsumen, mengurangi emisi (hal ini berkaitan dengan berkurangnya energi yang digunakan pada saat pembuatan, pengemasan, serta transport), mengurangi penggunaan dan pelepasan air, berkurangnya penggunaan metal serta plastik.

*Eco-efficiency* juga dilakukan dengan melakukan penggunaan kembali (*re using*) dan daur ulang (*recycling*) limbah apabila dapat dilakukan serta melakukan pengurangan bahan selama memungkinkan. Hal ini misalnya dilakukan ketika melakukan pengurangan material pengemasan (*packaging*).

Selain perbaikan produk dalam hal desain, juga dilakukan perubahan dalam hal komposisi. Melalui salah satu bagian dari R & D yaitu penerapan Kesehatan, keselamatan dan lingkungan, yang selalu mengkaji dan memberikan masukan mengenai ketaatan pada standar dunia. Produk yang dikembangkan adalah kombinasi dari penilaian risiko secara ilmiah serta perhatian dari *stakeholder*. Contohnya yaitu peniadaan penggunaan bahan baku *musk* buatan. Diketahui bahwa bahan baku *musk* buatan tertentu bersifat karsinogenik. Di tahun 2002, pabrik-pabrik Reckitt Benckiser telah menghindari penggunaan pengharum yang mengandung *nitro* dan *polycyclic musk*.

Penghematan penggunaan energi menjadi perhatian utama pula. Selama tahun 2002, perusahaan secara keseluruhan telah berhasil mengurangi penggunaan energi per 1000 unit konsumen yang dihasilkan sebesar 8% dibandingkan penggunaan pada tahun sebelumnya. Hingga akhir tahun 2004, perusahaan bermaksud untuk mencapai pengurangan sebesar 10% dari konsumsi energi secara global per 1000 unit konsumen dibandingkan dengan penggunaan energi di tahun 2000.

Salah satu sasaran lingkungan yang ingin dicapai oleh perusahaan ini adalah terlibat dengan *stakeholder* yang berkaitan dengan issue lingkungan dan termasuk diantaranya adalah melakukan integrasi faktor-faktor lingkungan ke

dalam hubungan dengan para pemasok (*supplier*). Oleh sebab itulah, salah satu program utama perusahaan ini adalah "*environmental supply chain program*". Untuk itu perusahaan melakukan beberapa hal yaitu pertama, melakukan pula audit terhadap para supplier untuk kualitas produk dan keamanannya, termasuk pula masalah kesehatan, keamanan dan lingkungan (HSE). Kedua, karena masalah lingkungan telah diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses produksi, maka hal ini termasuk pemilihan komponen bahan dasar yang dipasok oleh pihak ketiga. Dalam hal pembuatan produk baru, maka untuk memilih pemasok juga dilakukan proses seleksi berupa kriteria kinerja lingkungan dari pemasok yang ada. Hal terakhir yang dilakukan berkaitan dengan pemasok adalah bekerjasama dengan pemasok untuk mendapatkan perbaikan dalam hal kinerja lingkungan maupun pengurangan biaya. Hal ini termuat di dalam program "*supply chain cost optimization*" maupun "*product cost optimization programme*".

Sebagai salah satu bentuk keterbukaan, Sejak tahun 2000, Reckitt Benckiser plc membuat laporan lingkungan yang telah dikaji oleh badan independen yaitu *PricewaterhouseCoopers*.

#### **4.5. Pembahasan Hasil Temuan**

##### **4.5.1. Tanggung Jawab Lingkungan PT. RBI dari Segi Kepatuhan Lingkungan**

Seperti telah dijelaskan bahwa lokasi PT. RBI yang berada di kawasan industri memberikan keuntungan dari segi kepatuhan pada hukum-hukum yang berlaku di bidang lingkungan. Karena berada di kawasan, maka sesuai dengan pasal 4

ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, PT. RBI tidak lagi dikenakan kewajiban untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Akan tetapi, sesuai pula dengan dengan ayat berikutnya pada pasal 4 tersebut, yaitu ayat (2), maka PT. RBI wajib untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup. Pengendalian yang dilakukan oleh PT. RBI ini tercermin dari ketatnya pemberlakuan standar prosedur pelaksanaan dari penanganan bahan berbahaya dan beracun seperti yang telah dijelaskan di muka. Hal ini, seperti juga dijelaskan di dalam SOP (*Standard Operation Prosedur*) tersebut, selain dilakukan untuk melindungi karyawan juga dilakukan untuk melindungi lingkungan, karena dijelaskan secara rinci apa efeknya bagi lingkungan, bila bahan tersebut tercecer dan tidak masuk ke dalam saluran IPAL. Perlindungan fungsi lingkungan hidup ini juga merupakan kewajiban yang ditetapkan di dalam ayat (2) tersebut.

Peraturan lingkungan lain tentang industri adalah mengenai emisi, seperti KepMen LH No. 13/MENLH/3/1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. Akan tetapi mengingat dalam proses produksinya pabrik ini tidak mengeluarkan emisi, maka proses produksi PT. RBI tidak melampaui baku mutu yang ditentukan tersebut. Begitu pula dengan kebisingan yang tidak melampaui tingkat baku mutu seperti yang ditetapkan oleh KepMen LH No. 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan.

Tingkat kepastian kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan bagi perusahaan yang berlokasi di kawasan industri menurut



Lerche merupakan salah satu daya tarik dan alasan bagi industri terutama perusahaan trans nasional untuk menempatkan pabriknya di lokasi kawasan ini, seperti dikatakannya, *"The fact that the Industrial Estate as a whole has to pass an environmental impact assessment or ANDAL is a major reason for many industries to settle there, avoiding their own ANDAL"* (Lerche, 1999: 17), meskipun untuk ini berarti mereka harus membayar cukup mahal. Selain itu, untuk kegiatan selanjutnya, industri terbebas dari peraturan-peraturan mengenai pengelolaan limbah, karena juga sudah merupakan bagian yang harus disediakan oleh kawasan. Sekali lagi, tentu saja untuk ini perusahaan juga harus membayar mahal.

Namun, perusahaan-perusahaan trans nasional yang biasanya tidak ingin bermasalah dengan peraturan-peraturan yang ada menjadi lebih menyukai berlokasi di kawasan ini. Maka tidak mengherankan bahwa industri kawasan sebagian besar diisi oleh perusahaan bermodalkan asing.

Akan tetapi, untuk peraturan seperti yang dikemukakan pada Pasal 28 Undang-undang No. 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu mengenai audit lingkungan, PT. RBI memang belum pernah melakukan audit lingkungan seperti ketentuan yang tercantum dalam KepMen LH No. 42 Tahun 1994 tentang: Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan. Namun hal ini sendiri seperti disebutkan dalam ketentuan pertama yaitu merupakan kegiatan yang dianjurkan.

#### **4.5.2. Tanggung Jawab Lingkungan PT RBI dari Segi Proses Produksi**

Dengan melihat kinerja lingkungan dari perusahaan induk Reckitt Benckiser plc serta PT. RBI sendiri serta saling hubungan di antara keduanya, maka dapat dianalisis sejauh mana PT. RBI telah menjalankan tanggung jawab lingkungannya. Karena kebijakan perusahaan induk yang menetapkan standar mutu produk yang sama untuk setiap pabrik yang ada di seluruh dunia, maka dalam hal ini PT. RBI juga menjalankan proses yang sama mulai dari pembelian bahan baku utama yang harus menggunakan pemasok yang telah terseleksi oleh perusahaan induk (termasuk terseleksi dalam hal kinerja lingkungan dari pemasok yang bersangkutan) yang juga menjadi pemasok bahan baku dari semua produk yang sama dari Reckitt Benckiser plc. Hal ini menjadikan PT. RBI mendapatkan serta menggunakan bahan mentah sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh perusahaan induk.

Meskipun perusahaan induk tidak menyatakan bahwa semua bahan yang digunakannya adalah aman, akan tetapi dengan adanya R & D yang terus menerus mencari bahan baku pengganti yang lebih aman bagi lingkungan, maka dalam hal ini berarti PT. RBI juga telah melakukan proses perubahan bahan baku ke arah yang lebih aman, seperti yang dikehendaki dalam produksi bersih (*cleaner production*). Bentuk hubungan yang seperti ini (yaitu dimana cabang pabrik dari perusahaan global harus menggunakan material yang sama di berbagai tempat) juga merupakan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Thee Kian Wie dalam penelitiannya terhadap perusahaan-perusahaan Trans Nasional yang ada di Indonesia. Ia menemukan bahwa untuk kasus perusahaan

farmasi pada umumnya sangat kecil kemungkinan untuk membeli bahan mentah dari sumber selain dari pemberi lisensi (*lisensor*) (Wie, 1004: 239). Dengan demikian, sebenarnya apa yang dilakukan oleh perusahaan induk PT. RBI adalah juga merupakan hal yang umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sejenis.

Terdapat beberapa keuntungan dari kebijakan seperti ini yaitu apabila perusahaan induk telah mempunyai kebijakan lingkungan yang terintegrasi di dalam setiap kegiatannya, maka dalam hal ini perusahaan/pabrik di berbagai negara akan mendapatkan keuntungannya berupa perolehan bahan baku yang terus diupayakan ke arah yang lebih aman. Kedua, terdapat kesamaan mutu produk dari semua pabrik yang tersebar di berbagai negara. Keuntungan lain dari ketatnya pengawasan perusahaan induk terhadap produk mulai dari proses pembuatannya, maka dalam hal ini proses pembuatan pun mengikuti kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan induk tersebut. Contoh yang dapat diambil dalam hal ini adalah cukup ketatnya prosedur penanganan bahan-bahan berbahaya, pengambilan bahan untuk *mixing* (pencampuran bahan) dan lain sebagainya.

Begitu pula dengan penggunaan teknologi. Perusahaan induk menetapkan bahwa apabila suatu produk baru yang telah dikaji oleh R & D akan dibuat di dalam pabrik yang ada di Indonesia, maka selain melakukan uji pemasaran, juga baru dapat diproduksi hanya bila teknologi yang dibutuhkan telah tersedia. Teknologi tersebut adalah peralatan yang sama yang digunakan untuk pembuatan produk tersebut. Karena Reckitt Benckiser plc memiliki komitmen lingkungan yang termasuk didalamnya komitmen untuk memperoleh teknologi yang bersih (*clean*

*technology*), maka sebagai implikasinya, maka teknologi yang digunakan di Indonesia pun adalah teknologi yang bersih. Hal ini tergambar dari hasil wawancara dengan *QA manager* yang mengemukakan bahwa selama ini PT. RBI tidak melakukan perubahan teknologi karena sejak awal mesin-mesin yang digunakan sudah memiliki tingkat efisiensi yang tinggi.

Salah satu perhatian yang diberikan oleh perusahaan induk dalam menjalankan kegiatan usaha adalah senantiasa berusaha melakukan penghematan dalam hal energi listrik dan penggunaan air. Hal ini juga tergambar dari hasil temuan terhadap PT. RBI. Laporan yang lengkap mengenai penggunaan energi listrik dan air setiap bulan menjadi keharusan di sini. Upaya-upaya penghematan juga dilakukan dengan baik misalnya dengan memberikan peringatan berupa stiker dan spanduk-spanduk tentang pentingnya penghematan tersebut.

Bagian terpenting lainnya dari proses produksi PT. RBI adalah pengolahan limbah. Hal ini juga menjadi perhatian yang sangat utama dari perusahaan induk. Keberadaan lokasi di kawasan Industri yang juga menaruh perhatian yang cukup besar dalam hal pengolahan limbah memberikan keuntungan bagi PT. RBI. Dengan demikian perusahaan tidak perlu bersusah payah memikirkan bagaimana melakukan *treatment* terhadap limbah cair yang dihasilkan, karena semuanya telah masuk ke dalam IPAL (instalasi pengolahan air limbah) PT. Jababeka, meskipun untuk ini berarti PT RBI harus membayar sesuai dengan limbah yang dikeluarkannya.

Seperti telah dikemukakan di bagian awal, bahwa PT. Jababeka merupakan suatu kawasan industri yang sedang mengarah kepada *eco-industrial estate*, maka

perhatian-perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan menjadi perhatian yang cukup besar. Misalnya saja, PT. Jababeka akan memberikan sanksi apabila terdapat limbah yang tercecer masuk ke saluran domestik. Hal ini dinyatakan oleh manager QA yaitu bahwa karena limbah domestik masuknya ke dalam saluran air di depan perusahaan (*drainase/got*) maka PT. Jababeka akan sangat marah bila ketahuan terbuang limbah ke sana. Sanksinya cukup berat katanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk pengolahan limbah, PT. RBI telah melakukannya dengan cukup baik, karena dilakukan segregasi yang ketat antara limbah hasil produksi dan limbah domestik.

Adapun salah satu bagian dari produksi bersih yang penggunaan kembali limbah yang ada, dalam hal ini PT RBI tidak melakukannya *on site*. Limbah-limbah padat yang berupa dus dan drum-drum wadah bahan baku dijual kepada pihak ketiga. Namun mungkin satu hal yang sangat disayangkan adalah pihak perusahaan tidak mengetahui ke mana limbah mereka ini selanjutnya, serta siapa yang menggunakannya.

Dari gambaran mengenai proses produksi di atas maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

**Tabel 7. Tanggung Jawab terhadap Lingkungan PT RBI dalam Proses Produksi**

Kegiatan	Tanggung Jawab	Keterangan
1. Bahan baku	Ada	Kebijakan perusahaan induk
2. Teknologi	Ada	Kebijakan perusahaan induk
3. Pelaksanaan produksi	Ada	Kebijakan perusahaan induk+ PT RBI
4. Penghematan energi dan air	Ada	Kebijakan PT. RBI
5. Pengolahan limbah	Ada	Kebijakan perusahaan induk+ PT. RBI
6. Daur ulang	Tidak ada	Kebijakan PT. RBI

#### **4.5.3. Tanggung Jawab Lingkungan PT. RBI dari Segi Manajemen Lingkungan**

Untuk manajemen lingkungan, disini belum terlihat banyak pengaruh dari perusahaan induk. Tampak bahwa perhatian yang cukup besar dari perusahaan induk lebih ditekankan kepada mutu produk dan bagaimana produk tersebut diproduksi (proses produksi). Perhatian yang diberikan oleh perusahaan induk barulah berupa keharusan dari PT. RBI untuk memiliki suatu divisi yang menangani bidang kesehatan, keselamatan dan lingkungan. Hal ini pun baru dilakukan pada tahun 2003. Namun, seperti telah dikemukakan sebelumnya, target utama dari divisi ini pun adalah tidak adanya kecelakaan kerja yang terjadi selama kegiatan berlangsung (*zero accident*), sehingga masalah lingkungan di sini adalah hanya ditekankan pada lingkungan kerja dan bukan lingkungan luar pabrik.

Akan tetapi, keberadaan divisi HSE ini sudah memberi arti yang cukup besar sebab seperti dikemukakan oleh Little et al., bahwa keselamatan dan keamanan

*(Health and safety)* adalah inti dari pertumbuhan kesadaran dampak lingkungan. Hal ini disebabkan karena fokus perhatian dari publik dan juga kewajiban dari pemerintah berhubungan dengan kegiatan kerja yang normal. Peristiwa abnormal mengakibatkan konsekuensi yang besar. Sebagai contoh adalah peristiwa kecelakaan besar yang terjadi di Bhopal, India tahun 1984, yang mengakibatkan kerusakan yang amat parah baik bagi manusia mau pun lingkungan (Little et.al., 1995: 1.29-1.30).

Bila dilihat lagi, kerusakan lingkungan yang besar yang terjadi selama ini memang tidak hanya karena terbuangnya limbah ke dalam lingkungan, akan tetapi yang lebih parah lagi adalah yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi di dalam industri. Oleh sebab itulah, sebenarnya, perhatian yang sangat besar pada keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan internal pabrik sudah merupakan suatu bentuk tanggung jawab besar yang diberikan oleh industri pada lingkungan dan masyarakatnya.

Akan tetapi, bentuk tanggung jawab lingkungan ini akan menjadi lebih baik lagi dan lebih efektif apabila terdapat komitmen dari pimpinan puncak untuk membuat suatu kebijakan lingkungan, sehingga dengan demikian maka lingkungan kemudian akan menjadi dasar pertimbangan untuk setiap tindakan yang diambil oleh PT. RBI. Sebagai contoh, ketiadaan kebijakan lingkungan ini membawa pada ketiadaannya sasaran lingkungan yang ingin dicapai. Hal ini bukan berarti buruk, karena dapat saja apa yang menjadi sasaran tersebut sebenarnya telah dilakukan atau dikerjakan di dalam pabrik, akan tetapi, dengan tiadanya bentuk tertulis yang menyatakan pentingnya kegiatan tersebut secara

eksplisit, membuat kurangnya intensitas serta fokus perhatian dari seluruh staf, padahal barangkali kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting. Selain itu, ketiadaan kebijakan lingkungan juga membawa pada ketiadaannya program-program lingkungan yang dilakukan secara terlembaga. Hal ini bukan berarti bahwa ketiadaan kebijakan lingkungan membuat perusahaan tidak akan pernah memiliki program-program lingkungan. Bisa saja suatu ketika program tersebut ada atau dibuat, akan tetapi keberadaannya tersebut bersifat sementara dan bahkan mungkin hanya bertujuan untuk *public relations* sesaat saja.

Dari temuan yang diperoleh, maka tanggung jawab lingkungan dilihat dari segi manajemen lingkungan adalah sebagai berikut:

**Tabel 8.** Tanggung Jawab Lingkungan PT RBI dari Segi Manajemen Lingkungan

Item	Tanggung Jawab	Keterangan
1. Kebijakan dan sasaran lingkungan	Tidak ada	Belum ada komitmen tertulis mengenai kebijakan lingkungan.
2. Penanggung jawab lingkungan	Ada	Divisi <i>Health, Safety and Environment</i> . Namun hanya lingkungan di dalam pabrik.
3. Sosialisasi masalah lingkungan	Ada	Terbatas pada hal-hal yang berkaitan dgn kecelakaan kerja. Meski terdapat sosialisasi terhadap penghematan energi.
4. Audit	Ada	Terbatas pada audit HSE, dimana lingkungan hanya terbatas pada lingkungan pabrik
5. Sertifikasi standar internasional untuk lingkungan	Tidak ada	



#### **4.6. Analisis Tanggung Jawab Lingkungan PT RBI**

Dengan merujuk kepada terminologi tanggung jawab lingkungan yang disampaikan oleh UNEP pada bagian tinjauan pustaka, maka tanggung jawab lingkungan PT. RBI masih termasuk dalam tahapan I yaitu tahapan kepatuhan kepada perundang-undangan nasional di bidang lingkungan. Sebenarnya, pada skala tertentu, karena merupakan bagian dari suatu perusahaan global yang peduli lingkungan, maka PT. RBI telah masuk ke dalam proses produksi yang eko efisien. Akan tetapi, ia belum dapat dimasukkan di dalam tahapan kedua tersebut, mengingat PT. RBI belum menetapkan sasaran dan target dari kinerja lingkungannya. Meskipun demikian, perbaikan ke arah kinerja lingkungan sudah ditunjukkan pula dengan mulai dibentuknya divisi *Health, Safety and Environment*. Dengan demikian, maka PT. RBI sebenarnya sudah hampir memasuki tahapan kedua. Hanya saja untuk ini berarti PT. RBI perlu menetapkan kebijakan lingkungan yang jelas serta sasaran dan target kinerja lingkungan yang ingin dicapai. Untuk dapat melaksanakan ini tentu saja sangat dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan puncak PT. RBI.

Mengenai komitmen dari pimpinan puncak ini, menurut hasil beberapa penelitian ditemukan bahwa sebenarnya saat ini telah cukup banyak pimpinan puncak perusahaan yang menempatkan masalah lingkungan sebagai suatu masalah yang sangat penting pada masa ini. Misalnya saja hasil yang diperoleh dari suatu konferensi para pimpinan puncak di tahun 1987, melaporkan bahwa 86% dari eksekutif puncak mengemukakan masalah lingkungan sebagai masalah yang akan sangat penting pada lima tahun kedepan (Davidson, 1990: 65). Hasil ini

didukung oleh suatu penelitian yang dilakukan oleh ENN (*the Environmental News Network*) yang melakukan wawancara mendalam dengan kuesioner yang cukup panjang terhadap 100 pengambil keputusan dan analis bisnis di Eropa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan sikap mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di perusahaan yaitu dari "baik untuk dilakukan" "menjadi perlu untuk dilakukan" (Friedman, 2000).

Seperti juga dikemukakan oleh Rands bahwa di kalangan pimpinan perusahaan issue lingkungan saat ini tengah menanti dan masalah proteksi lingkungan dianggap sebagai sebagai suatu hal yang sudah sewajarnya dilakukan di dalam melakukan kegiatan bisnis. Hal ini berarti bahwa untuk mendapatkan kinerja lingkungan perusahaan yang positif harus dicapai melalui institusionalisasi yaitu dengan menyatukannya ke dalam tanggung jawab yang utama dari manajemen lini. Hal ini menurutnya berarti membutuhkan peningkatan kesadaran lingkungan kecanggihan dan keterampilan para managernya (Rands, 1990: 269). Itu pula sebabnya Goodpaster merasa yakin bahwa perusahaan dapat memiliki kesadaran lingkungan. Menurutnya, saat ini – setelah selama satu setengah dekade mengalami kebisuan—tema lingkungan kembali terdengar seperti halnya di awal tahun 1970 an. Lebih dari masa-masa sebelumnya, perusahaan menjadi lebih terbuka terhadap saran bahwa mereka membutuhkan penyadaran seperti halnya mereka membutuhkan strategi (Goodpaster, 1990: 25).

Semua hasil penelitian dan keyakinan ini memang berasal dari negara-negara maju. Akan tetapi mengingat saat ini dunia sudah demikian terbuka dan apa yang terjadi di negara maju dapat segera diterima di belahan dunia mana pun,

maka bukan tidak mungkin bahwa hal ini juga akan mempengaruhi para pemimpin puncak perusahaan di Indonesia. Apalagi PT. RBI adalah perusahaan trans nasional yang sudah sangat sadar dan peduli pada lingkungan dan mungkin akan memberikan pengaruhnya juga pada cabang pabrik di Indonesia untuk dapat segera memasukkan lingkungan sebagai dasar pertimbangan bagi setiap kegiatan yang tentunya semua ini berasal dari komitmen pemimpin puncak cabang yang ada di Indonesia.

Perusahaan global Reckitt Benckiser plc sendiri, bila dikaji dengan kerangka tahapan tanggung jawab lingkungan yang dibuat oleh UNEP ini sebenarnya sudah melampaui tahapan kedua. Hanya saja, untuk dapat memasuki tahapan ketiga secara penuh, maka perusahaan harus melakukan redefinisi strategi dan kebijakan usahanya sehingga mencakup tiga hal mendasar dari pembangunan berkelanjutan. Namun beberapa ciri yang ada dalam tahapan ketiga ini, telah dimiliki oleh Reckitt Benckiser plc, yaitu transparansi, dan pelaporan lingkungan yang telah dikaji oleh lembaga independen, juga melakukan dialog dengan berbagai *stakeholder*.

Dengan melihat gambaran bentuk tanggung jawab lingkungan PT. RBI dan perusahaan induknya serta saling hubungan atau pengaruh antara perusahaan induk dan cabang yang ada di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa dalam kasus ini, standar ganda perusahaan global seperti yang dikemukakan oleh Keraf tidaklah berlaku. Dengan kasus PT RBI ini, memperlihatkan bahwa perusahaan global memberikan perhatian yang cukup besar baik pada mutu produk maupun cara-cara produk tersebut dihasilkan. Pengurangan atau minimisasi efek negatif

dari produk dan cara-cara berproduksi diterapkan secara konsisten di pabrik yang ada di Indonesia ini.

Saat ini, perusahaan Trans Nasional memang tampak lebih berhati-hati di dalam menjalankan kegiatan usahanya dimana pun mereka berada. Seperti dikemukakan oleh Bryant dan Bailey bahwa perusahaan trans nasional yang besar mungkin kenyataannya terlalu berhati-hati di dalam praktek lingkungannya karena takut menarik publisitas yang membahayakan bagi usahanya. Perusahaan trans nasional yang menanamkan modalnya di negara dunia ketiga mungkin berada di dalam pengamatan yang lebih besar serta lebih rentan terhadap publisitas yang merugikan dan tindakan yang menghukum dibandingkan dengan perusahaan setempat. Perusahaan trans nasional tidak lagi terlampaui melakukan tindakan yang destruktif terhadap lingkungan dari pada sebelumnya didalam menjalankan kegiatan usahanya (Gladwin, sebagaimana dikutip oleh Bryant & Bailey, 1997: 116). Sesungguhnya, perusahaan lokal lebih mungkin melarikan diri dari peraturan yang dikenakan kepada perusahaan trans nasional karena status 'lokal'nya tersebut. Pertimbangan-pertimbangan ini membawa perusahaan trans nasional melaksanakan operasi yang lebih bersih daripada perusahaan lokal berkaitan dengan kedudukannya yang unik yaitu sebagai perusahaan trans nasional di negara dunia ketiga (Bryant dan Bailey, 1997: 116).

Analisis yang diberikan oleh Bryant dan Bailey ini menjelaskan mengapa di Indonesia perusahaan-perusahaan trans nasional ini lebih menyukai berlokasi di kawasan industri yang baik dengan pengelolaan lingkungan yang baik pula meskipun mereka harus membayarnya dengan harga mahal. Ketakutan akan

publisitas yang buruk sebagaimana yang dijelaskan oleh Bryant dan Bailey memang sangat beralasan karena hal itu akan mengguncang harga saham mereka di pasar modal internasional. Oleh sebab itu, saat ini perusahaan trans nasional memang tidak mau mempertaruhkan reputasi mereka dengan tindakan yang kurang baik di dalam kegiatan usahanya di negara berkembang.

Sebagai upaya lebih lanjut dari perusahaan trans nasional ini dalam menjamin proses produksi yang lebih baik dan lebih bersih ini, maka mereka menggunakan teknologi yang "sensitif terhadap lingkungan" yang mungkin tidak dapat diupayakan oleh perusahaan lokal yang lebih kecil. Hal ini berkaitan dengan gagasan sebagai pengembangan strategi produksi global. Perusahaan trans nasional menggunakan teknologi yang standar yang memberikan manfaat ekonomi dalam desain dan produksinya (Bryant dan Bailey, 1997: 116). Hal ini benar-benar terlihat dari proses produksi yang telah digambarkan di dalam pabrik PT RBI ini.

Sebagai hasilnya, menurut Bryant dan Bailey, perusahaan trans nasional telah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap issue manajemen lingkungan sejak pertengahan tahun 1980. Mereka mengkaji kebijakan dan praktek-praktek perusahaannya dan secara simultan mengembangkan respon perusahaan terhadap perdebatan nasional dan global atas definisi pembangunan berkelanjutan (Bryant dan Bailey, 1997: 117).

Dengan melihat perkembangan saat ini, maka mungkin apa yang digambarkan oleh Greer dan Bruno (1999) bahwa upaya penghijauan bisnis atau usaha dari perusahaan-perusahaan trans nasional sebagai semata-mata hanya kamufase

hijau tidak sepenuhnya seperti itu, karena telah cukup banyak perusahaan trans nasional yang bersungguh-sungguh dengan usahanya ini. Begitu pula dengan apa yang dikemukakan oleh Keraf sebagai standar ganda, karena seperti yang dikemukakan oleh Bryant dan Bailey, perusahaan trans nasional kini mengembangkan standar operasi produksi yang mendunia. Hal ini sangat nyata terlihat dari pelaksanaan produksi yang dilakukan oleh PT RBI seperti yang telah digambarkan.

Dari seluruh analisis yang telah diuraikan di atas, maka penelitian yang menggunakan kasus PT. RBI ini mungkin mendukung beragam analisis serupa yang pernah ada sebelumnya seperti salah satunya yang dijelaskan oleh Bryant dan Bailey. Namun hal ini mungkin tidak berarti bahwa PT RBI memberikan gambaran mengenai semua praktek-praktek usaha perusahaan trans nasional di Indonesia. Seperti halnya penelitian kualitatif yang tak hendak membuat atau menghasilkan generalisasi, maka apa yang terjadi di PT. RBI pun tidak dapat mewakili perusahaan-perusahaan trans nasional lainnya, hal ini disebabkan oleh banyak dan beragamnya jenis sektor yang dimasuki oleh perusahaan trans nasional. Mulai dari industri yang berisiko tinggi dalam hal dampak negatif terhadap lingkungan, hingga perusahaan yang tidak terlampau berisiko bagi lingkungan. Begitu pula adanya perusahaan trans nasional yang berlokasi di luar kawasan industri. Semua ini membuat variasi yang cukup besar dalam hal perusahaan trans nasional.

Akan tetapi bila dilihat lagi bahwa di Indonesia saat ini telah cukup banyak kawasan industri yang dikelola dengan cara yang sangat baik terutama dari segi

pengelolaan lingkungannya dan melihat mayoritas hunian dari kawasan industri tersebut adalah perusahaan trans atau multi nasional, maka sedikit banyak mungkin apa yang digambarkan dalam PT. RBI ini adalah juga merupakan gambaran dari perusahaan trans nasional yang ada di kawasan tersebut. Sekedar memberikan gambaran, bahwa di kawasan industri Jababeka misalnya yang lebih dari 600 perusahaan yang berlokasi disana adalah mayoritas perusahaan bermodalkan asing, maka berarti untuk kawasan industri jababeka saja sudah terdapat cukup banyak perusahaan trans atau multi nasional yang melakukan pengelolaan lingkungan yang cukup baik.

Menurut data yang terdapat dalam buku *Industrial Estate in Indonesia: A Guide for the Investor* (Lerche, 1999), pada tahun 1998, Indonesia memiliki 46 kawasan industri yang telah beroperasi dan sebanyak 28 kawasan lagi yang sedang dalam perencanaan, dengan jumlah *tenant* (penghuni) diperkirakan 4400 perusahaan. Sebagai gambaran, persyaratan untuk dibukanya suatu kawasan industri mempunyai persyaratan yang sangat ketat termasuk di dalamnya persyaratan yang berkaitan dengan lingkungan. Semua ini mungkin dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sebagian perusahaan-perusahaan terutama perusahaan trans nasional dalam menjalankan operasi produksi berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

#### **4.7. Implikasi Teoritis *Ecological Modernization* dan Kebijakan**

Uraian mengenai bagaimana PT. RBI dalam melaksanakan kegiatan produksinya, menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara-cara yang

lebih baik, dengan menggunakan teknologi yang lebih mengurangi limbah dan teknologi yang dapat mengelola limbah tentu saja cukup berarti di dalam mengurangi beban lingkungan yang diakibatkan oleh suatu proses produksi. Berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh teori *Ecological Modernization* bahwa kegiatan industri dapat berjalan bersamaan dengan lingkungan melalui penggunaan teknologi dapat terlihat disini.

Teknologi yang digunakan oleh PT. RBI meminimalisir atau bahkan meniadakan limbah dari proses produksinya. Limbah cair yang dihasilkan, adalah hanya pada proses pencucian peralatan dan kegiatan laboratorium, lagi-lagi dengan bantuan teknologi pula maka limbah ini dapat dikelola sehingga beban lingkungan yang sebenarnya cukup berat bila tanpa bantuan teknologi tersebut dapat dengan sangat signifikan berkurang.

Saat ini, dengan pendekatan Produksi Bersih (*Cleaner Production*) yang makin banyak diperkenalkan di Indonesia, lebih memperlihatkan lagi bahwa teknologi yang lebih bersih (*clean technology*) disertai dengan cara-cara berproduksi yang lebih baik dapat memperkecil beban lingkungan. Mengenai produksi bersih ini, di Indonesia sudah cukup banyak industri yang melakukannya, serta telah cukup banyak pula kajian yang melihat seberapa besar beban lingkungan yang berkurang dari pelaksanaan program ini oleh suatu industri.

Studi kasus yang dihasilkan oleh *Indonesia Cleaner Industrial Production (ICIP)*, suatu program yang disponsori oleh pemerintah Indonesia dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) misalnya melakukan kajian produksi bersih untuk: Industri Cat, Kertas, Kayu Lapis, Pelapisan Mebel,



Pelapisan Logam, Baterai Basah (Aki), Penyamakan Kulit Sapi, Penyamakan Kulit Domba, Pabrik Kemasan Flexible, Pabrik Aki Starter, Penerangan dan Penyalaan, Perusahaan Pelapisan Listrik dan Pabrik Pencelupan Tekstil yang melayani pabrik-pabrik tenun ([www.home.indo.net.id/~ICIP/Studi1.htm](http://www.home.indo.net.id/~ICIP/Studi1.htm))

Dalam halnya manajemen lingkungan dari kasus PT. RBI dan perusahaan induknya terlihat jelas bahwa manajemen lingkungan yang baik di perusahaan induk telah membawa efek yang cukup berarti bagi pelaksanaan produksi yang baik dan berimbas pada pelaksanaan produksi di cabang pabriknya yang ada di Indonesia.

Dengan demikian, kasus kecil ini memperlihatkan bahwa proses produksi yang lebih bersih didukung dengan manajemen lingkungan yang baik memberikan hasil positif bagi lingkungan yaitu berupa pengurangan beban dari yang akan diterima oleh lingkungan dibandingkan apabila tanpa dilaksanakannya kedua hal tersebut.

*Ecological Modernization* memang merupakan teori yang lebih bersifat praktis dan berparadigma memecahkan masalah sebagaimana dikemukakan oleh Blair dan Hitchcock yaitu bahwa *Ecological Modernization* berkonsentrasi pada praktek dan hal yang dapat diraih dan lebih memiliki daya tarik bagi orang yang bergerak dibidang dunia usaha dibandingkan dengan teori lainnya yang memiliki sedikit saran praktis mengenai bagaimana hal tersebut dapat dicapai atau dapat menunjukkan beberapa kesuksesan dari pengikutnya. Teori *Ecological Modernization* juga berparadigma memecahkan masalah yang memandang pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan dapat berjalan

bersama. Dengan demikian ia memberikan jawaban untuk memecahkan kontradiksi antara pertumbuhan industri dan lingkungan (Blair dan Hitchcock, 2001: 30-31). Namun upaya industri untuk mengurangi dampak negatif proses produksinya melalui perbaikan teknologi dan manajerial ini dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pencapaian profit yang diharapkan oleh industri. Oleh sebab itu pula lah maka dalam teori ini juga dikemukakan perubahan yang bersifat *incremental* dan *radikal*. Industri dapat melakukan perbaikan secara bertahap dan terus menerus (*incremental*) sehingga dalam upayanya tersebut tidak mengurangi profit yang menjadi tujuan utama dari industri.

Akan tetapi, satu hal yang juga merupakan perhatian dari teori ini adalah adanya transformasi institusional yaitu dimana teori ini menganggap bahwa peran tradisional negara sebagai regulator yang memberikan *command and control* haruslah diubah, tampaknya bukanlah hal yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Dengan melihat kasus kecil ini yaitu dimana peran negara masih cukup besar dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan (seperti yang dilakukan oleh Depnaker dan Depkes dalam kasus ini) tampaknya masih tetap perlu dipertahankan untuk menjaga kekonsistenan pelaksanaan kegiatan.

PT. RBI mungkin dapat tetap melaksanakan kegiatannya secara konsisten karena mendapat pengawasan (audit) dari perusahaan induknya. Namun bagi perusahaan-perusahaan lain yang tidak mempunyai sistem pengawasan seperti ini, maka peran negara lah yang masih dibutuhkan. Seperti dikemukakan oleh Revell dan Rutherford bahwa keseluruhan strategi dari reformasi lingkungan melibatkan gabungan yang efektif dari hal yang bersifat sukarela (*Voluntary*)

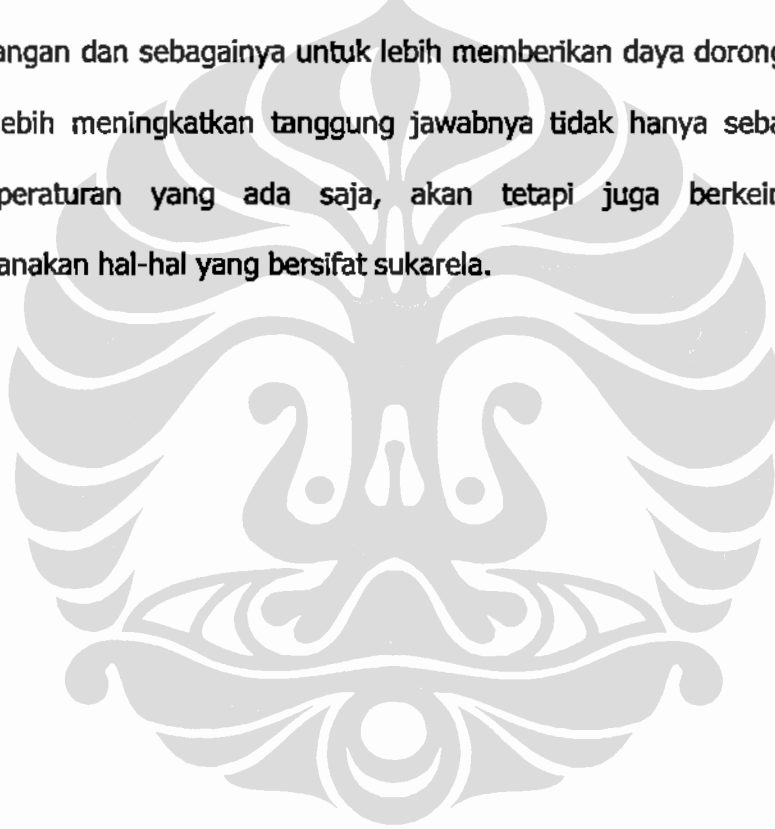
dengan regulasi dan sistem perizinan yang kuat. Bila tidak, hal ini hanya akan mendorong munculnya "Free Riders" (penumpang bebas). Ancaman dari tindakan hukum memberikan motivasi kuat untuk mencapai target yang disepakati dalam pengaturan yang bersifat sukarela (Revell dan Rutherford, 2003, 28). De Bruijn dan Iulofs (2000) sebagaimana dikutip oleh Revell dan Rutherford mengemukakan bahwa konteks kebijakan ini memiliki hasil yang positif. Kebijakan gabungan ini memungkinkan pemerintah bekerjasama dengan perusahaan yang proaktif, sementara itu memelihara ketaatan terhadap mereka yang masih tertinggal (Revell dan Rutherford, 2003: 28). Otto Soemarwoto dalam gagasannya mengenai Atur Diri Sendiri yaitu suatu paradigma baru di dalam pengelolaan lingkungan hidup mengemukakan bahwa untuk dapat berkembangnya Atur Diri Sendiri bukan berarti harus menghapus birokrasi melainkan meniadakan kekakuan yang didominasi oleh pendapat dan interpretasi para birokrat (Soemarwoto, 2001: 129).

Dengan demikian, dilihat dari segi kebijakan maka negara tetap perlu melakukan pengaturan-pengaturan dan mengawasinya dengan ketat (*Command and Control*) namun di lain pihak juga mengembangkan instrumen-instrumen yang mampu mendorong industri untuk melakukan penataan terhadap peraturan sekaligus melakukan hal-hal yang bersifat sukarela seperti produksi bersih dan manajemen lingkungan yang baik.

Upaya ini sebenarnya telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang telah melakukan program PROPER seperti yang telah digambarkan pada bab 2. Instrumen insentif dan disinsentif ini memang belum terlihat efektivitasnya

karena baru dilakukan kembali tahun 2002 dan 2003. Akan tetapi, program sebelumnya yaitu PROPER PROKASIH yang dilaksanakan dari tahun 1995 hingga 1997, mampu meningkatkan tingkat penataan perusahaan sebesar 9.4% dari 213 perusahaan yang telah dinilai peringkatnya selama periode tersebut.

Namun selain instrumen ini, pemerintah perlu pula kiranya mengembangkan instrumen-instrumen ekonomi lainnya seperti di bidang perbankan, asuransi, perdagangan dan sebagainya untuk lebih memberikan daya dorong bagi industri untuk lebih meningkatkan tanggung jawabnya tidak hanya sebatas penataan pada peraturan yang ada saja, akan tetapi juga berkeinginan untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat sukarela.



## 5. KESIMPULAN

### 5.1. Kesimpulan

Kasus kecil dalam salah satu perusahaan trans nasional yang telah mengglobal ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana ia menjalankan kegiatan usahanya, dan sejauh mana upaya perlindungan lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya telah dilakukan.

Merujuk pada hipotesa pertama yaitu pada skala tertentu perusahaan trans nasional telah memiliki tanggung jawab lingkungan, maka hasil kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa, PT RBI telah mempunyai tanggung jawab yang cukup baik dalam hal menangani efek negatif dari proses produksinya. Hal ini disebabkan pertama karena PT RBI telah melakukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan dalam hal yang wajib dilakukannya yaitu pengolahan limbah. Kedua, PT. RBI juga telah menjalankan produksi yang lebih bersih atau *cleaner production*, meskipun belum sepenuhnya, karena PT. RBI hanya melakukan pengurangan limbah pada sumbernya (reduksi pada sumbernya) akan tetapi belum melakukan pemanfaatan limbah baik dalam bentuk *recycle*, *reuse* maupun *recovery*. Pengurangan limbah pada sumbernya ini ditunjukkan dengan penggunaan teknologi yang lebih bersih, penggunaan bahan baku yang diupayakan terus menerus lebih baik, *housekeeping* yang baik, upaya penghematan air dan energi listrik, serta melakukan *treatment* terhadap limbah akhir yang dihasilkan. Upaya produksi bersih yang dilakukan dengan mereduksi limbah pada sumbernya ini,

juga membawa penghematan dalam hal biaya produksi, karena penggunaan teknologi yang lebih bersih mampu menghindari tercecernya bahan baku, yang berarti menghindari terbuangnya bahan baku secara sia-sia hal ini tentu saja akan mengurangi biaya produksi. Selain itu teknologi yang digunakan tidak menghasilkan limbah. Dengan demikian, limbah yang dihasilkan adalah hanya dari pencucian tangki yang digunakan dan proses di laboratorium. Hal ini menghasilkan penghematan dalam hal biaya pengolahan limbah. Selain itu penghematan air dan listrik juga menghemat biaya produksi sumberdaya alam.

Dari segi manajemen lingkungan, yaitu hal ketiga dari indikator tanggung jawab lingkungan, PT. RBI masih mempunyai kekurangan yaitu belum adanya komitmen terhadap lingkungan yang dinyatakan secara tegas oleh pimpinan puncak perusahaan dalam bentuk kebijakan lingkungan. Padahal, kebijakan lingkungan inilah yang akan menjadi dasar bagi setiap perilaku yang dijalankan di dalam kegiatannya. Akan tetapi PT. RBI telah melakukan sosialisasi masalah lingkungan kepada karyawan, melakukan beberapa jenis audit dan mempunyai penanggung jawab lingkungan yaitu divisi HSE. Hal ini memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbaikan yang terus menerus lagi, terutama dalam hal lingkungan, sehingga diharapkan skala tanggung jawab lingkungan PT. RBI dapat menjadi baik atau bahkan sangat baik.

Pengaruh dari perusahaan induk sendiri memberikan kemungkinan yang lebih besar lagi, karena perusahaan induk PT RBI merupakan perusahaan global yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Dengan selalu diadakan audit oleh perusahaan induk ke pabrik-pabriknya yang ada di Indonesia, maka dapat

diharapkan bahwa perbaikan ke arah kinerja lingkungan yang lebih baik lagi dapat dilakukan.

Untuk menjawab hipotesis kedua, terlihat bahwa terdapat kesamaan dan juga perbedaan antara apa yang dilakukan oleh perusahaan induk dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Kesamaan itu terlihat dari bagaimana proses produksi dilakukan, mulai dari penggunaan bahan baku, teknologi, cara-cara berproduksi yang semuanya dilakukan untuk mendapatkan standar mutu yang sama untuk semua produk Reckitt dimana pun ia berada. Hal ini membawa keuntungan, karena di perusahaan induk, Reckitt Benckiser plc, telah melakukan banyak riset yang ditujukan untuk menghasilkan produk yang semakin ramah lingkungan. Perbedaan yang ada antara perusahaan induk dan perusahaan yang ada di Indonesia adalah bahwa pada perusahaan induk terdapat komitmen yang jelas terhadap lingkungan yang tertuang di dalam kebijakan lingkungan perusahaan. Kebijakan lingkungan ini membawa pada adanya sasaran dan strategi lingkungan serta membuat lingkungan menjadi bahan pertimbangan di dalam setiap kegiatan perusahaan. Hal ini berbeda dengan PT. RBI yang belum memiliki kebijakan lingkungan. Namun demikian, meskipun terdapat beberapa perbedaan di dalam manajemen lingkungan antara PT RBI dengan perusahaan induknya, akan tetapi untuk hal-hal prinsip yang berkaitan dengan proses produksi dan pengelolaan lingkungan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan fokus yang dijaga baik oleh perusahaan induk maupun PT RBI.

Dengan melihat bagaimana PT. RBI ini beroperasi, maka tampak apa yang dikemukakan oleh teori *Ecological Modernization* bahwa industri dapat berjalan bersama dengan lingkungan memang cukup relevan. Perubahan cara-cara berproduksi yang dilakukan oleh perusahaan induk yang juga diterapkan oleh PT. RBI memperlihatkan bahwa teknologi, cara berproduksi, dan manajerial dapat mengurangi dampak negatif proses produksi terhadap lingkungan. Dengan demikian, apa yang dikemukakan oleh teori *Ecological modernization* ini dapat menunjukkan bagaimana industri dapat mewujudkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sehingga kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh suatu proses produksi tidak lagi menjadi beban masyarakat dan lingkungan.

## **5.2. Saran**

1. Pemerintah membuat instrumen-instrumen ekonomi yang dapat mendorong dunia usaha untuk tidak sekedar taat kepada peraturan akan tetapi lebih jauh lagi melakukan produksi bersih dan manajemen lingkungan serta hal-hal yang bersifat sukarela lainnya.
2. Meningkatkan Program PROPER khusus untuk kawasan industri sehingga dapat diketahui peringkat di antara kawasan-kawasan industri yang ada di Indonesia.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan*, 1997. Jakarta: Kantor Menteri Lingkungan Hidup.
- Blair, Alasdair dan David Hitchcock. 2001. *Environment and Business*. London: Routledge.
- Blowers, Andrew. 1997. *Environmental Policy: Ecological Modernisation or Risk Society?* Urban Studies Vol 34, Nos 5-6 : 845-871.
- Bryant, Raymond L dan Sinead Bailey. 1997. *Third World Political Ecology*. London: Routledge.
- Brown, Lester R. 1993. *Jangan Biarkan Bumi Merana: Laporan Worldwatch Institute* (terj.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Cannon, Tom. 1995. *Corporate Responsibility. Tanggung Jawab Perusahaan*. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design, Qualitative and Quantitative Approachs*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- Davidson, D. Kirk. 1990. *Straws in the Wind: The Nature of Corporate Commitment to Environmental Issues* dalam W. Michael Hoffman, Robert Frederick dan Edward S. Petry, Jr. *The Corporation, Ethics, and the Environment*. New York: Quorum Books.
- Djajadiningrat, Suma T. 2000. *Reorientasi Paradigma Pengelolaan Lingkungan. Ekologi dan Pembangunan* (4) Agustus: 18-24.
- Freier, Ines. 2000. *Environmental Management from an Ecological Modernisation and Inovation Perspective*. Chemnitz University of Technology.
- Friedman, Kenneth. 2000. *Corporations Accept Environmental Responsibility*. Dept. of Journalism & Communication, Lehigh University, Bethlehem, Pa. Available at <http://www.Lehigh.edu/~kaf3/envt/corporations%20Accept%20Environmental%20Responsibility.htm> (7/31/2003 11:29:58PM)
- Goodpaster, Kenneth E. 1990. *Can a Corporation Have an Environmental Conscience?* dalam W. Michael Hoffman, Robert Frederick dan Edward S. Petry, Jr. *The Corporation, Ethics, and the Environment*. New York: Quorum Books.

- Greer, Jed dan Kenny Bruno. 1999. *Kamuflase Hijau: Membedah Ideologi Lingkungan Perusahaan-perusahaan Transnasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hanigan, John. 1995. *Environmental Sociology*. London: Routledge.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2000. *Hukum Tata Lingkungan. Ed.7*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hughes, Helen. 1992. *Keberhasilan Industrialisasi di Asia Timur*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ismawan, Indra. 1999. *Risiko Ekologis di Balik Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Keraf, Sonny, A. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Lerche, Dietrich. 1999. *Industrial Estate in Indonesia: A Guide for the Investor*. Koln: DEG – German Investment and Development Company.
- Little, B.F.P., B. Pearson dan M.J. Brierley. 1995. *Using Environmental Management Systems to Improve Profits*. London: Kluwer Law International.
- Martell, Luke. 1994. *Ecology and Society: an Introduction*. Cambridge: Polity Press.
- Mol, Arthur P.J, dan David A. Sonnenfeld. 2000. *Ecological Modernization Around the World: An Introduction*. Frank Cass & Co, Ltd. Available from [http://www.sls.wau.nl/es/ecomod\\_intro.htm](http://www.sls.wau.nl/es/ecomod_intro.htm): Internet: diakses 5 Agustus 2003.
- Murphy, Joseph. 2001. *Ecological Modernisation: The Environment and the Transformation of Society*. Available from <http://www.mansfield.ox.ac.uk/ocees/pages/pubs%20PDF%20files/RP20.pdf>. Internet: diakses 5 Agustus 2003
- Nazech, El Khobar Muhaemin. 2001. *Study on Indonesia Industrial Sectors Contribution to Sustainable Development*. Jakarta: Unido Representative.
- Neuman, W Lawrence. 1997. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach*. Needham Heights, Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Odum, Eugene P. 1996. *Dasar-dasar Ekologi, ed 3*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.

- Pudjiastuti, Lily. 1999. *Produksi Bersih*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ramli, Rizal. *Industri Indonesia, antara Tipuan dan Kenyataan*, Prisma (Desember 1982): hal 26.
- Revell, Andrea dan Robert Rutherford. 2003. *UK Environmental Policy and the Small Firm: Broadening the Focus*. Business Strategy and the Environmental 12 : 26-35
- Rands, Gordon P. 1990. *Environmental Attitudes, Behaviors and Decision Making: Implications for Management Education and Development* dalam W. Michael Hoffman, Robert Frederick, dan Edward S. Petry, Jr. *The Corporation, Ethics, and the Environment*. New York: Quorum Books.
- Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta LP3ES.
- Soedomo, Moestikahadi. 2001. *Pencemaran Udara*. Bandung:ITB.
- Soemarwoto, Otto, *Ekoefisiensi: Strategi Peningkatan Daya Saing di Pasar Global*. 1995 dalam Surna T. Djayadinirat. *Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Soemarwoto, Otto. 2001. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan ed.9* Jakarta: Djambatan.
- Soemarwoto, Otto. 2001. *Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soerjani, Moh., Rofiq Ahmad, dan Rozy Munir. 1987. *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjani, Mohamad. 1997. *Pembangunan dan Lingkungan: Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development*. Jakarta: Institute Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan.
- Suparmoko, M, dan Maria R. Suparmoko. 2000. *Ekonomi Lingkungan*. Yogyakarta: BPFE
- WCED (The World Commission on Environment and Development). 1988. *Hari Depan Kita Bersama (terj.)* Jakarta: Gramedia
- Utting, Peter. 2002. *The Greening of Business in Developing Countries: Rhetoric, Reality and Prospects*. New York: Zed Books Ltd.
- Wie, Thee Kian. 1994. *Industrialisasi di Indonesia, Beberapa Kajian*. Jakarta: LP3ES

## **Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: Kep-42/MENLH/11/1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan.
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Industri.

## **Lain-lain**

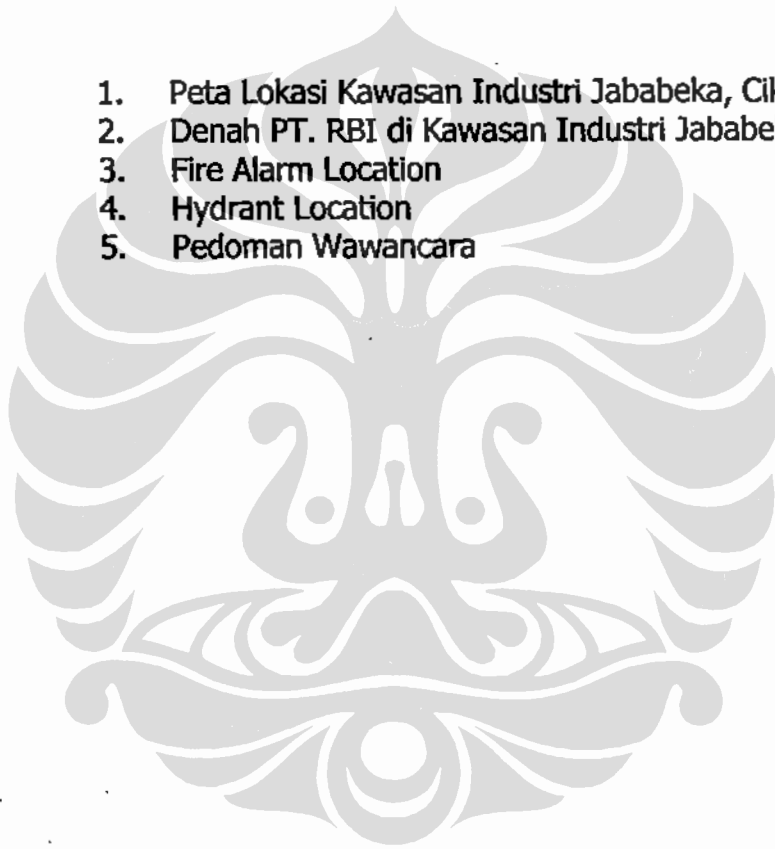
Pekatnya Teluk Jakarta, 2000. Kompas 21 Agustus.

Laporan Kinerja Lingkungan Reckitt Benckiser plc tahun 2001 dan 2002.

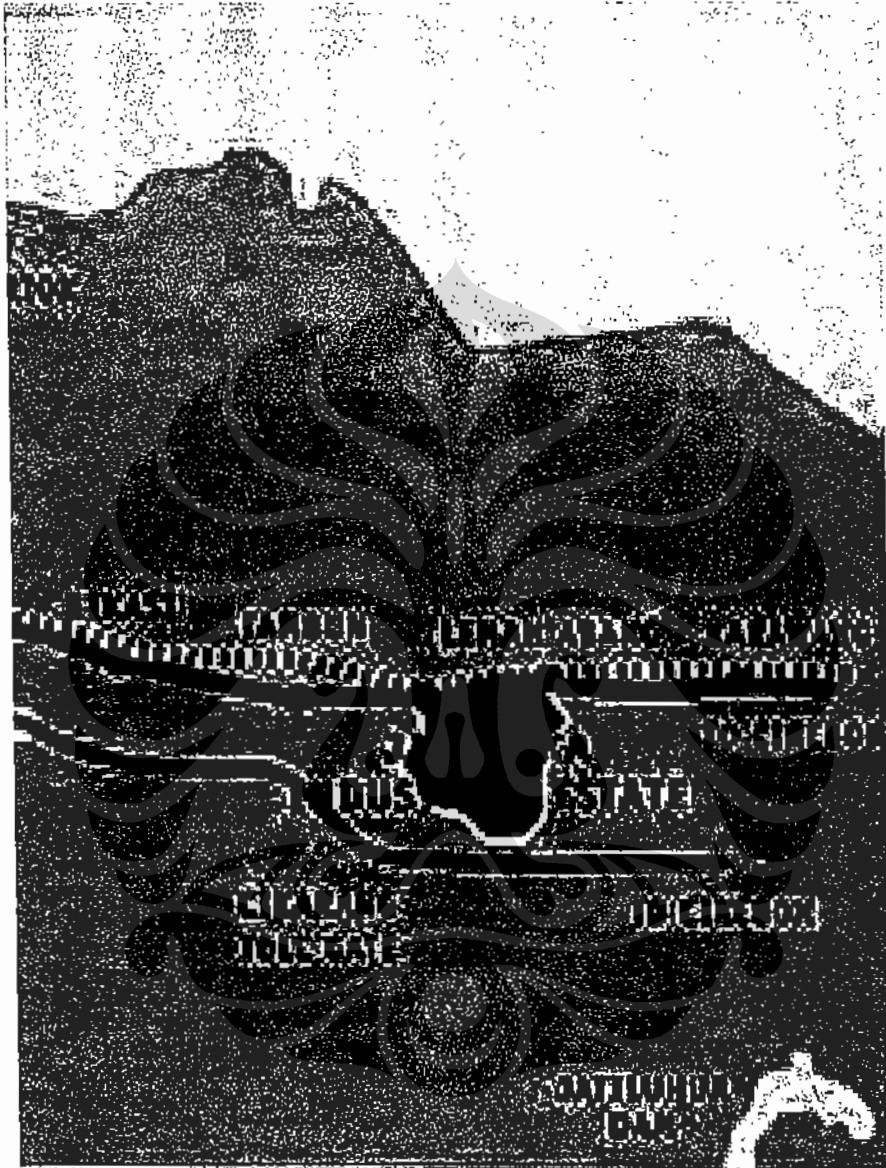
Manual kebijakan Health, Safety and Environment. PT. Reckitt Benckiser Indonesia.

## **LAMPIRAN**

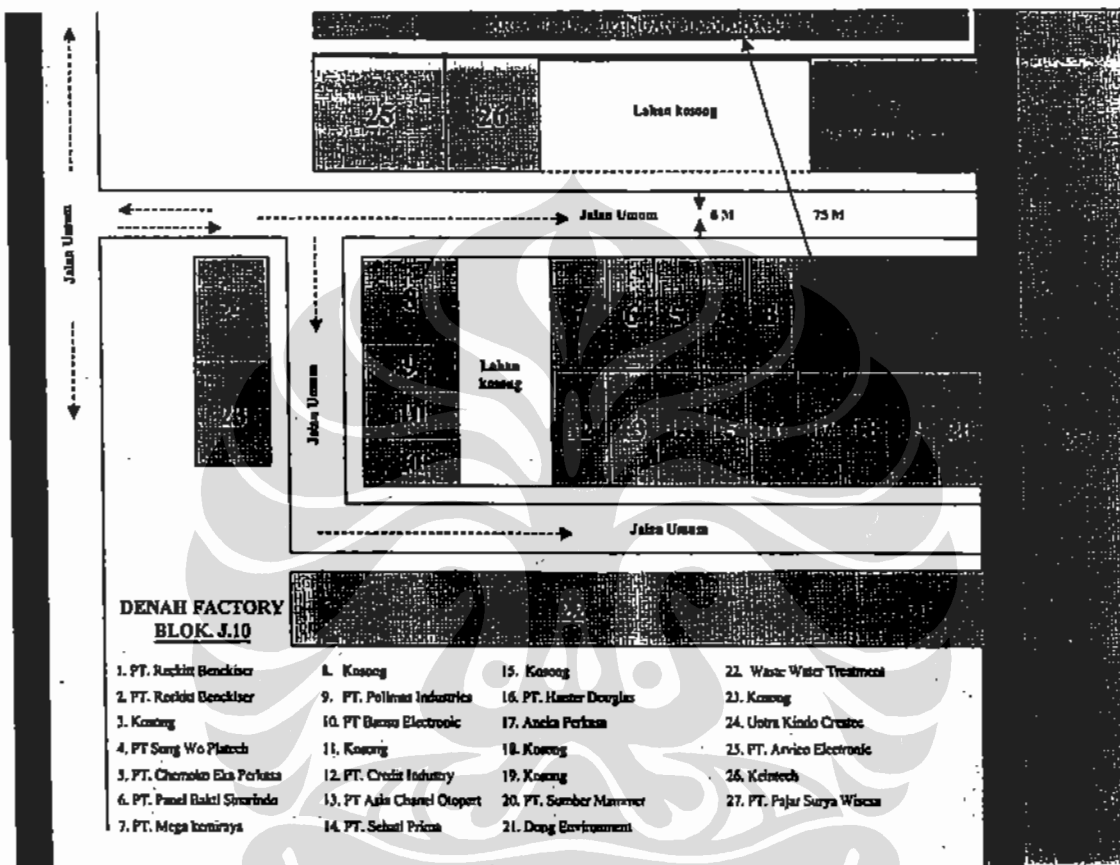
1. Peta Lokasi Kawasan Industri Jababeka, Cikarang
2. Denah PT. RBI di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang
3. Fire Alarm Location
4. Hydrant Location
5. Pedoman Wawancara



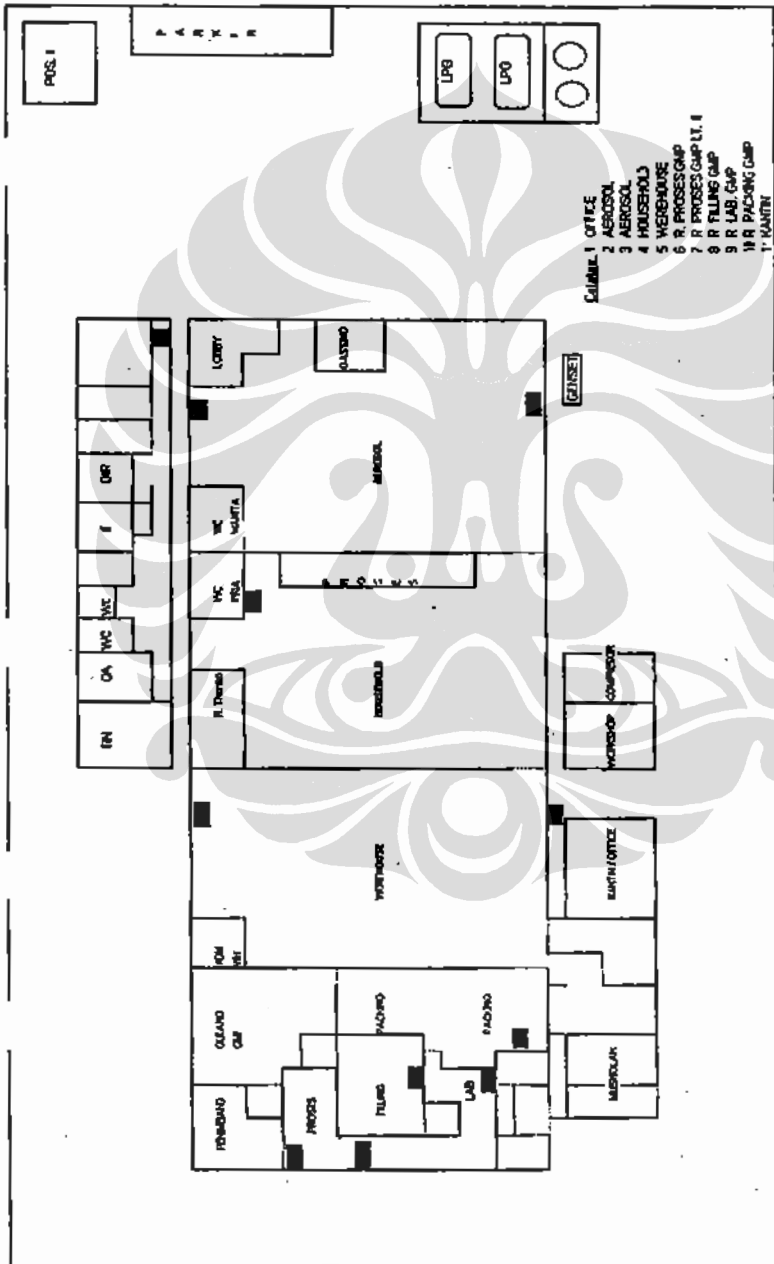
## PETA LOKASI KAWASAN INDUSTRI JABABEKA - CIKARANG



# DENAH PT. RBI DI KAWASAN INDUSTRI JABABEKA - CIKARANG



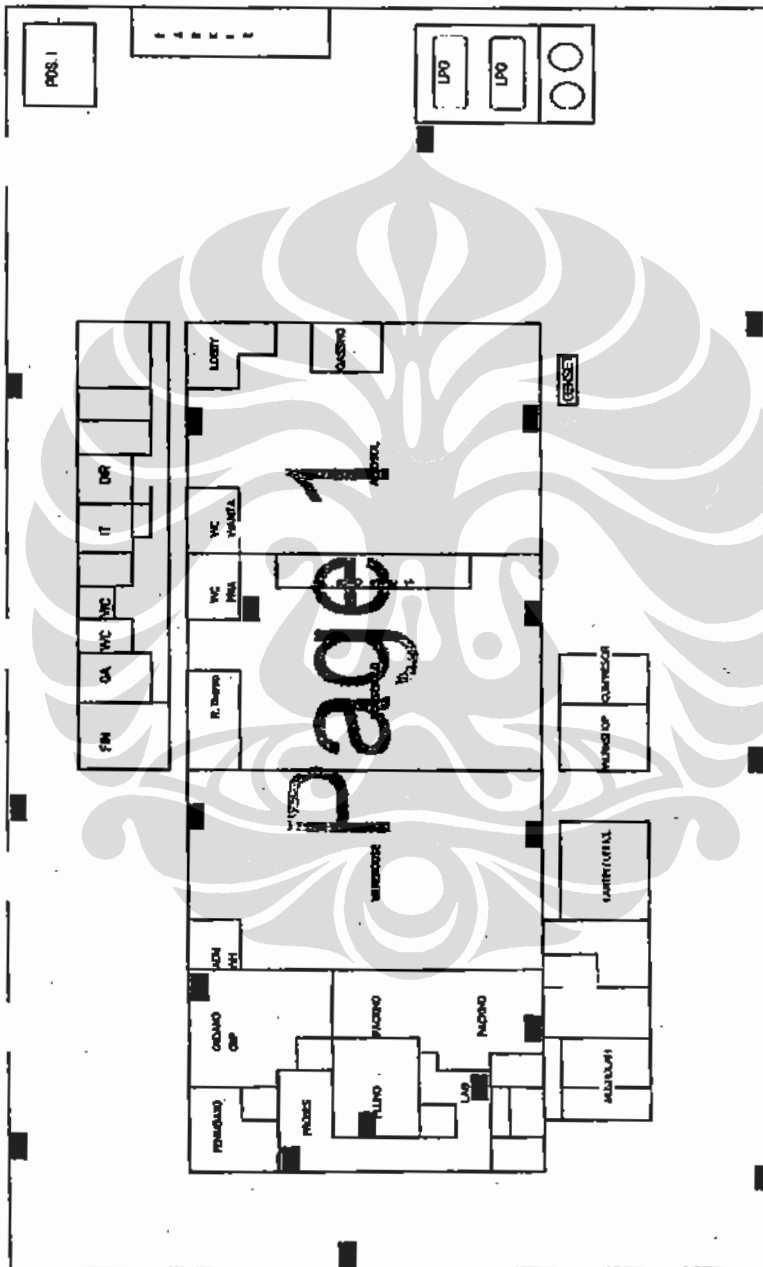
# FIRE ALARM LOCATION



**RECKITT  
BENCKISER**



# HYDRANT LOCATION



**RECKITT  
BENCKISER**

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN:  
BENTUK PENERAPAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN  
DUNIA USAHA**

**Pendahuluan**

*Penelitian mengenai "Bentuk Penerapan Tanggung Jawab Lingkungan Dunia Usaha" ini dilakukan untuk kepentingan penyelesaian tesis peneliti di Program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan. Dengan penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan bagaimana perusahaan menjalankan tanggung jawab lingkungannya. Hal ini akan dilihat dari bagaimana proses produksi itu sendiri dilakukan serta bagaimana manajemen lingkungan yang dijalankan oleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan studi.*

**I. Pertanyaan umum tentang Perusahaan**

1. Nama Perusahaan:
2. Sektor Industri:
3. Jenis Industri:
4. Pasar Utama:
5. Jumlah Pekerja:

**II. Pertanyaan tentang Proses Produksi**

1. Apakah selama perusahaan memproduksi pernah melakukan penggantian teknologi?

Ya \_\_\_\_\_  
Tidak \_\_\_\_\_ (Lanjutkan ke pertanyaan 6)

2. Bila pernah, apakah jenis perubahan yang dilakukan?

Modifikasi peralatan   
Desain ulang peralatan (redesign)   
Otomatisasi sebagian peralatan   
Otomatisasi seluruh peralatan   
Lainnya: .....

3. Uraian perubahan teknologi yang dilakukan

---

---

---

---

4. Mengapa perubahan teknologi seperti diuraikan di atas dilakukan?

5. Manfaat apa yang diperoleh dengan adanya perubahan teknologi tersebut?
6. Bila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan dalam hal teknologi, mengapa?
7. Apakah pernah dilakukan perubahan teknologi untuk pengelolaan limbah?

Ya \_\_\_\_\_  
 Tidak \_\_\_\_\_ (Lanjutkan ke pertanyaan 11)

8. Uraian perubahan teknologi pengelolaan limbah yang dilakukan

---



---



---



---

9. Mengapa perubahan teknologi pengelolaan limbah seperti diuraikan di atas dilakukan?

10. Manfaat apa yang diperoleh dengan adanya perubahan teknologi pengelolaan limbah tersebut?

11. Bila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan dalam hal teknologi pengelolaan limbah, mengapa?

12. Apakah pernah dilakukan perubahan dalam hal bahan baku?

Ya \_\_\_\_\_  
 Tidak \_\_\_\_\_ (Lanjutkan ke pertanyaan 14)

13. Bila pernah, untuk tujuan apa hal tersebut dilakukan?

14. Dalam hal operasi produksi, apakah dilakukan

	Ya	Tidak
Segregasi limbah		
Pencegahan kebocoran dan luapan bahan		
Pengaturan kerja/instruksi kerja/prosedur kerja yang ketat		
Supervisi yang ketat		
Frekuensi perawatan yang teratur		
Tata tertib kerja yang ketat		

15. Apakah pernah dilakukan modifikasi dalam hal prosedur kerja?

Ya \_\_\_\_\_  
 Tidak \_\_\_\_\_ (Lanjutkan ke pertanyaan 17)

16. Bila pernah, mengapa hal tersebut dilakukan?

17. Apakah ada upaya penghematan energi dalam keseluruhan kegiatan?

Ya \_\_\_\_\_  
Tidak \_\_\_\_\_ (Lanjutkan ke pertanyaan 19)

18. Bagaimana bentuk penghematan tersebut?

19. Apakah ada upaya penghematan dalam hal sumber daya air?

Ya \_\_\_\_\_  
Tidak \_\_\_\_\_ (Lanjutkan ke pertanyaan 21)

20. Bagaimana bentuk penghematan tersebut?

21. Apakah dilakukan penggunaan kembali (*reuse*) limbah yang telah dihasilkan?

22. Bila ya, mohon diuraikan

23. Bila tidak, mengapa?

24. Apakah dilakukan perolehan kembali (*recovery*) limbah yang telah dihasilkan?

25. Bila ya, mohon diuraikan

26. Bila tidak, mengapa?

27. Apakah dilakukan daur ulang (*recycle*) limbah yang telah dihasilkan?

28. Bila ya, mohon diuraikan

29. Bila tidak, mengapa?

### III. Pertanyaan tentang Manajemen Lingkungan

1. Bagaimana komitmen perusahaan atas efek dari proses produksi terhadap lingkungan?
2. Apakah perusahaan memiliki kebijakan lingkungan yang tertulis?
3. Apakah kebijakan lingkungan perusahaan tersebut disosialisasikan kepada seluruh pekerja?
4. Bila ya, bagaimana cara sosialisasi itu dilakukan

	Ya	Tidak
News Letter		
Majalah intern perusahaan		
Seminar intern perusahaan		
Workshop		
Poster di tempat kerja		
Lain-lain.....		

5. Apakah perusahaan memiliki target dan strategi khusus yang berkaitan dengan lingkungan?

Ya \_\_\_\_\_  
Tidak \_\_\_\_\_ (Lanjutkan ke pertanyaan no. 8)

6. Bila ya, apa saja?
7. Untuk tujuan apa hal tersebut dilakukan? (Lanjutkan ke pertanyaan no.9)
8. Bila tidak memiliki target dan strategi khusus mengenai lingkungan, mengapa?
9. Apakah perusahaan memiliki program khusus yang berkaitan dengan lingkungan?

Ya \_\_\_\_\_  
Tidak \_\_\_\_\_ (Lanjutkan ke pertanyaan no. 12)

10. Bila ya, apa saja?
11. Untuk tujuan apa hal tersebut dilakukan? (Lanjutkan ke pertanyaan no. 13)
12. Bila tidak memiliki program khusus yang berkaitan dengan lingkungan, mengapa?
13. Apakah perusahaan pernah melakukan audit lingkungan?
14. Bila ya, audit apa saja yang pernah dilakukan?
15. Untuk tujuan apa, perusahaan melakukan audit tersebut?
16. Apakah perusahaan telah memiliki sertifikasi standar internasional sistem manajemen lingkungan?
17. Bila ya, standar apa yang telah diperoleh?
18. Telah berapa lama memperoleh sertifikasi tersebut?
19. Mengapa mengambil sertifikasi standar internasional sistem manajemen lingkungan tersebut?
20. Berapa persen biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk lingkungan?
21. Hal-hal apa saja yang tercakup di dalam laporan tahunan perusahaan?

*Demikian pedoman wawancara penelitian ini. Terima kasih atas kerjasamanya dalam memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan di atas.*

Peneliti,  
Shanty Novriaty  
No. Mhs: 7100040239

## **Pedoman Wawancara Tambahan untuk Manajer HSE**

1. Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada pegawai terhadap kegiatan produksi/bahan-bahan yang berbahaya?
2. Apakah ada preferensi terhadap bahan mentah yang digunakan (misalnya hanya menampung supplier bahan mentah yang telah ramah lingkungan dll)
3. Agar karyawan dapat melaksanakan proses produksi yang baik (misalnya housekeeping dll) apakah perlu adanya insentif dan disinsetif? Bila ya, seperti apa dan bila tidak mengapa?
4. Apakah ada hubungan antara *cleaner production* dengan mutu produk?
5. Apakah ada hubungan antara *cleaner production* dengan *cost efficiency*?
6. Bagaimana tingkat kepatuhan pegawai terhadap peraturan-peraturan kegiatan produksi (SOP)? Dan bagaimana pula penerimaan mereka terhadap peraturan peraturan ini?

